

Laporan Kinerja
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Tahun Anggaran 2017

Tim Penyusun

- Pelindung : Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
- Pengarah : - Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi
- Penanggung Jawab : Kepala Bagian Rencana dan Laporan
- Editor : Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Laporan
- Tim Penyusun : Wulan Sitarahmi, Sinta Agustina, Mochamad Imron,
Nadiar Chairani, Santi Widiyari, Irfan Nirvanda, Farhan,
Tafaqquh Fiddin, Dimas O. Pratama, Fahmi Mukhtafi,
Urly Agustina, Nadia Laila, Dian Apriyani, Fatimah, Iwan Setiawan,
Bram, Rizal

Kata Pengantar



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2017 dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan selama tahun 2017. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2017 menggambarkan sejumlah capaian kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2017 beserta analisisnya sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh merupakan langkah untuk mewujudkan negara Indonesia yang berketahanan energi. Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan.

Kami berharap dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2017, akan dapat diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2018
Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ego Syahrial', written in a cursive style.

Ego Syahrial

Daftar ISI

1.1	Latar Belakang	7
1.2	Tentang Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	7
1.3	Kilas Balik Pengelolaan Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi tahun 2017.....	8
2.1	Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.....	11
2.1.1	Tujuan 1: Terjaminnya pasokan migas dan bahan bakar domestik.....	13
2.1.2	Tujuan 2: Terwujudnya peran penting subsektor migas dalam penerimaan negara	16
2.1.3	Tujuan 3: Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM	17
2.1.4	Tujuan 4: Terwujudnya peningkatan investasi sektor migas.....	18
2.1.5	Tujuan 5: Terwujudnya peningkatan peran sub sektor migas dalam pembangunan daerah.....	18
2.2	Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2017.....	19
2.3	Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2017	20
3.1	Optimalisasi Penyediaan Energi Fosil	23
3.1.1	Lifting minyak dan gas bumi	23
3.1.2	Jumlah penandatanganan KKKS Migas.....	30
3.1.3	Cadangan minyak dan gas bumi.....	43
3.2	Meningkatkan investasi sub sektor migas	48
3.2.1	Investasi sub sektor migas	49
3.2.2	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan sub sektor migas sesuai prolegnas	54
3.3	Meningkatkan alokasi migas domestik.....	55
3.3.1	Meningkatkan alokasi migas domestik.....	55
3.3.2	Fasilitasi Pembangunan FSRU/Regasifikasi/LNG Terminal (Unit)	60
3.4	Meningkatkan akses dan infrastruktur migas.....	63
3.4.1	Kapasitas kilang BBM.....	63
3.4.2	Kapasitas Terpasang Kilang LPG.....	71
3.4.3	Pembangunan jaringan gas kota	75
3.4.4	Pembangunan infrastruktur sarana bahan bakar gas.....	78
3.4.5	Volume BBM subsidi (APBN 2016)	79

3.4.6	Volume LPG Bersubsidi (APBN 2016).....	81
3.5	Mengoptimalkan penerimaan negara dari sub sektor migas.....	83
3.6	Terwujudnya lindung lingkungan keselamatan operasi dan usaha penunjang migas	86
3.6.1	Jumlah Perusahaan yang dibina untuk melaksanakan kaidah keteknikan yang baik.....	86
3.6.2	Prosentase penurunan jumlah kecelakaan fatal pada operasi kegiatan hulu dan hilir migas	89
3.7	Realisasi Anggaran.....	94

Daftar Gambar

Diagram 1. Hirarkhi Perjanjian Kinerja 2017	11
Diagram 2. Sasaran strategis 1 Rencana Strategis Ditjen Migas 2015-2019.....	14
Diagram 3. Target alokasi pemanfaatan gas bumi Renstra 2015-2019.	15
Diagram 4. Target penerimaan negara dalam Renstra Ditjen Migas 2015-2019.....	16
Diagram 5. Proporsi target 2017 dalam Renstra Ditjen Migas 2015-2019.	17
Diagram 6. Target tujuan 3 dalam Renstra Ditjen Migas 2015-2019.....	17
Diagram 7. Target tujuan 3 dalam Renstra Ditjen Migas 2015-2019.....	18
Diagram 8. Target tujuan 5 dalam Renstra Ditjen Migas 2015-2019.....	19
Diagram 9. Realisasi lifting minyak bumi 2012-2017.	24
Diagram 10. Pengaruh Banyu Urip terhadap lifting minyak bumi 2012-2017	25
Diagram 11. Presentase Penurunan lifting minyak bumi 2012-2017	25
Diagram 12. realisasi lifting gas bumi 2012-2017.....	26
Diagram 13. penurunan lifting gas bumi 2012-2017.....	26
Diagram 14. Lifting gas bumi Nasional 2012-2017.....	27
Diagram 15. Lifting migas nasional 2012-2017.....	28
Diagram 16. Realisasi lifting minyak bumi terhadap rencana strategis 2015-2019	29
Diagram 17. Realisasi lifting gas bumi terhadap target rencana strategis	29
Diagram 18. Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2017	32
Diagram 19. Signature Bonus 2009-2017	35
Diagram 20. Jumlah KKKS Yang Membeli Bid Dokumen, Menyerahkan Dokumen Partisipasi, Dan Jumlah Pemenang Lelang Pada Penawaran WK Migas Konvensional. Diagram di atas secara garis besar menjelaskan bahwa jumlah pemenang lelang elastris terhadap pergerakan harga ICP mengingat jumlah pemenang lelang di tahun anggaran bersangkutan mengikuti dinamika kurva harga ICP.	36
Diagram 21. Penandatanganan KKS Baru 2009-2017.....	37
Diagram 22. Peta Penawaran Langsung WK Migas Non Konvensional 2017.....	39
Diagram 23. Statistik Penawaran dan Penandatanganan WK Migas Non Konvensional.	40
Diagram 24. Penawaran WK Migas Non Konvensional.....	41
Diagram 25. Peta Cadangan Minyak Bumi Status 1 Januari 2017	44
Diagram 26. Capaian indikator cadangan minyak bumi	45
Diagram 27. Diagram penurunan cadangan minyak bumi.....	45
Diagram 28. Peta Cadangan Gas Bumi Status 1 Januari 2017	45
Diagram 29. Capaian cadangan gas bumi terhadap target perjanjian kinerja.	46
Diagram 30. Kecenderungan penurunan cadangan gas bumi.....	46
Diagram 31. Realisasi Pemboran Eksplorasi VS ICP	47
Diagram 32. Pengaruh harga minyak terhadap peluang penemuan cadangan migas	47
Diagram 33. Remaining reserves minyak bumi dan kondensat.....	48
Diagram 34. Remaining reserves gas bumi.....	48
Diagram 35. Realisasi investasi migas.....	50
Diagram 36. Realiasi Investasi Migas VS Harga Minyak (ICP).....	51
Diagram 37. Elastisitas investasi hulu migas terhadap ICP.....	52
Diagram 38. elastisitas investasi hilir migas terhadap ICP.	52

Diagram 39. Realiasi Investasi Hulu Migas 2010-2017*	53
Diagram 40. Realiasi Investasi Hulu Migas 2010-2017*	53
Diagram 41. Prognosa investasi migas 2017-2019	54
Diagram 42. Presentase alokasi gas untuk domestik	56
Diagram 43. Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi Indonesia Oktober 2017	57
Diagram 44. Proporsi alokasi gas bumi tahun 2011-2017	58
Diagram 45. Realisasi penyaluran gas tahun 2017	59
Diagram 46. Lokasi terminal FSRT	60
Diagram 47. Progres pembangunan FSRU	61
Diagram 48. Data Produksi BBM dalam negeri tahun 2015-2017	65
Diagram 49. Produksi total BBM 2011-2017	66
Diagram 50. Kilang Minyak Indonesia	67
Diagram 51. Kapasitas kilang LPG tahun 2013 - 2017	73
Diagram 52. Diagram Produksi LPG Tahun 2012 - 2017	74
Diagram 53. Perbandingan produksi, impor, dan konsumsi LPG Tahun 2012 – 2017	75
Diagram 54. Perbandingan produksi dan konsumsi LPG Tahun 2012 – 2017	75
Diagram 55. Realisasi Jenis BBM Tertentu Terhadap Kuota 2011 – 2017	81
Diagram 56. Realisasi LPG tabung 3 kg terhadap kuota APBNP	82
Diagram 57. Realisasi LPG tabung 3 kg Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2011-2017	82
Diagram 58. Komposisi realisasi penerimaan negara migas dibandingkan target	84
Diagram 59. Diagram penerimaan negara vs ICP VS Kurs USD	85
Diagram 60. Diagram perbandingan rerata harga ICP, WTI dan Brent	85
Diagram 61. Realisasi penerimaan negara sub sektor migas terhadap target Renstra	85
Diagram 62. Jumlah perusahaan dibina melaksanakan kaidah keteknikan yang baik	88
Diagram 63. Kecelakaan Operasi Kegiatan Usaha Hulu Migas 2012 – 2017	90
Diagram 64. Target dan realisasi anggaran Ditjen Migas	94
Diagram 65. Postur Anggaran Ditjen Migas Tahun 2017	97
Diagram 66. Summary penyerapan anggaran Ditjen Migas TA 2017	97
Diagram 67. Realisasi anggaran per 31 Desember 2017	98
Diagram 68. Realisasi PNBP Ditjen Migas Tahun 2013-2017	101
Diagram 69. Prosentase Rerata Capaian Per Indikator Kinerja	103

Daftar Tabel

Tabel 1. Sasaran Strategis Ditejn Migas 2017	12
Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Ditjen Migas 2015-2019	12
Tabel 3. Indikator Kinerja Utama Tujuan 1 Rencana Strategis Ditjen Migas 2015-2019..	15
Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan Ditjen Migas 2017	19
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Utama Ditjen Migas 2017	21
Tabel 6. Indikator Kinerja Utama Lifting Migas 2017	23
Tabel 7. Kendala Pencapaian Target dan Upaya Peningkatan Lifting Migas	29
Tabel 8. Indikator Kinerja Utama Jumlah Penandatanganan KKKS Migas 2017	30
Tabel 9. Penetapan Pemenang Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2017	33
Tabel 10. Hasil Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2016	33
Tabel 11. Penawaran WK Migas Non Konvensional tahun 2017	38
Tabel 12. Jadwal Penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional 2017	39
Tabel 13. Revisi Jadwal Lelang Reguler dan Penawaran Langsung WK Migas Non Konvensional	42
Tabel 14. Revisi Jadwal Lelang Reguler dan Penawaran Langsung WK Migas Non Konvensional	42
Tabel 15. Indikator Utama Cadangan Migas 2017	43
Tabel 16. Indikator Utama Investasi Sub Sektor Migas 2017	49
Tabel 17. Indikator Utama Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan sub sektor migas sesuai prolegnas 2017	54
Tabel 18. Indikator Utama Presentase alokasi gas domestik 2017	55
Tabel 19. Indikator Utama Fasilitasi pembangunan FSRU (Flating Storage Regasification Unit/Regasifikasi on-shore/LNG Terminal) 2017	60
Tabel 20. Indikator Utama Kapasitas Kilang BBM 2017	63
Tabel 21. Data Produksi 3 tahun terakhir	64
Tabel 22. Badan Usaha Pengolahan Minyak Bumi (Izin Usaha Tetap)	68
Tabel 23. Badan Usaha Pengolahan Minyak Bumi (Izin Usaha Sementara)	69
Tabel 24. Badan Usaha Pengolahan Hasil Olahan (Izin Usaha Tetap)	69
Tabel 25. Badan Usaha Pengolahan Hasil Olahan (Izin Usaha Sementara).....	70
Tabel 26. Indikator Kinerja Utama Kapasitas Terpasang LPG	71
Tabel 27. Kapasitas kilang LPG	71
Tabel 28. Perbandingan Produksi, Impor, dan Konsumsi LPG 2012 - 2016	75
Tabel 29. Indikator Kinerja Pembangunan Jaringan Gas Kota 2017	76
Tabel 30. Realisasi Pembangunan Jaringan Gas Kota 2017	76
Tabel 31. Indikator kinerja pembangunan infrastruktur sarana bahan bakar gas 2017 ..	78
Tabel 32. Distribusi Konverter Kit Untuk Kendaraan 2017	79
Tabel 33. Indikator Kinerja Jumlah Volume BBM subsidi 2017	80
Tabel 34. Indikator Kinerja Jumlah Volume LPG subsidi 2017	81
Tabel 35. Target Tahun 2018	82
Tabel 36. Indikator Kinerja Jumlah realisasi penerimaan negara dari sub sektor migas terhadap target APBN	83
Tabel 37. Kebijakan Teknis Pendapatan SDA Migas	86

Tabel 38. Jumlah perusahaan dibina untuk melaksanakan keteknikan yang baik	87
Tabel 39. Perusahaan hulu migas yang operasinya tidak terjadi kecelakaan fatal	89
Tabel 40. Indikator Prosentase penurunan jumlah kecelakaan fatal hilir migas.....	92
Tabel 41. Realisasi Anggaran DIPA Ditjen Migas Tahun 2017 per Jenis Belanja.....	95
Tabel 42. Realisasi Anggaran Per Unit Eselon II di Lingkungan Ditjen Migas.....	95
Tabel 43. Realisasi DIPA Ditjen Migas Tahun Anggaran 2013-2017	96
Tabel 44. Realisasi Anggaran Per Unit Eselon I Kementerian ESDM Tahun 2016	98
Tabel 45. Realisasi anggaran per 31 Desember 2017.....	99
Tabel 46. Realisasi PNBP TA 2017	100
Tabel 47. Kontribusi PNBP Ditjen Migas Tahun 2016	100
Tabel 48. Capaian Anggaran Ditjen Migas Per Unit Eselon II Tahun 2017.....	102
Tabel 49. Rekapitulasi capaian kinerja Ditjen Migas 2017	103

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, "Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran". Adapun dalam peraturan dimaksud, diatur tujuan laporan kinerja yang meliputi penyampaian informasi kinerja atas target kepada pemberi mandat dan sebagai bagian mekanisme untuk memperbaiki kinerja instansi secara berkesinambungan.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2017 dilakukan dengan mengusung semangat pembelajaran atas pencapaian kinerja Ditjen Migas di tahun 2017 sebagai upaya perbaikan kinerja Ditjen Migas di tahun yang akan datang. Tahun 2017 merupakan tahun dimana beberapa kebijakan yang mendukung pengelolaan energi berkeadilan diterbitkan oleh Pemerintah. Kebijakan *Gros Split* di hulu migas dan BBM satu harga merupakan dua kebijakan besar yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mengefisienkan pengelolaan SDA migas. Namun demikian, pencapaian atas target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan Rencana Strategis Ditjen Migas masih merupakan salah satu prioritas utama kinerja Ditjen Migas. Dengan adanya Laporan Kinerja Ditjen Migas 2017, diharapkan adanya evaluasi berkesinambungan atas kinerja di tahun 2017 yang dapat sebagai bekal pembelajaran dalam pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya, baik kegiatan yang tercakup dalam Perjanjian Kinerja maupun kegiatan strategis yang dilaksanakan secara sistematis dan spesifik pada tahun berjalan.

1.2 Tentang Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, diatur bahwa Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi memiliki tugas untuk "menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi". Selanjutnya, dalam pasal 129 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi bertugas "menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.

Terkait dengan hal tersebut di atas, dalam pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 dan pasal 130 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016, secara garis besar Ditjen Migas berwenang antara lain untuk:

- Merumuskan kebijakan sub sektor minyak dan gas bumi;
- Melaksanakan kebijaksanaan sub sektor minyak dan gas bumi;
- Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria sub sektor minyak dan gas bumi;
- Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi sub sektor minyak dan gas bumi;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan sub sektor minyak dan gas bumi;
- Melaksanakan administrasi Ditjen Migas; dan
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Menteri

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terdiri dari enam unit eselon II yang terdiri dari:

- Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
- Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
- Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi

1.3 Kilas Balik Pengelolaan Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi tahun 2017

Tahun 2017 bagi pengelolaan sub sektor minyak dan gas bumi dapat dikatakan merupakan tahun dimana beberapa langkah strategis diambil oleh Pemerintah guna melaksanakan komitmennya mengelola sumber daya migas sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat dan dalam rangka menghadapi iklim investasi migas yang kurang mendukung akibat harga minyak dunia yang masih rendah. Beberapa kebijakan telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dimaksud diharapkan dapat mengatasi beberapa kendala pengelolaan sub sektor migas akibat kondisi minyak dunia yang kurang mendukung, sumur-sumur minyak Indonesia yang makin menua, serta ketidakmerataan distribusi sumber daya migas untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pada tahun 2017, beberapa peristiwa berkenaan dengan sub sektor minyak dan gas bumi nasional adalah harga ICP yang mencapai USD 51.19 per barel. Angka ini, meskipun tergolong meningkat dibandingkan tahun 2016 masih jauh lebih rendah dibandingkan harga ICP sebelum jatuhnya harga minyak dunia selepas tahun 2014. Pada pertengahan tahun 2017, harga minyak WTI sempat menurun diakibatkan adanya ketakutan pasar

apabila kesepakatan OPEC gagal atau meningkatnya produksi Amerika Serikat yang merusak kuota produksi yang dibatasi oleh OPEC dan negara-non OPEC (Jones, 2017). Namun demikian, kebijakan OPEC untuk memperpanjang kesepakatannya, peningkatan demand minyak dunia, serta jumlah ekspor minyak Amerika Serikat yang tidak sebesar yang ditakutkan oleh dunia meningkatkan kembali harga minyak dunia (Jones, 2017) termasuk harga minyak mentah Indonesia yang meningkat sebagai dampak dari kebijakan OPEC pada tahun 2017 (Azzura, 2018). Selanjutnya, Azzura (2018) juga mengatakan bahwa beberapa peristiwa yang diindikasikan meningkatkan harga minyak dunia antara lain meliputi ledakan terminal bus New York Port Authority, penggunaan bahan bakar migas di Amerika menjelang libur natal, mogok kerja buruh minyak Nigeria, pernyataan kontroversial Presiden Amerika terkait Yerusalem, serta bertambahnya demand minyak mentah di Cina.

Selain harus menghadapi kondisi dimana harga minyak dunia cukup *volatile* dan dipengaruhi oleh banyak variabel external di luar kewenangan Pemerintah Indonesia, Pemerintah masih harus mengupayakan pengelolaan sumber daya migas yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Apabila sebelumnya harga BBM masih belum merata di Indonesia, maka pada tahun ini, energi berkeadilan menjadi semangat pengelolaan migas selama tahun 2017 sehingga kebijakan seperti BBM satu harga menjadi kebijakan yang digalakkan oleh Pemerintah untuk pemeratakan aksesibilitas BBM sebagai sumber daya energi. Selanjutnya, efisiensi perijinan juga menjadi prioritas Pemerintah guna meningkatkan iklim investasi migas di Indonesia. Beberapa kebijakan strategis yang diambil oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sub sektor minyak dan gas bumi antara lain adalah:

a) Kebijakan terkait *Gross Split*

Kebijakan terkait *Gross Split* diberlakukan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil yang kemudian direvisi dengan Peraturan nomor 52 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*. Permen ESDM nomor 8 tahun 2017 dimaksud mengakhiri era pemberlakuan kontrak bagi hasil yang menggunakan skema PSC di Indonesia di masa depan dan menerapkan skema bagi hasil *Gross Split* bagi penandatanganan kontrak kerja sama (KKS) selanjutnya setelah Peraturan dimaksud diterbitkan. Selanjutnya, revisi terhadap Permen ESDM nomor 8 tahun 2017 dilakukan dengan diterbitkannya Permen ESDM nomor 52 tahun 2017 yang mencantumkan tambahan variabel komponen dan variabel progresif sebagai insentif bagi KKKS untuk menanamkan investasinya di hulu migas Indonesia.

b) Kebijakan BBM Satu Harga

Kebijakan BBM satu harga merupakan upaya Pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya energi secara berkeadilan. Apabila sebelumnya harga BBM tidak sama di seluruh pelosok di Indonesia, diharapkan dengan adanya kebijakan ini, daerah tertinggal, terjauh dan terluar (3T) Indonesia mampu merasakan manfaat BBM dengan harga yang kurang lebih sama dengan di kota-kota besar di Indonesia lainnya. Dengan adanya kebijakan ini, agen penyalur di

beberapa daerah 3T telah menetapkan harga BBM yang sama dengan kota-kota besar lain di Indonesia

c) Penyederhanaan Perijinan

Penyederhanaan perijinan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi Indonesia. Perijinan minyak gas bumi yang semula dianggap berbelit dan banyak diupayakan oleh Pemerintah untuk disederhanakan. Proses penyederhanaan ini pada umumnya masih berjalan dan di masa depan Pemerintah atau dalam hal ini Ditjen Migas berupaya semakin meningkatkan pelayanan publik melalui pengembangan pelayanan perijinan yang semakin akuntabel dan melalui jaringan on-line.

Selain itu, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tetap melaksanakan komitmennya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mencapai target sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Migas 2017. Target kinerja yang ditetapkan pada umumnya merupakan target yang ditetapkan dengan melihat kondisi terakhir dunia kemigasan, kebijakan Pemerintah, serta dokumen perencanaan jangka menengah dan perencanaan Nasional. Adapun target kinerja yang ditetapkan dalam PK Ditjen Migas 2017 antara lain adalah sebagai berikut:

Perencanaan Kinerja Tahun Anggaran 2017

Lampiran I Peraturan Menteri PAN & RB nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa sasaran kinerja untuk tingkat Eselon I yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja merupakan penggambaran atas dampak dan outcome dimana indikator Kinerja Utama Eselon I dan indikator kinerja lain yang relevan digunakan sebagai acuan. Dalam hal ini, Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2016 disusun dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri ESDM nomor 22 Tahun 2015 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Termasuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas bumi Tahun 2015-2019, serta Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 dalam penyusunan indikator utamanya.

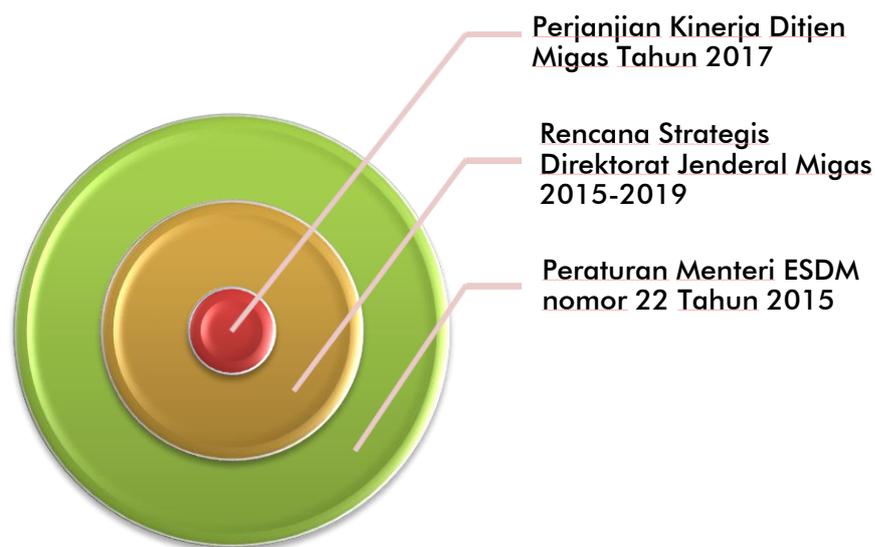


Diagram 1. Hirarkhi Perjanjian Kinerja 2017. Diagram ini menjelaskan hirarkhi PK 2017 terhadap Rencana Strategis 2015-2019 dan Peraturan Menteri ESDM nomor 22 tahun 2015

2.1 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Terdapat tujuh sasaran strategis yang terdiri dari 10 (sepuluh) indikator kinerja dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak Bumi Tahun 2017. Sasaran strategis dimaksud dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Sasaran Strategis Ditejin Migas 2017

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Terjaminnya pasokan migas dan bahan bakar domestik	1 Mengoptimalkan kapasitas penyediaan migas	3
	2 Meningkatkan alokasi migas domestik	1
	3 Meningkatkan akses dan infrastruktur migas	2
Terwujudnya peran penting subsektor migas dalam penerimaan negara	4 Mengoptimalkan penerimaan negara dari sub sektor migas	1
Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM	5 Mewujudkan subsidi migas yang tepat sasaran	1
Terwujudnya peningkatan investasi sektor migas	6 Mewujudkan peningkatan investasi sektor migas	1
Terwujudnya peningkatan peran sub sektor migas dalam pembangunan daerah	7 Mengoptimalkan dana bagi hasil dari sektor migas	1

Adapun penjabaran indikator kinerja utama yang tercatat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan tujuan dapat terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Ditjen Migas 2015-2019

TUJUAN	No.	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Terjaminnya pasokan migas dan bahan bakar domestik	1	Produksi/Lifting	Ribu boepd	2046	2030	1955	1915	1995
		a. Produksi Minyak Bumi	Ribu bpd	825	830	750	700	700
		b. Lifting Gas Bumi	Ribu boepd	1221	1150	1175	1200	1295
			MMSCFD	6838	6440	6580	6720	7252
	2	Penandatanganan KKS Migas	Kontrak	12	10	12	12	13
	3	Rekomendasi Wilayah Kerja	Wilayah	39	39	40	41	41
	4	Pemanfaatan Gas Bumi						
		a. Domestik	%	59	61	62	63	64
		b. Ekspor	%	41	39	38	37	36
	5	Akses dan Infrastruktur BBM						
	a. Volume BBM bersubsidi	%	17.9	19.2	20.5	21.9	23.5	

TUJUAN	No.	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
		b. Kapasitas Kilang BBM	%	1167	1167	1167	1167	1167
	6	Akses dan Infrastruktur Gas Bumi						
		a. Akses dan Infrastruktur Gas Bumi	Juta MT	5.77	6.11	6.48	6.87	7.28
		b. Pembangunan Jaringan Gas Kota (APBN)	Lokasi	2	2	2	2	2
		c. Konversi BBM ke BBG untuk transportasi (APBN)	SPBG	2	2	2	2	2
		d. Kapasitas Kilang Gas						
		– Kapasitas Terpasang Kilang LPG	Juta TON	4.6	4.62	4.64	4.66	4.68
		– Produksi LPG	Juta TON	2.39	2.41	2.43	2.43	2.43
		e. Pembangunan FSRU/Regasification	Unit	1	2	1	1	2
Terwujudnya peran penting subsektor migas dalam penerimaan negara	7	Penerimaan Negara Sektor Migas						
		a. Penerimaan Migas	Triliun Rp	139.38	202.47	105.9	209.33	293.79
Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM	8	Subsidi Bahan Bakar						
		a. Volume BBM Bersubsidi	Juta KL	17.9	17.9	17.9	17.9	17.9
		b. Volume LPG Bersubsidi	Juta Ton	5.77	6.11	6.48	6.87	7.28
Terwujudnya peningkatan investasi sektor migas	9	Investasi Subsektor Migas						
		a. Minyak dan Gas Bumi	Triliun Rp	23.67	25.23	26.8	28.36	29.93
Terwujudnya peningkatan peran subsektor migas dalam pembangunan daerah	10	Dana Bagi Hasil						
		a. Minyak dan Gas Bumi	Triliun Rp	56.41	57.94	58.71	61.15	63.11

2.1.1 Tujuan 1: Terjaminnya pasokan migas dan bahan bakar domestik

Tujuan "terjaminnya pasokan migas dan bahan bakar domestik" terdiri dari tiga sasaran strategis, yaitu sasaran mengoptimalkan kapasitas penyediaan migas, meningkatkan

alokasi migas domestik, dan meningkatkan akses dan infrastruktur migas dengan total indikator kinerja sebanyak enam indikator. Pada tahun 2017, secara keseluruhan target lifting gas bumi dan target penandatanganan KKS migas ditetapkan lebih tinggi dibandingkan tahun 2015-2016. Namun demikian, tahun 2017 memiliki target lifting minyak bumi lebih rendah. Hal ini dikarenakan adanya faktor natural decline pada produksi minyak sumur-sumur tua di Indonesia. Selain itu, apabila dibandingkan dengan tahun 2016, angka lifting minyak bumi tahun 2017 diprediksi lebih rendah mengingat pada tahun 2016 diharapkan proyek Banyu Urip sudah dapat beroperasi secara full term sehingga dapat memberi kontribusi lebih pada produksi minyak bumi nasional pada tahun dimaksud.

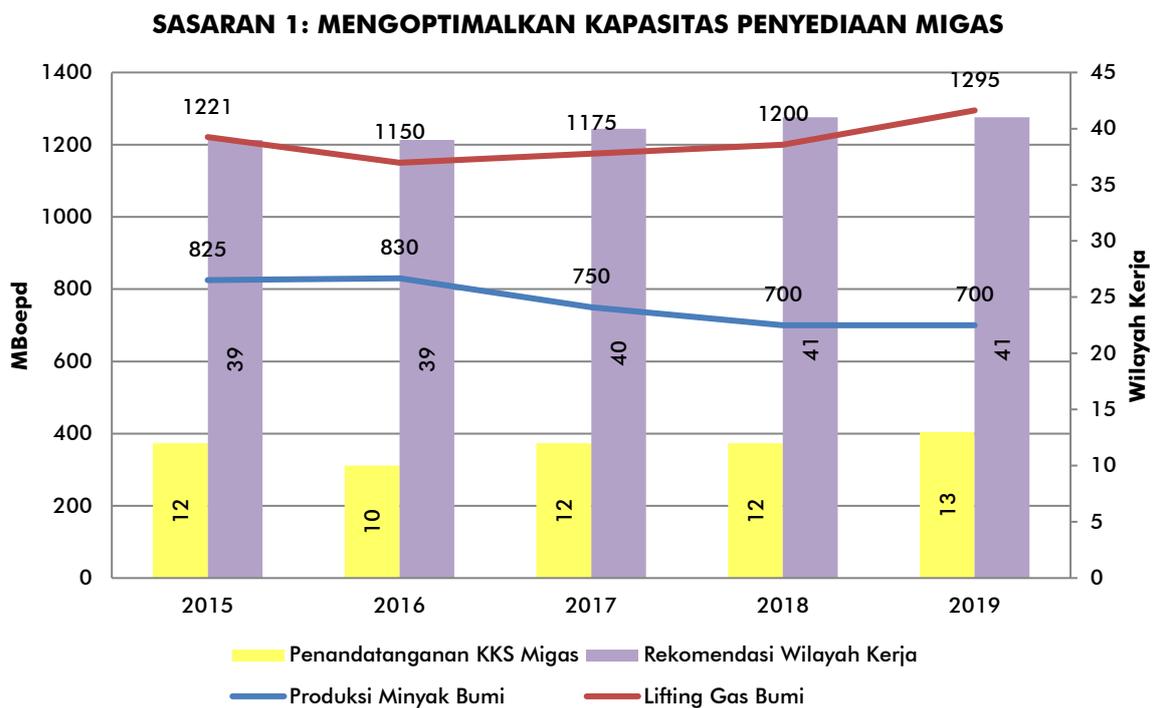


Diagram 2. Sasaran strategis 1 Rencana Strategis Ditjen Migas 2015-2019. Diagram diatas menjelaskan bahwa target lifting, jumlah rekomendasi wilayah kerja, serta jumlah penandatanganan kontrak kerja ditargetkan meningkat. Penentuan target ini mengikuti perkiraan harga minyak dunia yang dilakukan ketika penyusunan Renstra Ditjen Migas 2015-2019 dilakukan.

Selanjutnya, dalam tujuan "terjaminnya pasokan migas dan bahan bakar domestik", ditegaskan komitmen Pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan sumber daya migas sebagai bahan baku dalam pembangunan nasional. Dalam hal ini, telah dicantumkan target alokasi gas bumi untuk kebutuhan domestik yang meningkat setiap tahunnya selama periode 2015-2019. Pada tahun 2017, telah ditetapkan target alokasi gas bumi untuk domestik sebesar 62% dari keseluruhan pemanfaatan alokasi gas bumi.

Pemanfaatan Gas Bumi (%)

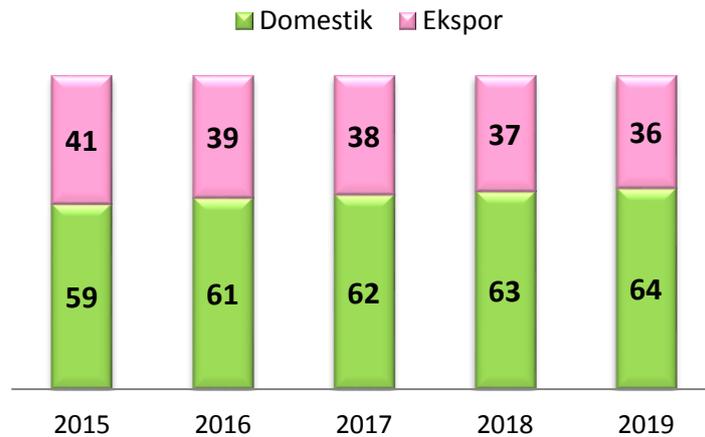


Diagram 3. Target alokasi pemanfaatan gas bumi Renstra 2015-2019.

Selama periode 2015-2019 ditargetkan bahwa alokasi gas bumi untuk Domestik semakin meningkat sementara alokasi untuk ekspor menurun. Ini menggambarkan komitmen Pemerintah untuk menjadikan sumber daya migas nasional sebagai bahan baku pembangunan Indonesia.

Selanjutnya, dalam tujuan "terjaminnya pasokan migas dan bahan bakar domestik", Pemerintah, atau dalam hal ini Ditjen Migas juga berupaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan sumberdaya migas melalui pengembangan infrastruktur. Untuk itu, dalam indikator kinerja sasaran "meningkatkan akses dan infrastruktur migas" tercantum indikator kinerja terkait pengembangan infrastruktur migas sebagai berikut:

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama Tujuan 1 Rencana Strategis Ditjen Migas 2015-2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2015	2016	2017	2018	2019	
Meningkatkan akses dan infrastruktur migas	5	Akses dan Infrastruktur BBM						
		a. Volume BBM bersubsidi	%	17.9	19.2	20.5	21.9	23.5
		b. Kapasitas Kilang BBM	%	1167	1167	1167	1167	1167
	6	Akses dan Infrastruktur Gas Bumi						
		a. Akses dan Infrastruktur Gas Bumi	Juta MT	5.77	6.11	6.48	6.87	7.28
		b. Pembangunan Jaringan Gas Kota (APBN)	Lokasi	2	2	2	2	2
		c. Konversi BBM ke BBG untuk	SPBG	2	2	2	2	2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
			2015	2016	2017	2018	2019	
	transportasi (APBN)							
	d. Kapasitas Kilang Gas							
	– Kapasitas Terpasang Kilang LPG	Juta TON	4.6	4.62	4.64	4.66	4.68	
	– Produksi LPG	Juta TON	2.39	2.41	2.43	2.43	2.43	
	e. Pembangunan FSRU/Regasification	Unit	1	2	1	1	2	

2.1.2 Tujuan 2: Terwujudnya peran penting subsektor migas dalam penerimaan negara

Besarnya penerimaan negara dari sektor migas pada umumnya ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor lifting dan faktor harga minyak bumi Indonesia. Pada tahun 2017, sebagai mana disebutkan dalam Rencana Strategis Ditjen Migas 2015-2019, ditargetkan bahwa penerimaan Migas mencapai 205.9 triliun rupiah, meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan target di tahun 2017. Hal ini dikarenakan ICP Indonesia diasumsikan sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga dalam Renstra Ditjen Migas 2015-2019 ditetapkan target sebesar 205.9 triliun rupiah.

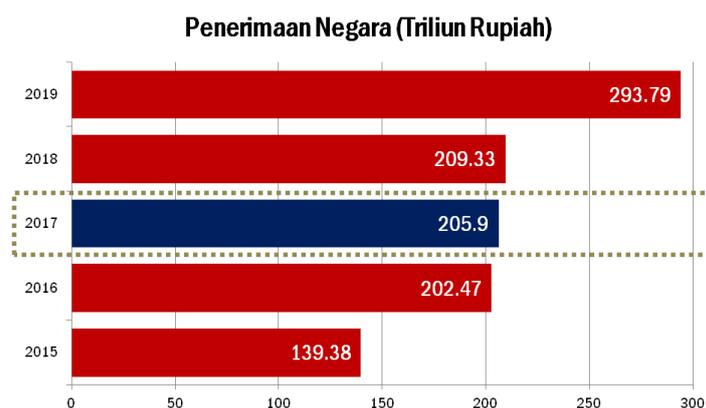


Diagram 4. Target penerimaan negara dalam Renstra Ditjen Migas 2015-2019. Diagram ini menggambarkan bahwa selama periode 2015-2019 ditargetkan dalam Renstra Ditjen Migas 2015-2019 penerimaan negara semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini mengikuti perkiraan harga minyak dunia yang dilakukan ketika penyusunan Renstra Ditjen Migas 2015-2019 dilakukan.

Adapun target penerimaan negara yang ditetapkan dalam Renstra Ditjen Migas Tahun 2015-2019 selama periode dimaksud mencapai 1050.87 triliun rupiah. Dengan demikian,

target tahun 2017 menyumbangkan sebanyak 16% dari total target penerimaan negara sektor migas tahun 2015-2019 sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dimaksud.

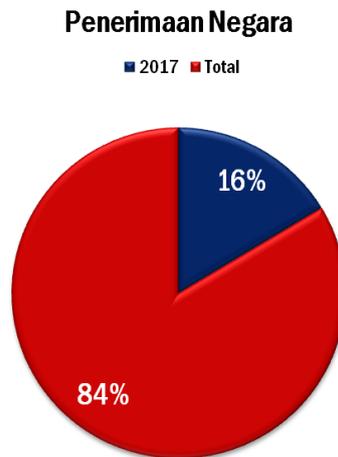


Diagram 5. Proporsi target 2017 dalam Renstra Ditjen Migas 2015-2019. Diagram ini menggambarkan bahwa target penerimaan negara yang ditetapkan untuk tahun 2017 merupakan 16% dari target penerimaan negara keseluruhan selama 2015-2019.

2.1.3 Tujuan 3: Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM

Pada tahun 2018, Pemerintah masih menganggarkan subsidi LPG 3 Kg yang ditujukan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah dan BBM bersubsidi. Pada tahun 2017, telah ditetapkan target subsidi BBM sebesar 17.9 Juta kilo liter dan volume LPG bersubsidi sebesar 6.48 Juta Ton.

Tujuan 3: Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM

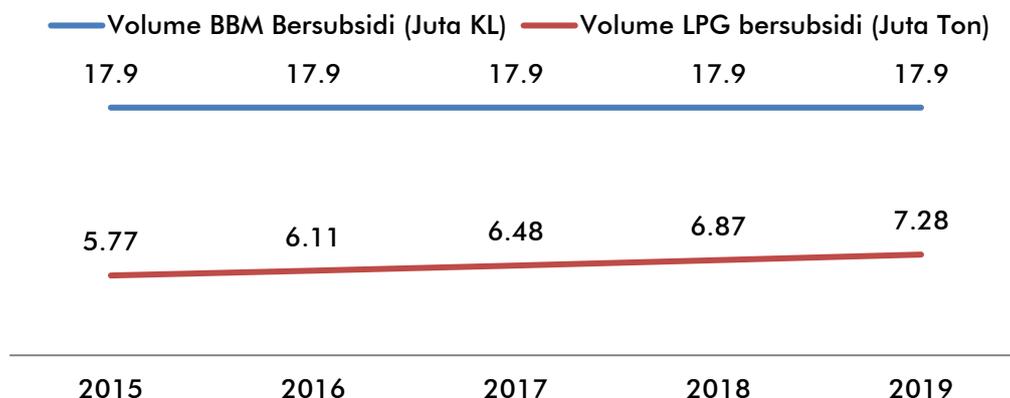


Diagram 6. Target tujuan 3 dalam Renstra Ditjen Migas 2015-2019. Diagram ini menunjukkan bahwa kuota volume BBM bersubsidi sepanjang tahun 2015-2019 ditargetkan sama sementara kuota volume LPG bersubsidi ditargetkan meningkat.

2.1.4 Tujuan 4: Terwujudnya peningkatan investasi sektor migas

Investasi sub sektor migas ini mencakup investasi hulu dan investasi hilir migas. Dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Migas 2015-2016, Pemerintah menetapkan target investasi sub sektor migas tahun 2017 sebesar 26.8 Triliun Rupiah.

Tujuan 4: Terwujudnya peningkatan investasi sektor migas

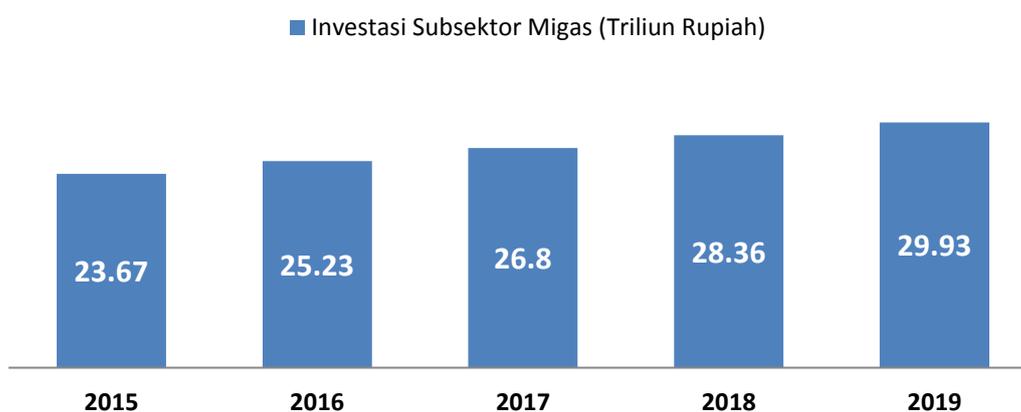


Diagram 7. Target tujuan 3 dalam Renstra Ditjen Migas 2015-2019.

Diagram ini menunjukkan bahwa kuota volume BBM bersubsidi sepanjang tahun 2015-2019 ditargetkan sama sementara kuota volume LPG bersubsidi ditargetkan meningkat.

2.1.5 Tujuan 5: Terwujudnya peningkatan peran sub sektor migas dalam pembangunan daerah

Pada tahun 2017, target jumlah DBH yang ditetapkan dari sub sektor migas sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Ditjen Migas 2015-2019 adalah sebesar 58.71 triliun rupiah.

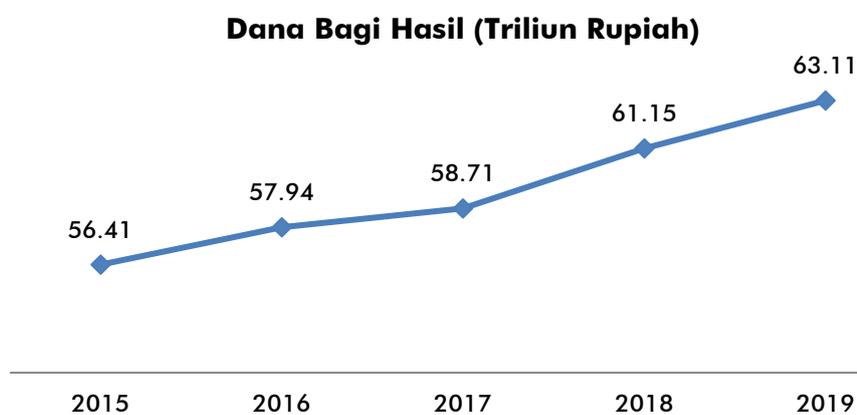


Diagram 8. Target tujuan 5 dalam Renstra Ditjen Migas 2015-2019.
Dana bagi hasil migas ditargetkan meningkat dalam Renstra Ditjen Migas 2015-2019 mengikuti perhitungan pada saat penyusunan Renstra Migas 2015-2019 dilakukan.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2017

Pada dasarnya Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2017 disusun berdasarkan Rencana Strategis Ditjen Migas Tahun 2015-2019 dan berlandaskan pada Peraturan Menteri ESDM nomor 22 Tahun 2015 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Termasuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, dengan mengakomodasi beberapa penyesuaian yang dilakukan untuk mengikuti perubahan kebijakan serta penugasan pimpinan kelembagaan pada tahun dimaksud. Penjabaran Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan Ditjen Migas 2017

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Optimalisasi Penyediaan Energi Fosil	1	Lifting minyak dan gas bumi		
	a.	Lifting minyak bumi (RAPBN 2017)	MBOPD	815
	b.	Lifting gas bumi (RAPBN 2017)	MBOEPD	1.150
	2	Jumlah penandatanganan KKKS Migas		
	a.	Konvensional	KKKS	4
	b.	Non konvensional	KKKS	2
	3	Cadangan minyak dan gas bumi		
	a.	Cadangan minyak bumi	MMSTB	6714
	b.	Cadangan gas bumi	TCF	146
Meningkatkan investasi sub sektor migas	4	Investasi sub sektor migas	Miliar US\$	22,20
	5	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan sub sektor migas sesuai prolegnas	Rancangan	10
	6	Pemanfaatan gas bumi dalam negeri		
	a.	Presentase alokasi gas domestik	%	62

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatkan alokasi migas domestik		b. Fasilitasi pembangunan FSRU (Flating Storage Regasification Unit/Regasifikasi on-shore/LNG Terminal)	Unit	1
Meningkatkan akses dan infrastruktur migas	7	Kapasitas kilang BBM		
		a. Produksi BBM dari kilang dalam negeri	Juta KL	39
		b. Kapasitas kilang BBM dalam negeri	Ribu BCPD	1.169
	8	Kapasitas terpasang kilang LPG	Juta MT	4,70
	9	Pembangunan jaringan gas kota		
		a. Jumlah wilayah dibangun jaringan gas kota	Lokasi	9
		b. Rumah tangga tersambung gas kota	SR	53.700
	10	Pembangunan infrastruktur sarana bahan bakar gas	Lokasi	1
Mewujudkan subsidi energi yang lebih tepat sasaran	11	Volume BBM subsidi (APBN 2016)	Juta KL	16,61
	12	Volume LPG subsidi (APBN 2016)	Juta MT	7,09
Mengoptimalkan penerimaan negara dari sub sektor migas	13	Jumlah realisasi penerimaan negara dari sub sektor migas terhadap target APBN (APBN 2016)	Rp. Triliun	105,45
Terwujudnya lindung lingkungan keselamatan operasi dan usaha penunjang migas	14	Prosentase penurunan jumlah kecelakaan fatal pada operasi kegiatan hulu dan hilir migas	%	90
	15	Jumlah perusahaan yang melaksanakan keteknikan yang baik	Perusahaan	45

2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2017

Penetapan target Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun anggaran 2017 pada umumnya berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2015-2019 dan Peraturan Menteri ESDM nomor 22 Tahun 2015

Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Termasuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa penyesuaian telah dilakukan mengingat adanya perkembangan situasi dan kondisi kebijakan nasional pada tahun 2017 yang antara lain meliputi ditetapkannya beberapa kebijakan seperti APBN, APBNP, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan dokumen perencanaan lainnya, implementasi kebijakan NAWACITA, penugasan pimpinan kelembagaan, serta hasil evaluasi pada dokumen rencana terdahulu. Adapun penjabaran Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2017 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Utama Ditjen Migas 2017

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Optimalisasi Penyediaan Energi Fosil	1	Lifting minyak dan gas bumi		
		a. Lifting minyak bumi (APBN 2016)	MBOPD	815
		b. Lifting gas bumi (APBN 2016)	MBOEPD	1150
	2	Jumlah penandatanganan KKKS Migas		
		a. Konvensional	KKKS	4
		b. Non konvensional	KKKS	2
	3	Cadangan minyak dan gas bumi		
		a. Cadangan minyak bumi	MMSTB	6714
		b. Cadangan gas bumi	TCF	146
Meningkatkan investasi sub sektor migas	4	Investasi sub sektor migas	Miliar US\$	22,20
	5	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan sub sektor migas sesuai prolegnas	Rancangan	10
Meningkatkan alokasi migas domestik	6	Pemanfaatan gas bumi dalam negeri		
		a. Presentase alokasi gas domestik	%	62
		b. Fasilitasi pembangunan FSRU (Flating Storage Regasification Unit/Regasifikasi on-shore/LNG Terminal)	Unit	1
Meningkatkan akses dan	7	Kapasitas kilang BBM		
		a. Produksi BBM dari kilang dalam negeri	Juta KL	39

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
infrastruktur migas		b. Kapasitas kilang BBM dalam negeri	Ribu BCPD	1169
	8	Kapasitas terpasang kilang LPG	Juta MT	4,70
	9	Pembangunan jaringan gas kota		
		a. Jumlah wilayah dibangun jaringan gas kota	Lokasi	9
		b. Rumah tangga tersambung gas kota	SR	53.700
	10	Pembangunan infrastruktur sarana bahan bakar gas	Lokasi	1
	11	Volume BBM subsidi (APBN 2016)	Juta KL	16,61
	12	Volume LPG subsidi (APBN 2016)	Juta MT	7,09
Mengoptimalkan penerimaan negara dari sub sektor migas	13	Jumlah realisasi penerimaan negara dari sub sektor migas terhadap target APBN (APBN 2016)	Rp. Triliun	105,45
Terwujudnya lindung lingkungan keselamatan operasi dan usaha penunjang migas	14	Jumlah perusahaan yang melaksanakan keteknikan yang baik	Perusahaan	45
	15	Jumlah perusahaan hulu dan hilir migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan fatal:	Perusahaan	90
		a. Jumlah perusahaan hulu migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan fatal		180
	b. Jumlah perusahaan hilir migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan fatal			

Bab III

PENGUKURAN AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT JENDERAL MIGAS TAHUN ANGGARAN 2017

3.1 Optimalisasi Penyediaan Energi Fosil

Sasaran optimalisasi penyediaan energi fosil Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dibagi menjadi tiga indikator kinerja, yaitu indikator kinerja atas lifting migas, jumlah penandatanganan KKKS migas, dan cadangan migas sebagaimana telah diatur dalam Lampiran V Peraturan Menteri ESDM nomor 22 Tahun 2015.

3.1.1 Lifting minyak dan gas bumi

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, menjelaskan bahwa lifting minyak dan gas bumi adalah "sejumlah minyak mentah dan / atau gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (*custody transfer point*)".

Adapun capaian terhadap target lifting migas 2017 Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Indikator Kinerja Utama Lifting Migas 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Presentase
1	Lifting minyak dan gas bumi				
	a. Lifting minyak bumi (APBN 2017)	MBOPD	815	803	98.53%
	b. Lifting gas bumi (APBN 2017)	MBOPEPD	1150	1140	99.13%

*) Periode Januari 2017 – 31 Desember 2017

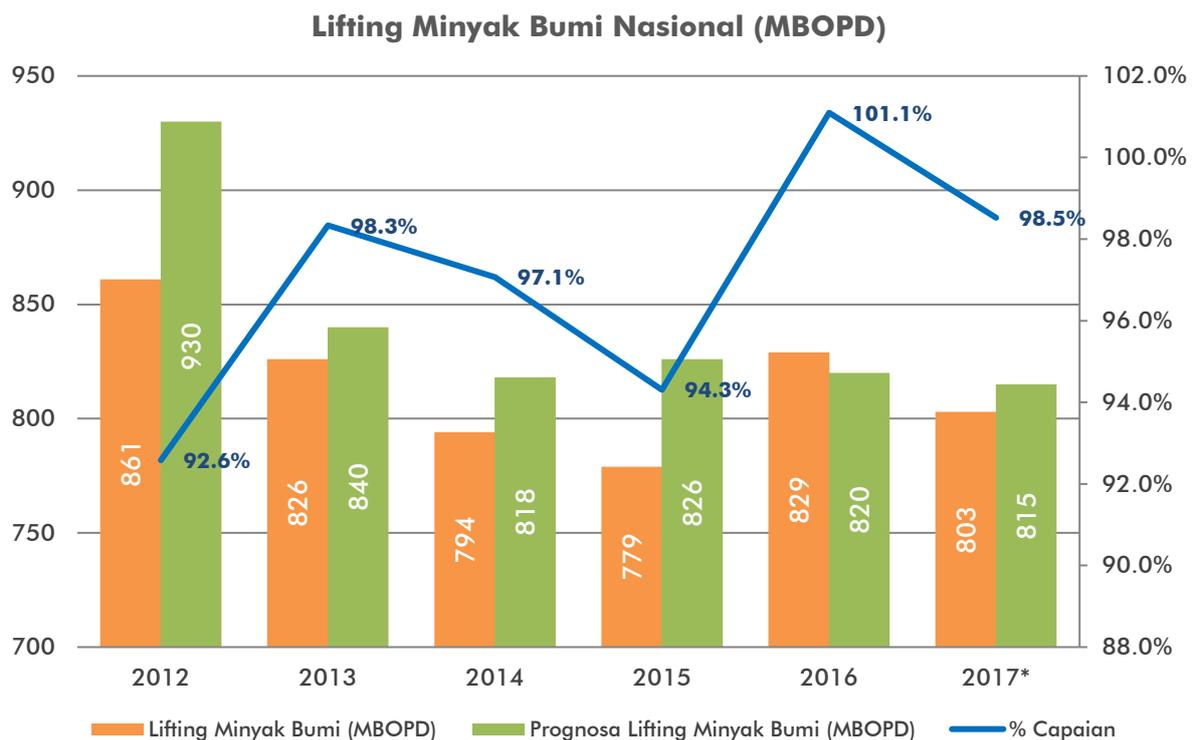
3.1.1.1 Lifting minyak bumi

Target lifting minyak bumi sesuai Perjanjian Kinerja Ditjen Migas tahun 2017 adalah sebesar 815 MBOPD. Target dimaksud berbeda dengan target yang sebelumnya dicantumkan dalam Rencana Strategis Ditjen Migas 2015-2019 sebesar 750 MBOPD dikarenakan angka APBN 2017 yang dijadikan referensi penentuan target PK 2017 berdasarkan angka yang diperoleh dari SKK Migas setelah proses *Work Program and Budget* (WPnB) oleh KKKS. Dengan demikian, target yang ditetapkan dalam PK 2017 lebih

update mengingat perhitungan yang digunakan dalam proyeksi menggunakan data terbaru dari tahun sebelumnya. Sehingga data-data lapangan baru dan data produksi terbaru dipertimbangkan dalam perhitungan target PK 2017. Ini tentu berbeda dengan target Renstra Ditjen Migas 2015-2019 yang ketika ditetapkan perhitungan yang digunakan masih menggunakan data pada masanya.

Pada dasarnya, realisasi lifting minyak diperoleh data SKK Migas yang diambil laporan A0 KKKS. Selanjutnya, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, penghitungan realisasi dana bagi hasil sumber daya alam migas dilakukan setiap triwulan melalui mekanisme rekonsiliasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Penghasil. Dalam aplikasinya di lapangan, Ditjen Migas melakukan rekonsiliasi lifting bersama Daerah Penghasil dan angka hasil rekonsiliasi tersebut disepakati oleh Ditjen Migas, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, SKK Migas, Daerah Penghasil, dan KKKS per triwulan.

Prosentase pencapaian lifting minyak bumi pada tahun 2017 apabila dibandingkan dengan prosentase pencapaian lifting minyak bumi nasional tahun 2012-2016 masih di atas rata-rata. Hal ini dikarenakan selama lima tahun terakhir, rata-rata pencapaian indikator kinerja lifting minyak bumi mencapai 97%.



*) Periode Januari 2016 – 31 Desember 2016 belum hasil rekonsiliasi

Diagram 9. Realisasi lifting minyak bumi 2012-2017.

Lifting minyak bumi nasional cenderung fluktuatif selama periode 2012-2017 namun demikian, capaian kinerja Ditjen Migas masih dapat mencapai lebih dari 90% dari target yang ditetapkan setiap tahunnya.

Berdasarkan data yang ada, rata-rata penurunan lifting minyak bumi selama tahun 2012-2017 mencapai angka 1.35%. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa meskipun

pada tahun 2016 terjadi peningkatan realisasi lifting minyak bumi sebesar 6.42% dibandingkan pada tahun 2015 akibat adanya pengembangan lapangan baru Banyu Urip, pada tahun 2017 realisasi lifting minyak bumi kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan dan mencapai 3.14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini menandakan bahwa perkembangan lifting minyak bumi di Indonesia membutuhkan pengembangan lapangan baru di Indonesia untuk dapat mengangkat angka produksi minyak bumi yang kian menurun setiap tahunnya.

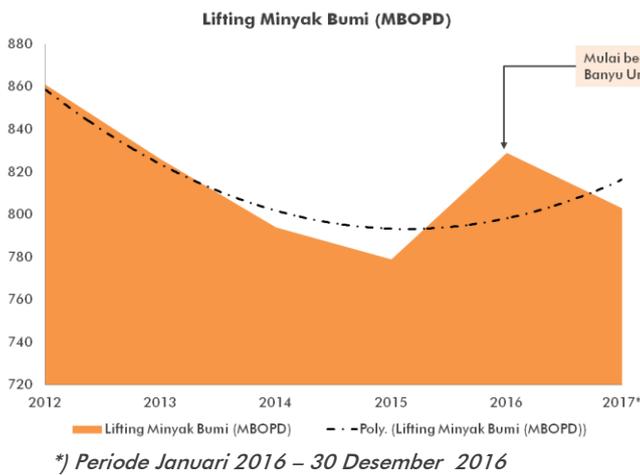


Diagram 10. Pengaruh beroperasinya Banyu Urip terhadap realisasi lifting minyak bumi 2012-2017. Terlihat bahwa Banyu Urip memiliki kontribusi besar terhadap lifting minyak bumi nasional

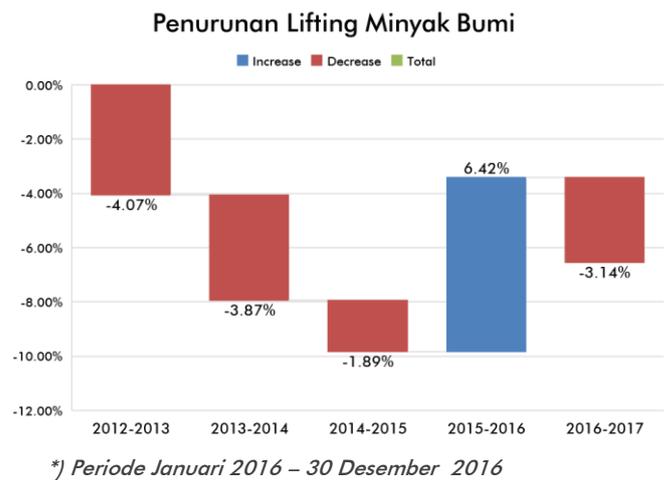


Diagram 11. Presentase penurunan lifting minyak bumi 2012-2017. Terlihat bahwa penurunan lifting minyak cenderung fluktuatif setiap tahunnya.

Penurunan lifting minyak bumi yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya dimaksud disebabkan oleh beberapa kendala dalam optimalisasi lifting migas. Kendala yang dialami dalam meningkatkan optimalisasi lifting minyak antara lain adalah kondisi penurunan alamiah sumur, faktor cuaca serta beberapa KKKS mengalami kepailitan.

3.1.1.2 Lifting gas bumi

Sama halnya dengan lifting minyak bumi, realisasi lifting gas diperoleh data SKK Migas yang diambil laporan A0 KKKS. Ditjen Migas melakukan rekonsiliasi lifting bersama Daerah Penghasil dan angka hasil rekonsiliasi tersebut disepakati oleh Ditjen Migas, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, SKK Migas, Daerah Penghasil, dan KKKS per triwulan. Namun demikian, sedikit mirip dengan minyak bumi, pencapaian lifting gas bumi dari tahun 2012-2017 cenderung fluktuatif dengan rerata pencapaian mencapai 98.4% selama periode dimaksud. Meskipun dibandingkan target Perjanjian Kinerja Ditjen Migas Tahun 2017, realisasi lifting Indonesia mencapai 99.1% dari target yang ditetapkan dan sedikit berada di atas rata-rata pencapaian realisasi lifting gas tahun 2012-2017, perlu digarisbawahi bahwa terjadi penurunan signifikan atas

realisasi lifting gas bumi selama tahun 2012-2017. Rerata penurunan lifting gas bumi selama periode dimaksud mencapai 1.86% per tahunnya. Meskipun rerata penurunan lifting gas bumi selama periode dimaksud dapat dikatakan relatif kecil, namun demikian perlu diperhatikan bahwa penurunan lifting gas bumi pada tahun 2017 cukup tinggi dan mencapai angka 4.04%.

Lifting Gas Bumi (MBOEPD)

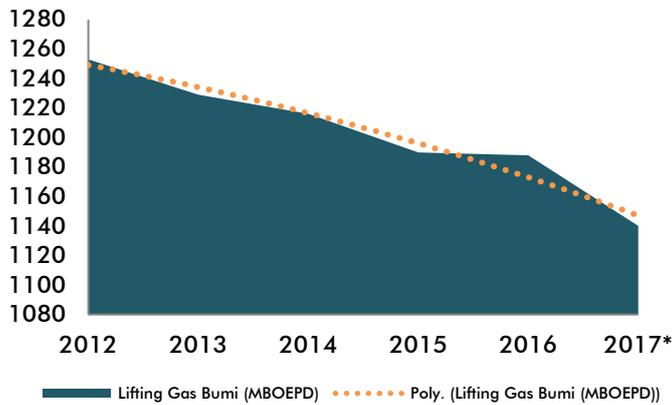


Diagram 12. realisasi lifting gas bumi 2012-2017. Terlihat bahwa lifting gas selama periode dimaksud rata-rata mengalami penurunan

Penurunan Lifting Gas Bumi

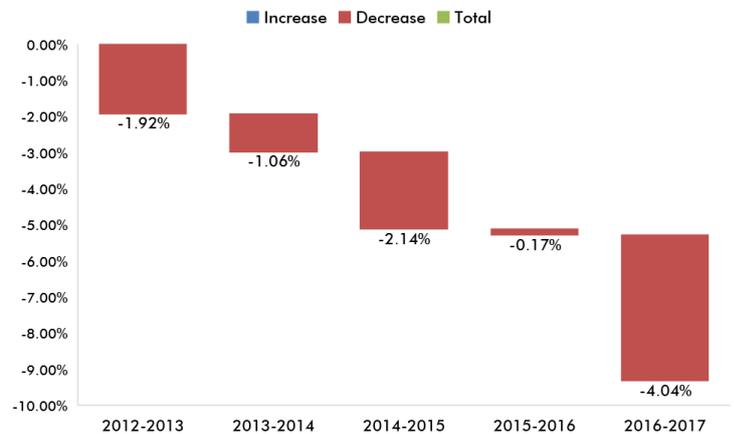
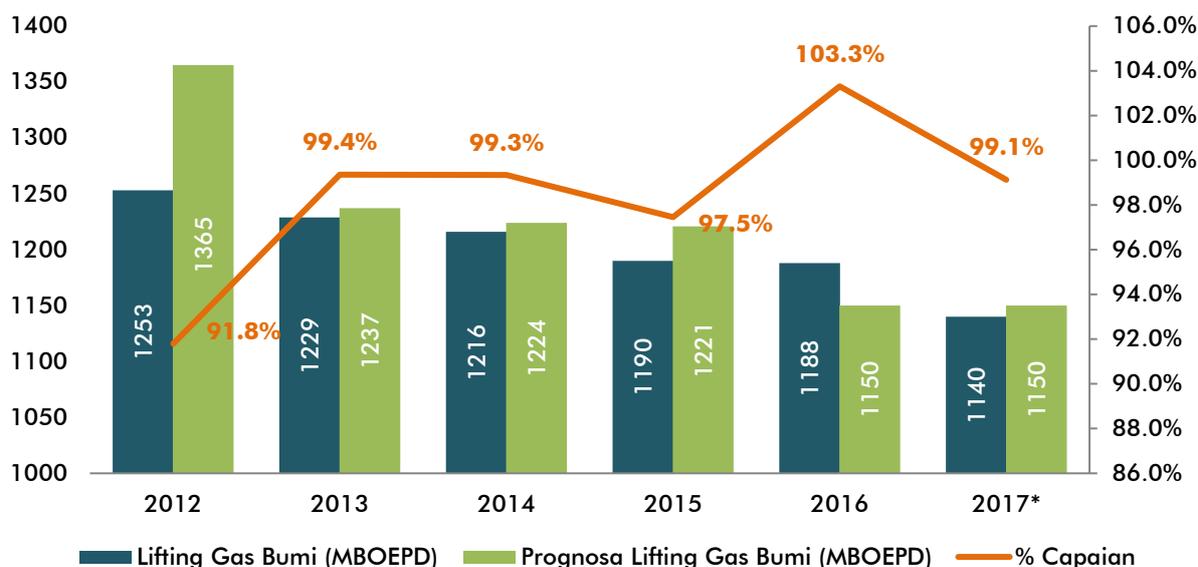


Diagram 13. penurunan lifting gas bumi 2012-2017. Penurunan lifting gas bumi terbesar terjadi pada tahun 2016-2017 yaitu sebesar 4.04%

Berdasarkan dari trend atau kecenderungan lifting gas bumi selama periode 2012-2017 yang mengalami penurunan dengan rerata fluktuatif, dapat dikatakan bahwa Indonesia masih harus menghadapi dan mengantisipasi penurunan lifting gas bumi yang dialami setiap tahunnya apabila tidak ada pengembangan lapangan gas baru. Terlebih lagi mengingat bahwa Pemerintah juga berupaya mendorong penggunaan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 tentang Energi.

Lifting Gas Bumi Nasional (MBOEPD)



**) Periode Januari 2016 – 31 Desember 2016 belum hasil rekonsiliasi*

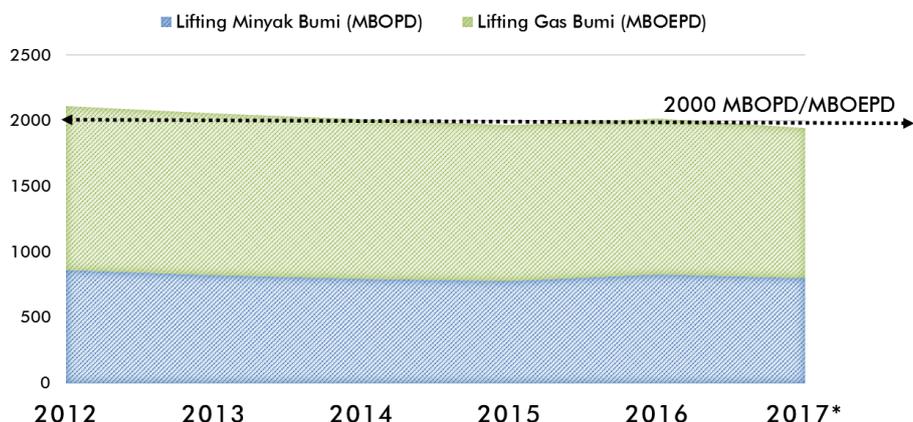
Diagram 14. Lifting gas bumi Nasional 2012-2017. Diagram ini menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian realisasi lifting dari target yang ditetapkan dalam PK mencapai lebih dari 91% selama periode dimaksud meskipun dapat dilihat bahwa pencapaian lifting gas bumi rata-rata mengalami penurunan.

Adapun kendala yang dialami dalam meningkatkan optimalisasi lifting gas selama tahun 2017 rata-rata dikarenakan penyerapan oleh PT PLN yang belum optimal serta kendala operasional seperti slugging air yang terproduksi dari sumur yang terjadi di dalam subsea pipeline serta kebocoran aliran minyak/gas.

Berdasarkan data sebagaimana disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pencapaian lifting migas 2017 belum dapat dikatakan maksimal meskipun memiliki pencapaian atas target yang tinggi. Hal ini dikarenakan meskipun dari aspek rerata pencapaian lifting migas tahun 2017 atas target Perjanjian Kinerja dikatakan cukup baik apabila dibandingkan dengan prosentase pencapaian lifting migas terhadap target Perjanjian Kinerja selama lima tahun terakhir, namun demikian, secara garis besar tahun 2017 realisasi lifting migas mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam pelaksanaan optimalisasi migas di masa depan, effort khusus perlu dikerahkan untuk mencapai target yang ditetapkan. Secara keseluruhan, selama lima tahun terakhir, lifting migas total yang mencapai lebih dari 2000 MBOEPD hanya terjadi pada tahun 2012, 2013, 2014, dan 2016. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2017, jumlah total lifting migas masih belum mencapai 2000 MBOEPD. Hal ini tentunya menjadi catatan dalam pelaksanaan optimalisasi lifting migas di tahun 2018 yang disebutkan dalam Detik Finance (2017) dalam situsnya, ditargetkan untuk mencapai 2 juta barel per hari. Terlebih lagi mengingat faktor kendala teknis di lapangan masih merupakan kendala utama yang mengganggu pencapaian realisasi lifting migas nasional di tahun 2017 atas target yang telah ditetapkan.

Lifting Migas Nasional 2012-2017 (MBOPD/MBOEPD)



**) Periode Januari 2016 – 30 Desember 2016*

Diagram 15. Lifting migas nasional 2012-2017. Diagram ini menunjukkan bahwa meskipun pada tahun 2012 lifting migas total mencapai lebih dari 2 juta BOEPD, akan tetapi di tahun 2017 lifting migas belum mencapai angka 2 juta BOEPD.

Selanjutnya, effort lebih juga dibutuhkan untuk mencegah agar penurunan lifting minyak dan gas bumi tidak melebihi batas sehingga tidak sesuai dengan rencana jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Ditjen Migas 2015-2019. Selama tahun 2015-2016, realisasi lifting minyak bumi masih berada dibawah target Renstra 2015-2019. Pada tahun 2017 realisasi lifting telah melebihi target Renstra 2015-2019 untuk tahun yang sama. Namun demikian, meskipun pada tahun 2017 realisasi lifting berhasil melebihi target jangka menengah, tidak berarti bahwa upaya lebih tidak diperlukan untuk menjaga realisasi agar tetap berada di atas target jangka menengah. Berdasarkan hasil proyeksi WP&B KKKS yang disusun bersama SKK Migas, apabila kinerja 2015-2017 dijadikan sebagai baseline, maka diprediksikan bahwa pada tahun 2019 realisasi lifting minyak bumi akan berada di range 722-850 MBOPD.

Realisasi Lifting Minyak Bumi Terhadap Target Rencana Strategis Ditjen Migas 2015-2019

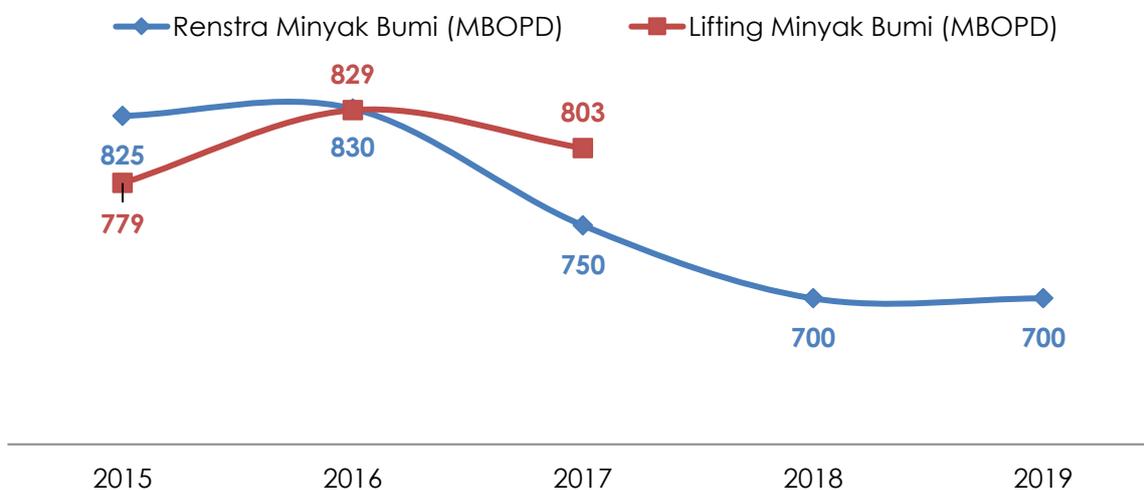


Diagram 16. Realisasi lifting minyak bumi terhadap target rencana strategis Ditjen Migas 2015-2019.

Diagram ini menunjukkan realisasi lifting minyak bumi terhadap target lifting minyak bumi dalam Renstra Ditjen Migas 2015-2019 cenderung fluktuatif. Meskipun pada tahun 2015 realisasi lifting berada di bawah target Renstra Ditjen Migas 2015-2019 namun demikian realisasi capaian pada tahun 2017 lebih besar dari target yang telah ditetapkan dalam rencana dimaksud.

Sama halnya dengan minyak bumi, upaya-upaya khusus perlu dilakukan untuk meningkatkan lifting gas bumi. Hal ini dikarenakan selama tiga tahun terakhir realisasi lifting tidak selalu melebihi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Ditjen Migas 2015-2019. Berdasarkan hasil proyeksi WP&B KKKS yang disusun bersama SKK Migas, apabila kinerja 2015-2017 dijadikan sebagai baseline, maka diprediksikan bahwa pada tahun 2019 realisasi lifting minyak bumi akan berada di range 1210-1300 MBOEPD.

Realisasi Lifting Gas Bumi Terhadap Target Rencana Strategis Ditjen Migas 2015-2019

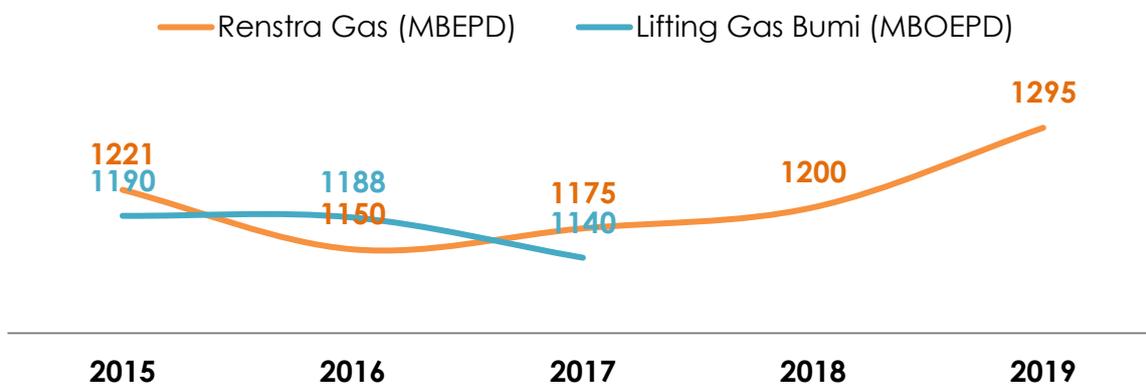


Diagram 17. Realisasi lifting gas bumi terhadap target rencana strategis Ditjen Migas 2015-2019. Diagram ini menunjukkan realisasi lifting gas bumi terhadap target lifting gas bumi dalam Renstra Ditjen Migas 2015-2019 cenderung fluktuatif. Meskipun pada tahun 2016 realisasi lifting sempat berada di atas target Renstra Ditjen Migas 2015-2019 namun demikian realisasi capaian pada tahun 2017 dan 2015 berada di bawah target yang telah ditetapkan dalam rencana dimaksud.

Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan di masa mendatang dalam meningkatkan optimalisasi lifting migas antara lain adalah:

Tabel 7. Kendala Pencapaian Target Lifting Migas dan Upaya Peningkatan Optimalisasi Lifting Migas

KENDALA PENCAPAIAN TARGET		UPAYA
Kondisi Global	Penurunan Harga Minyak Dunia	Efisiensi penggunaan biaya untuk menjaga keekonomian
Kendala Utama	Penundaan investasi	Pemberian insentif
	Natural decline rate yang tajam (sekitar 29%)	Menambah sumur pengembangan, work over, dan well service
	Kendala subsurface	Mengatasi masalah subsurface
	Kendala operasional	Meminimalkan gangguan operasi
	Kendala pembebasan lahan dan perijinan	Koordinasi lebih aktif dengan instansi terkait

KENDALA PENCAPAIAN TARGET		UPAYA
Kendala lainnya	Kendala pengadaan	Strategi pengadaan yang lebih baik
	Penyerapan buyer yang rendah	Mendorong penyelesaian masalah di midstream dan downstream
	Kendala pengelolaan WK terkait perpanjangan WK	Memberi kepastian pengelolaan WK, jauh sebelum masa waktu WK berakhir

3.1.2 Jumlah penandatanganan KKKS Migas

Pada tahun 2017, Ditjen Migas menetapkan target penandatanganan KKKS migas dalam Perjanjian Kinerja sebanyak 4 KKKS migas konvensional dan penandatanganan KKKS migas non konvensional mencapai 2 KKKS. Target penandatanganan ini ditentukan berdasarkan perhitungan yang mempertimbangkan harga minyak dunia, keterbatasan area yang mengandung potensi hidrokarbon, serta kondisi dimana area yang belum optimal di eksplorasi berada di daerah frontier dan laut dalam. Terkait dengan hal dimaksud, maka target dalam Perjanjian Kinerja berbeda dengan target Renstra 2015-2019 mengingat penetapan target Renstra dilakukan pada saat harga minyak dunia masih tinggi.

Tabel 8. Indikator Kinerja Utama Jumlah Penandatanganan KKKS Migas 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Presentase
2	Jumlah penandatanganan KKKS Migas				
	a. Konvensional	KKKS	4	0	0%
	b. Non konvensional	KKKS	2	0	0%

3.1.2.1 Penandatanganan KKS Migas Konvensional

Kegiatan usaha hulu migas nasional tidak terlepas dari kerangka regulasi pengaturan kepemilikan dan penguasaan negara atas sumber daya alam migas. Khusus mengenai pelaksanaan penyiapan, penetapan dan penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi di Indonesia, diterbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Dalam aturan tersebut, antara lain dinyatakan bahwa Menteri ESDM menetapkan kebijakan penyiapan, penetapan dan penawaran wilayah kerja migas berdasarkan aspek teknis, ekonomis, tingkat resiko, efisiensi dan berazaskan keterbukaan, keadilan, akuntabilitas dan persaingan usaha yang wajar.

Ditjen migas menyiapkan wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha (BU) dalam hal ini BUMN/BUMD/BU Swasta atau Bentuk Usaha Tetap (BU/BUT), yang berasal dari **wilayah terbuka**. Wilayah terbuka, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2008 adalah "bagian dari wilayah hukum pertambangan Indonesia yang belum ditetapkan sebagai wilayah kerja". Dalam hal ini, Wilayah terbuka diantaranya dapat berasal dari:

- Wilayah yang belum ditetapkan sebagai wilayah kerja

- Bagian wilayah kerja yang disisihkan berdasarkan Kontrak Kerja Sama;
- Wilayah Kerja yang berakhir Kontrak Kerja Samanya
- Bagian wilayah Kerja yang belum pernah dikembangkan dan/atau sedang atau pernah diproduksi yang disisihkan atas usul Kontraktor
- Bagian wilayah Kerja yang belum pernah dikembangkan dan/atau sedang atau pernah diproduksi yang disisihkan berdasarkan permintaan Menteri

Penawaran Wilayah Kerja dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) mekanisme, yang pertama **Lelang Reguler** dan kedua **Lelang Penawaran Langsung** melalui **Studi Bersama**. Pada umumnya, setiap tahunnya Direktorat Jenderal Migas menyelenggarakan Petroleum Bidding Round yang di jadwalkan secara periodik, idealnya di dalam satu tahun, ditawarkan 2 (dua) kali putaran lelang Wilayah Kerja Baru baik melalui lelang Reguler (durasi 4 bulan) maupun lelang Wilayah Kerja Penawaran Langsung (durasi 1,5 bulan) hal ini dimaksudkan dalam rangka antara lain:

- Menjamin keberlangsungan kegiatan eksplorasi yang berkesinambungan dalam usaha penemuan cadangan baru
- Penyiapan wilayah-wilayah kerja baru secara berkesinambungan untuk mendukung investasi bidang hulu.

Namun demikian, pada tahun 2017 Pemerintah hanya melaksanakan 1 (satu) kali Petroleum Bidding Round dengan jumlah penawaran sebanyak 10 (sepuluh) wilayah kerja migas konvensional yang terdiri dari 3 (tiga) wilayah kerja yang ditawarkan melalui lelang reguler dan 7 (tujuh) wilayah kerja yang ditawarkan melalui penawaran langsung. Wilayah kerja migas yang ditawarkan melalui lelang reguler tahun 2017 dimaksud adalah:

- 1) Blok Tongkol, Lepas Pantai Utara Provinsi Kepulauan Riau;
- 2) Blok East Tanimbar, Lepas Pantai Tenggara Kep. Tanimbar Provinsi Maluku;
- 3) Blok Mamberamo, Lepas Pantai Utara dan Daratan Provinsi Papua;

Sedangkan wilayah kerja migas yang ditawarkan melalui penawaran langsung tahun 2017 adalah:

- 1) Blok Andaman I, Lepas Pantai Utara Provinsi NAD;
- 2) Blok Andaman II, Lepas Pantai Utara Provinsi NAD;
- 3) Blok South Tuna, Lepas Pantai Utara Provinsi Kepulauan Riau;
- 4) Blok Merak-Lampung, Lepas Pantai Utara dan Daratan Provinsi Banten dan Lepas Pantai Tenggara Provinsi Lampung;
- 5) Blok Pekawai, Lepas Pantai Selatan dan Daratan Provinsi Kalimantan Timur;
- 6) Blok West Yamdena, Lepas Pantai Selatan dan Daratan Kep. Tanimbar Provinsi Maluku;
- 7) Blok Kasuri III, Daratan Provinsi Papua Barat.

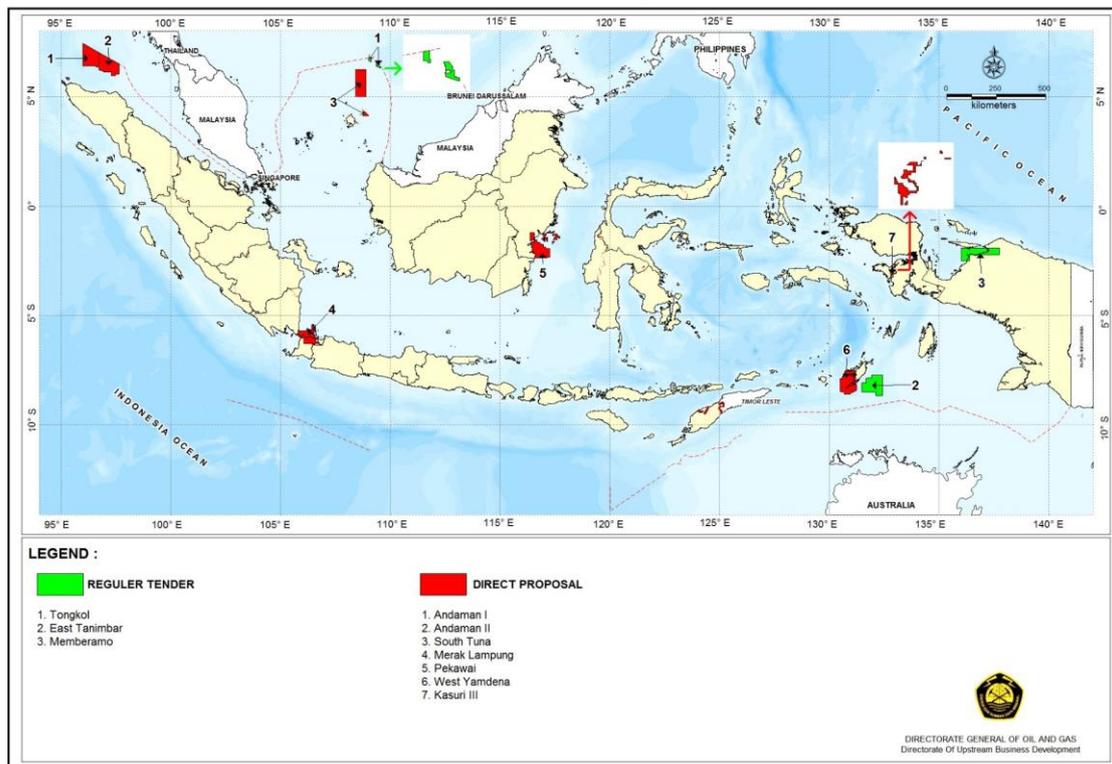


Diagram 18. Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2017

Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2017 merupakan penawaran WK dengan penerapan skema PSC Gross Split pertama kali sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2017 mengenai perubahan atas Permen 8 Tahun 2017 tentang PSC Gross Split. Seluruh WK memiliki bagi hasil (base split) yang sama yaitu 57:43 untuk minyak bumi dan 52:48 untuk gas bumi. Split tersebut dapat disesuaikan terhadap komponen variabel yang ditentukan pada saat pengembangan lapangan serta disesuaikan terhadap komponen progresif yang ditentukan pada masa produksi. Melalui penerapan skema PSC Gross Split diharapkan dapat mendorong kegiatan Eksplorasi dan Produksi lebih efektif dan cepat, mendorong para kontraktor Migas dan Industri Penunjang Migas untuk lebih efisien, mendorong proses bisnis Kontraktor Hulu Migas (KKKS) dan SKK Migas menjadi lebih sederhana dan akuntabel, dan mendorong KKKS untuk mengelola biaya operasi dan investasinya dengan berpijak kepada sistem keuangan korporasi bukan sistem keuangan negara.

Dikarenakan Permen ESDM Nomor 52 Tahun 2017 terbit pada saat Penawaran WK telah diumumkan, Pemerintah memberikan waktu tambahan kepada calon peserta lelang untuk mempelajari konsep PSC Gross Split dan menyampaikan dokumen partisipasi sampai dengan 29 Desember 2017. Evaluasi terhadap dokumen penawaran yang masuk akan dilaksanakan setelah tanggal 29 Desember 2017. Hasil penawaran wilayah kerja migas konvensional tahun 2017 rencananya akan diumumkan pada bulan Mei 2018 sehingga tidak terdapat penandatanganan KKS dari Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2017.

Pada tanggal 31 Januari 2018 Pemerintah menetapkan pemenang Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 9. Penetapan Pemenang Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2017

No	Blok	Pemenang Lelang
Penawaran Langsung		
1	Andaman I	Mubadala Petroleum (SE Asia) Ltd
2	Andaman II	Konsorsium Premier Oil Far East Limited-KrissEnergy (Andaman II) BV-Mubadala Petroleum (Andaman II JSA) Ltd.
3	Kasuri III	-
4	Merak-Lampung	PT. Tansri Madjid Energy
5	Pekawai	PT. Saka Energi Sepinggan
6	South Tuna	-
7	West Yamdena	PT. Saka Energi Indonesia
Lelang Reguler		
1	East Tanimbar	-
2	Memberamo	-
3	Tongkol	-

Selanjutnya, pemenang lelang akan menyampaikan surat kesanggupan untuk memenuhi seluruh komitmen dalam Dokumen Partisipasi termasuk persetujuan konsep Kontrak Kerja Sama serta melampirkan jaminan pelaksanaan. Diharapkan seluruh pemenang lelang yang telah ditetapkan tersebut dapat melanjutkan ke tahapan penandatanganan KKS bersama Menteri ESDM dan SKK Migas.

Sementara untuk hasil Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2016, pemenang Lelang Reguler Wilayah Oti yaitu Azipac Ltd. mengundurkan diri. Penyebab Azipac Ltd. mengundurkan diri adalah karena Azipac Ltd. membutuhkan mitra dalam pelaksanaan KKS skema *Gross Split*. Permintaan penyertaan mitra tersebut tidak dapat disetujui pemerintah karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan. Adapun hasil Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2016 selengkapnya adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2016

Mekanisme Lelang	Nama WK	Hasil Lelang
Penawaran Langsung	1. Blok Bukit Barat, Offshore Kepulauan Riau	tidak ada dokumen partisipasi yang diterima oleh Ditjen Migas
	2. Blok Batu Gajah Dua, Onshore Jambi	Peserta yang memasukkan dokumen partisipasi tidak memenuhi persyaratan minimum

Mekanisme Lelang	Nama WK	Hasil Lelang
	3. Blok Kasongan Sampit, Onshore Kalimantan Tengah	tidak ada dokumen partisipasi yang diterima oleh Ditjen Migas
	4. Blok Ampuh, Offshore Jawa Timur	tidak ada dokumen partisipasi yang diterima oleh Ditjen Migas
	5. Blok Ebuny, Offshore Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah	Peserta yang memasukkan dokumen partisipasi tidak memenuhi persyaratan minimum
	6. Blok Onin, Offshore dan Onshore Papua Barat	Peserta yang memasukkan dokumen partisipasi tidak memenuhi persyaratan minimum
	7. Blok West Kaimana, Offshore dan Onshore Papua Barat	Peserta yang memasukkan dokumen partisipasi tidak memenuhi persyaratan minimum
Lelang Reguler	1. Blok South CPP, Onshore Riau	tidak ada dokumen partisipasi yang diterima oleh Ditjen Migas
	2. Blok Oti, Offshore Kalimantan Timur	Pemenang lelang mengundurkan diri
	3. Blok Suremana I, Offshore Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah	tidak ada dokumen partisipasi yang diterima oleh Ditjen Migas
	4. Blok Manakarra Mamuju, Offshore Sulawesi Barat	Peserta yang memasukkan dokumen partisipasi tidak memenuhi persyaratan minimum
	5. Blok South East Mandar, Offshore Sulawesi Selatan	tidak ada dokumen partisipasi yang diterima oleh Ditjen Migas
	6. Blok North Arguni, Onshore Papua Barat	tidak ada dokumen partisipasi yang diterima oleh Ditjen Migas
	7. Blok Kasuri II, Onshore Papua Barat	Peserta yang memasukkan dokumen partisipasi tidak memenuhi persyaratan minimum

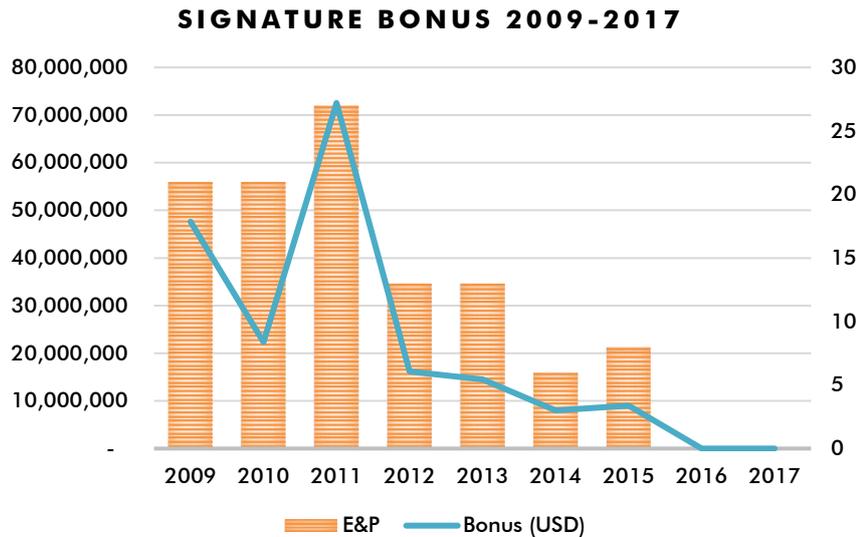
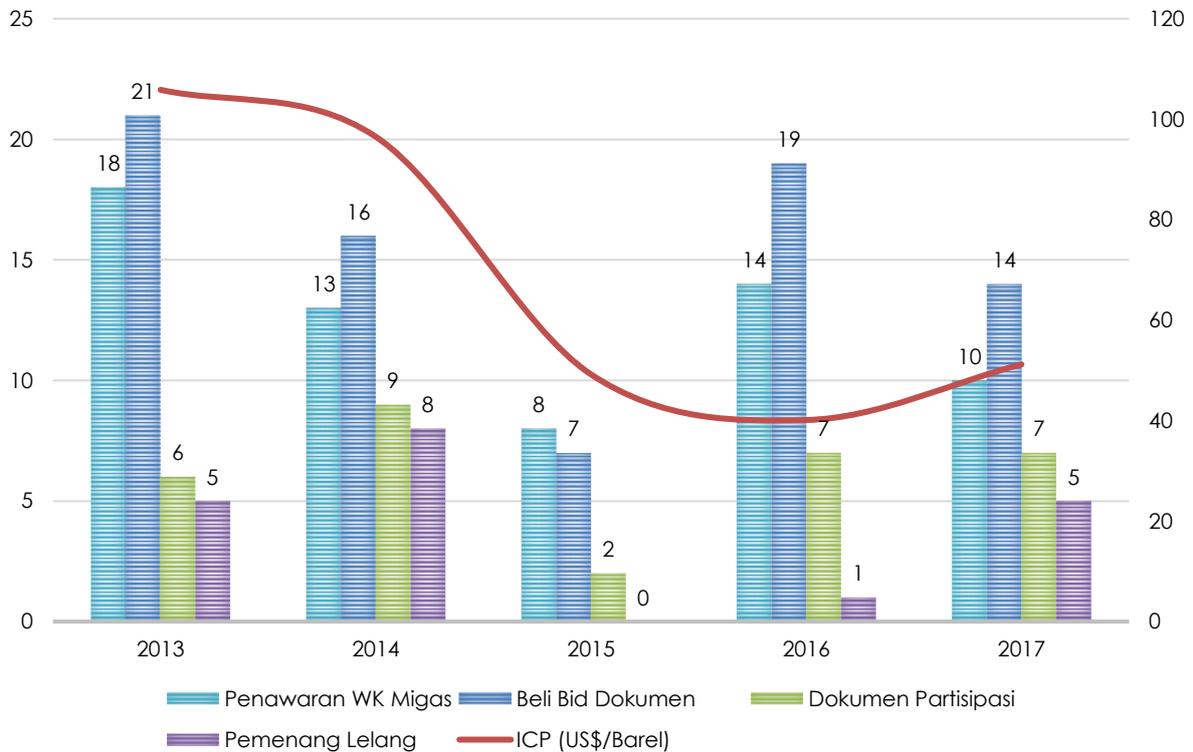


Diagram 19. Signature Bonus 2009-2017. Diagram ini memperlihatkan bahwa penurunan *signature bonus* terjadi selama periode 2011-2017 seiring dengan jumlah penandatanganan KKKS yang menurun selama periode dimaksud

Pencapaian realisasi penandatanganan KKS migas konvensional tidak mencapai target capaiannya sebagaimana tercantum dalam Renstra Ditjen Migas 2015-2019 yaitu 6 atau terealisasi sebesar 0%. Realisasi ini sama jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang juga sebesar 0. Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, terjadi penurunan realisasi akibat faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang dimaksud adalah turunnya harga minyak mentah dunia yang ikut mempengaruhi keputusan investor untuk berpartisipasi pada Penawaran WK Migas Konvensional. Hal ini tercermin pada beberapa pelaksana Studi Bersama yang mengajukan permohonan penundaan lelang wilayah yang telah dilakukan Studi Bersama. Faktor internal yang dimaksud adalah peraturan perpajakan di bidang hulu migas dan faktor terms & conditions yang dinilai kurang menarik. Untuk itu, Pemerintah telah merevisi PP 79 Tahun 2010 melalui PP Nomor 27 Tahun 2017 agar sistem perpajakan sektor hulu migas menjadi lebih menarik bagi investor.

Jumlah KKKS Yang Membeli Bid Dokumen, Menyerahkan Dokumen Partisipasi, Dan Jumlah Pemenang Lelang Pada Penawaran WK Migas Konvensional



Keterangan:

- Pada tahun 2016, Azipac Ltd dinyatakan sebagai pemenang lelang tetapi mengundurkan diri sehingga tidak terjadi penandatanganan KKS di tahun 2016.
- Data tahun 2013 jumlah pemenang lelang masih termasuk PT. Innovare Gas yang dibatalkan oleh Pemerintah statusnya sebagai pemenang lelang
- Perlu dicatat bahwa pemenang lelang yang telah ditetapkan di tahun anggaran dimaksud belum tentu memiliki jadwal penandatanganan KKKS di tahun yang sama.

Diagram 20. Jumlah KKKS Yang Membeli Bid Dokumen, Menyerahkan Dokumen Partisipasi, Dan Jumlah Pemenang Lelang Pada Penawaran WK Migas Konvensional. Diagram di atas secara garis besar menjelaskan bahwa jumlah pemenang lelang elastis terhadap pergerakan harga ICP mengingat jumlah pemenang lelang di tahun anggaran bersangkutan mengikuti dinamika kurva harga ICP. Antusiasme KKKS dalam mengikuti proses lelang hingga dinyatakan sebagai pemenang lelang cukup tinggi ketika harga ICP cenderung tinggi dan ketika adanya kepastian hukum yang mendukung.

Selanjutnya, hasil Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2016 menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan terms & conditions yang lebih menarik untuk WK Migas yang akan dilelang pada tahun 2017 sehingga dapat menarik minat investor untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi di Indonesia. Upaya Pemerintah dalam menyusun terms & conditions yang lebih menarik diantaranya:

1. Menurunkan besaran signature bonus.
2. Mengurangi nilai komitmen pasti 3 tahun pertama dengan mengurangi luasan area yang disurvei, tidak mempersyaratkan sumur eksplorasi pada cekungan frontier dan

laut dalam, wilayah dengan keterbatasan data subsurface, dan wilayah dengan risiko geologi high risk.

Selain dari segi penandatanganan KKKS baru, beberapa kendala juga terjadi dalam pelaksanaan penawaran wilayah kerja migas. Kendala-kendala eksternal yang tak kalah pentingnya adalah disebabkan karena adanya tumpang tindih lahan dengan kawasan kehutanan, permukiman, dan infrastruktur. Selain itu, faktor lainnya adalah arah kegiatan eksplorasi migas saat ini adalah "*shifting from west to east*" di mana karakteristik eksplorasi migas di Indonesia bagian Timur identik dengan konsep *deep water, frontier area* dimana dalam pengusahaannya membutuhkan modal, teknologi, dan resiko yang lebih besar daripada di daerah Barat, sementara ketersediaan data pada daerah Timur masih relatif terbatas.

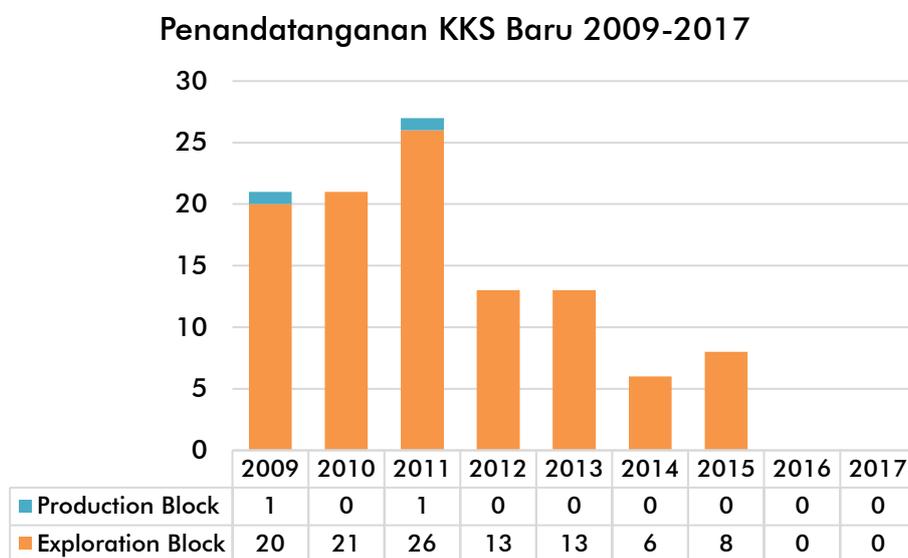


Diagram 21. Penandatanganan KKS Baru 2009-2017. Terlihat bahwa selama tahun 2010-2017 penandatanganan KKS baru blok produksi hanya terjadi pada tahun 2009 dan 2011.

Dalam rangka mencapai target, Ditjen Migas senantiasa memperbaiki prosedur kerja, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dan sumber daya manusia, menyusun regulasi yang dapat menarik minat investasi serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya. Khusus untuk peningkatan akuntabilitas dan efektivitas kegiatan penawaran WK Migas, sejak tahun 2016 telah dimulai penerapan Penawaran WK Migas melalui elektronik yaitu e-lelang yang saat ini diterapkan mulai dari Pengumuman s.d. Forum Klarifikasi. Selain itu, Ditjen Migas juga telah menyiapkan aplikasi Sistem Informasi Studi Bersama yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan Studi Bersama. Sistem ini rencananya akan diterapkan pada tahun 2018. Terkait dengan regulasi, saat ini Ditjen Migas telah menyiapkan konsep revisi Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran WK Migas dan revisi Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Survei Umum dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas.

3.1.2.2 Penandatanganan KKS Migas Non Konvensional

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Migas Tahun Anggaran 2017, Ditjen Migas diharapkan dapat mengoptimalkan penyediaan energi fosil dengan indikator kinerja meliputi lifting Migas, jumlah penandatanganan KKS Migas baik Konvensional maupun Non Konvensional serta cadangan Migas.

Sehubungan dengan sasaran tersebut di atas, Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas Tahun 2017 mendapat peran dalam menyelenggarakan kegiatan penawaran wilayah kerja baru migas. Output dari kegiatan tersebut adalah Penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) Wilayah Kerja Migas Non Konvensional dengan target 2 KKS.

Untuk Penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional (WK MNK) pada tahun 2017, dengan mekanisme sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 05 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Non Konvensional dan dengan Bentuk Kontrak Kerja Sama sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No 08 tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, ditawarkan 2 Wilayah Kerja Migas Non Konvensional (Shale Hydrocarbon) dan 1 Wilayah Kerja Gas Metana Batubara (GMB) melalui Penawaran Langsung serta 2 Wilayah Kerja Gas Metana Batubara melalui Lelang Reguler sebanyak, yaitu :

Tabel 11. Penawaran WK Migas Non Konvensional tahun 2017

No.	Wilayah Kerja	Provinsi
1.	MNK Jambi I	Jambi
2.	MNK Jambi II	Jambi
3.	GMB West Air Komerling	Sumatera Selatan
4.	GMB Bungamas	Sumatera Selatan
5.	GMB Raja	Sumatera Selatan

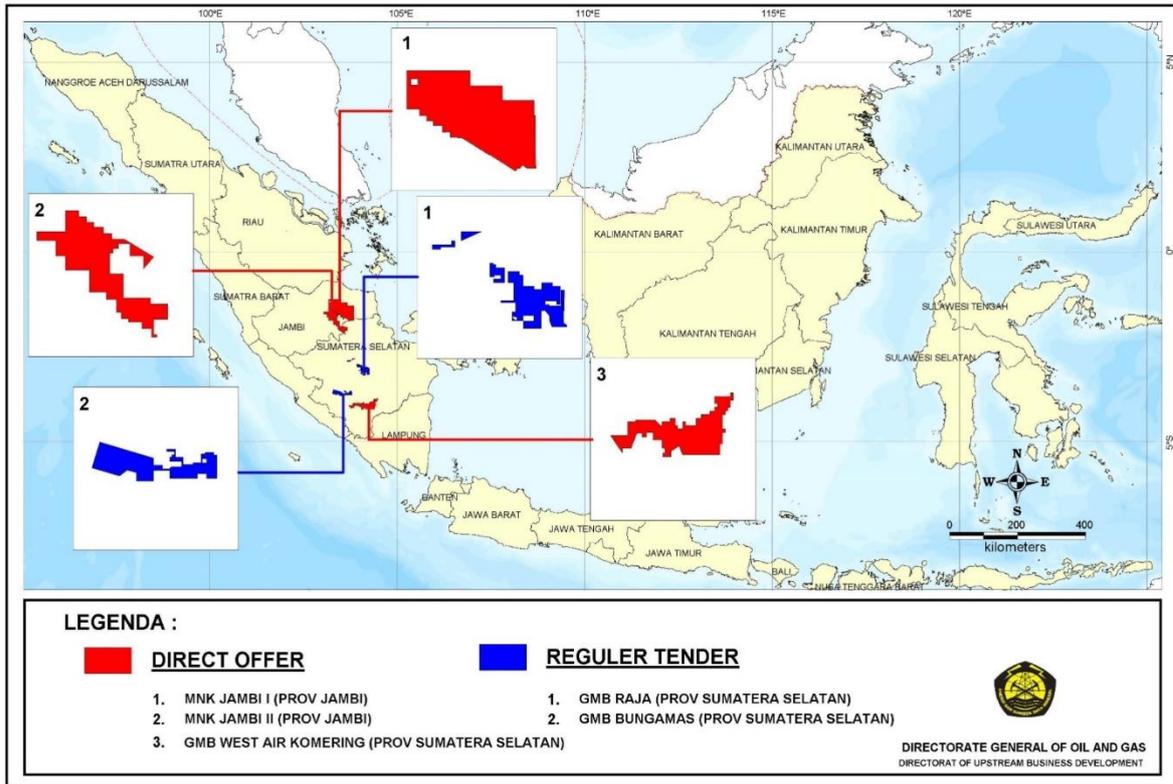


Diagram 22. Peta Penawaran Langsung WK Migas Non Konvensional 2017.

Penawaran WK Migas Non Konvensional tersebut diumumkan pada hari terakhir acara 41st Indonesian Petroleum Association Convention & Exhibition tanggal 19 Mei 2017 di Jakarta Convention Center dengan jadwal lelang sebagai berikut :

Tabel 12. Jadwal Penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional 2017

	Penawaran Langsung	Lelang Reguler
Akses Dokumen Lelang	29 Mei–7 Juli 2017	29 Mei–20 Sept 2017
Forum Klarifikasi	29 Mei–12 Juli 2017	29 Mei–25 Sept 2017
Pemasukan Dokumen Partisipasi	29 Mei–12 Juli 2017	29 Mei–25 Sept 2017

PENAWARAN DAN PENANDATANGANAN WK MIGAS NON KONVENSIONAL

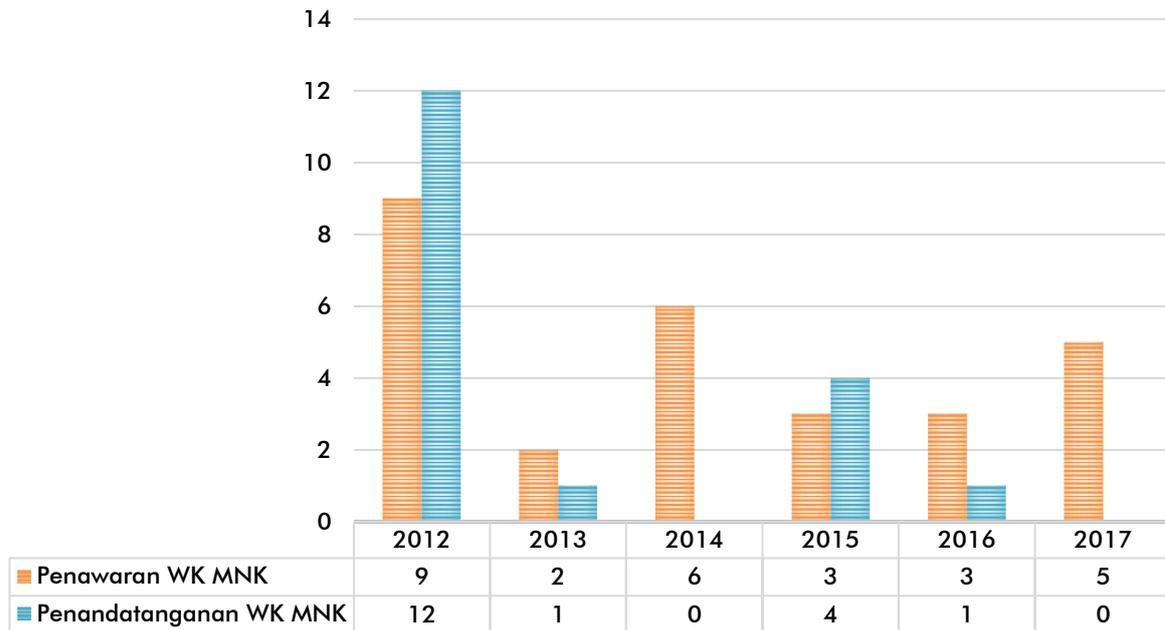
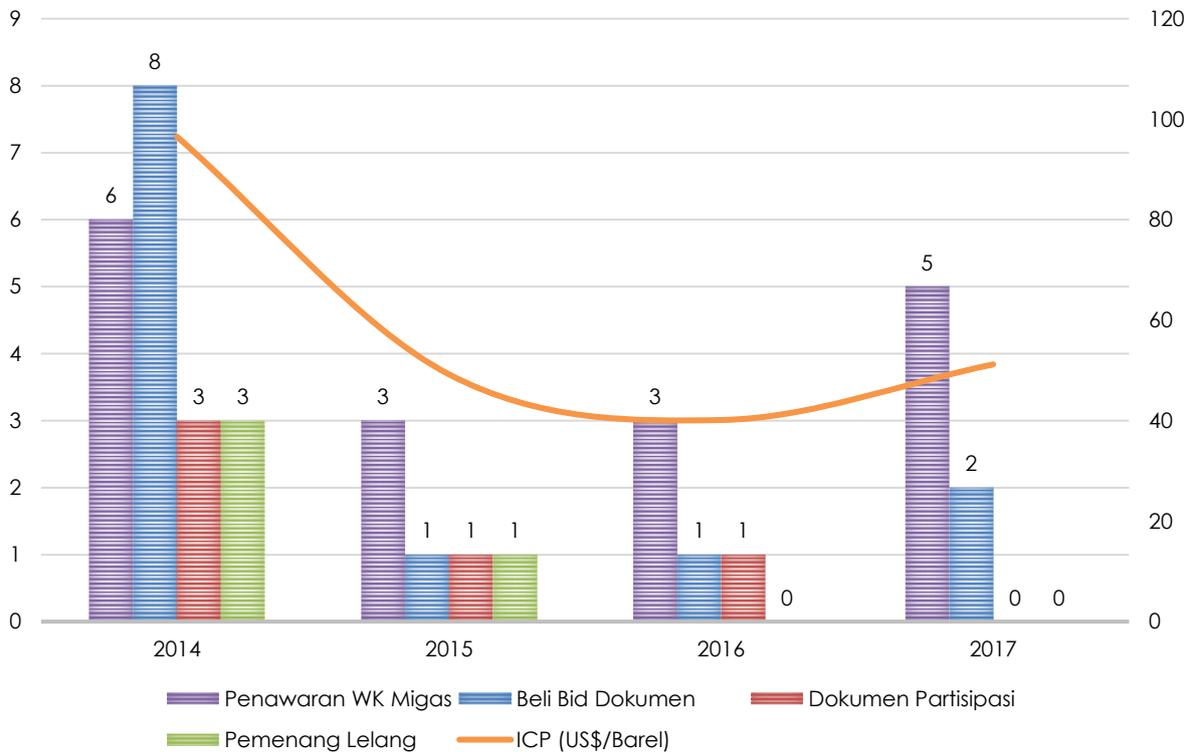


Diagram 23. Statistik Penawaran dan Penandatanganan WK Migas Non Konvensional.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, untuk penawaran wilayah kerja cenderung konstan, namun untuk penandatanganan Kontrak Kerja Sama WK Migas Non Konvensional cenderung menurun. Hal tersebut salah satunya adalah dikarenakan oleh turunnya harga minyak bumi dunia sejak 2012. Selain itu, dari faktor teknis, Migas Non Konvensional Indonesia belum terbukti dapat diproduksi secara ekonomis.

Jumlah KKKS Yang Membeli Bid Dokumen, Menyerahkan Dokumen Partisipasi, Dan Jumlah Pemenang Lelang Pada Penawaran WK Migas Non Konvensional



Keterangan:

- Perlu dicatat bahwa pemenang lelang yang telah ditetapkan di tahun anggaran dimaksud belum tentu memiliki jadwa penandatanganan KKKS di tahun yang sama.

Diagram 24. Penawaran WK Migas Non Konvensional. Diagram di atas menjelaskan bahwa jumlah pemenang lelang sebagai keluaran dari proses lelang dipengaruhi oleh harga minyak dunia yang dinamis. Antusiasme KKKS dalam mengikuti lelang wilayah kerja migas non konvensional cukup tinggi ketika harga ICP mencapai harga yang tinggi.

A. Kegiatan Penunjang Program Penandatanganan KKS Migas Non Konvensional

a) *Breakfast Meeting with Minister of Energy and Mineral Resources*

Dalam rangka Mensukseskan Penawaran Wilayah Kerja tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Jumat 7 Juli 2017 di Kantor Kementerian ESDM telah melakukan pertemuan langsung dengan para *Chief Executive Officer* (CEO) Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas untuk mempromosikan 15 Wilayah Kerja (WK) Migas yang dilelang di tahun 2017. Acara yang digelar bertajuk *Breakfast Meeting with Minister of Energy and Mineral Resources with a discussion on Indonesia Petroleum Bidding Round 2017*.

Pada sesi diskusi yang berlangsung dalam suasana penuh keterbukaan, pertanyaan yang mengemuka, antara lain berkaitan dengan daya tarik skema *Gross Split* yang akan diterapkan pada WK migas yang ditawarkan tersebut.

Menjawab pertanyaan tersebut, Menteri menegaskan bahwa proses lelang WK migas kali ini dirancang agar tetap menarik di tengah lesunya harga minyak

b) Memperpanjang Waktu Penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional

Selain hal tersebut, untuk meningkatkan keberhasilan dalam penawaran wilayah kerja tahun ini, Pemerintah telah memperpanjang jadwal lelang Wilayah Kerja sesuai Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 9204/13/DJM.E/2017 tanggal 18 September 2017 dan Surat Nomor 12000/13/DJM.E/2017 tanggal 24 November 2017 dengan jadwal sebagai berikut :

Tabel 13. Revisi Jadwal Lelang Reguler dan Penawaran Langsung WK Migas Non Konvensional

	Penawaran Langsung	Lelang Reguler
Akses Dokumen Lelang	29 Mei–22 Desember 2017	29 Mei–22 Desember 2017
Forum Klarifikasi	29 Mei–22 Desember 2017	29 Mei–22 Desember 2017
Pemasukan Dokumen Partisipasi	29 Mei–29 Desember 2017	29 Mei–29 Desember 2017

Penambahan Jadwal tersebut bertujuan untuk memberikan waktu yang cukup bagi calon peserta lelang Wilayah Kerja Migas Tahun 2017 untuk mempelajari konsep *PSC Gross Split* terkait dengan Perubahan Permen ESDM No. 08 tahun 2017 yaitu Peraturan Menteri No. 52 tahun 2017 serta Regulasi terkait Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Hulu Migas dengan Menggunakan *Gross Split*.

Tabel 14. Revisi Jadwal Lelang Reguler dan Penawaran Langsung WK Migas Non Konvensional

No	Blok	Pembeli Dokumen Lelang	Keterangan
1	MNK Jambi I	PT. Pertamina (Persero)	Tidak mengembalikan dokumen partisipasi dan mengajukan permohonan penundaan masa lelang untuk melakukan riset potensi
2	MNK Jambi II	PT. Pertamina (Persero)	
3	GMB West Air Komerling	-	Tidak terdapat BU/BUT yang mengakses Bid Document
4	GMB Raja	-	
5	GMB Bungamas	-	

Dari hasil tersebut diatas, Beberapa penyebab dari ketidakberhasilan penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional, antara lain:

1. Kondisi Pasar yang kurang mendukung dikarenakan harga minyak yang belum membaik
2. Belum terbuktinya migas non konvensional di Indonesia dapat diusahakan secara ekonomis

3.1.3 Cadangan minyak dan gas bumi

Definisi cadangan migas yang selama ini banyak dianut oleh masyarakat umum sebagaimana disebutkan oleh Society of Petroleum Engineers dalam website resminya adalah "*those quantities of petroleum which are anticipated to be commercially recovered from known accumulations from a given date forward*" yang berarti adalah jumlah volume migas yang diketahui akumulasinya dan dapat diproduksi secara komersial pada suatu masa. Berdasarkan derajat ketidakpastiannya, cadangan migas dibedakan menjadi cadangan terbukti (*proven reserves*), cadangan mungkin (*probable reserves*) dan cadangan harapan (*possible reserves*) dimana derajat kepastian tinggi dimiliki oleh cadangan terbukti, derajat kepastian terendah dimiliki oleh cadangan derajat, dan cadangan mungkin memiliki derajat kepastian diantara cadangan terbukti dan cadangan harapan (Djatmiko, 2003).

Tabel 15. Indikator Utama Cadangan Migas 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Presentase
3	Cadangan minyak dan gas bumi				
	a. Cadangan minyak bumi	MMSTB	6714	7534	112%
	b. Cadangan gas bumi	TCF	146	143	97.9%

3.1.3.1 Cadangan minyak bumi

Di Indonesia, kategori cadangan yang diukur sebagai indikator kinerja Pemerintah, atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi merupakan cadangan yang terdiri dari cadangan terbukti, cadangan mungkin, dan cadangan harapan secara total. Terkait dengan hal tersebut pada tahun 2017, target cadangan migas yang ditetapkan adalah sebesar 6714 MMSTB untuk minyak dan 146 TCF untuk gas bumi. Adapun pada tahun yang sama, capaian cadangan migas mencapai 7534 MMSTB untuk minyak dan 143 TCF untuk capaian cadangan gas bumi. Ini menjadikan capaian indikator cadangan migas mencapai angka sebesar 112% untuk minyak bumi dan 97.9% untuk gas bumi.

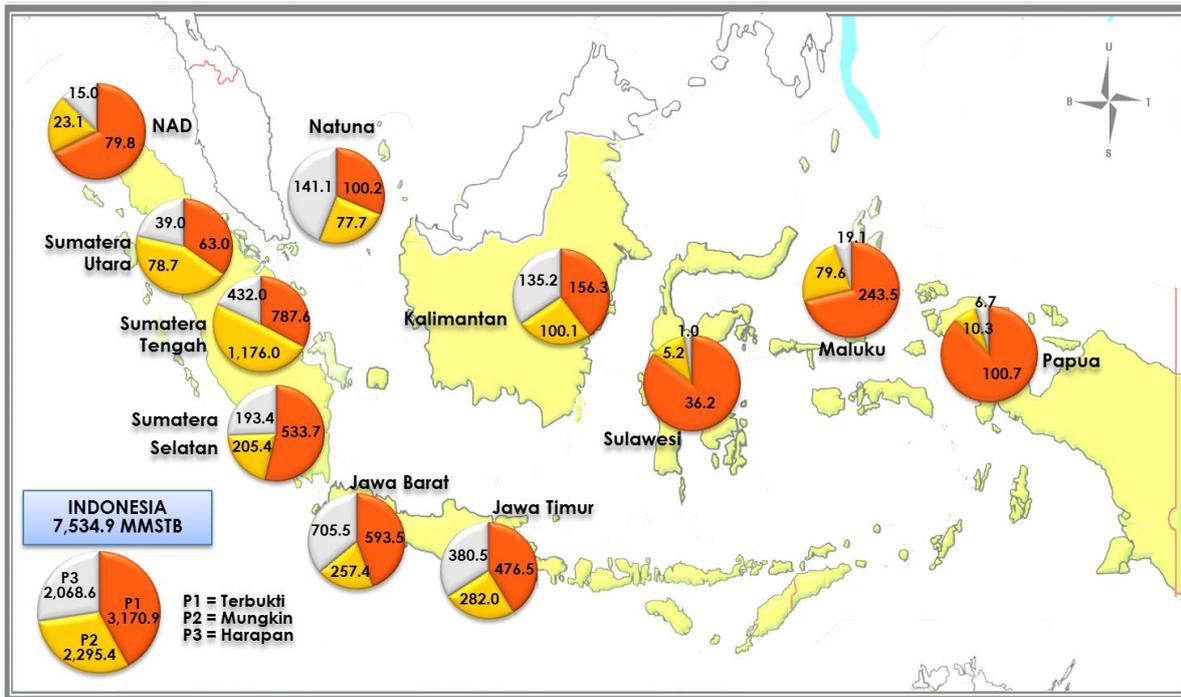


Diagram 25. Peta Cadangan Minyak Bumi Status 1 Januari 2017.

Prestasi pencapaian cadangan minyak bumi di tahun 2017 dapat dikatakan cukup membanggakan. Secara teoritis, kenaikan prosentase pencapaian cadangan migas pada tahun tertentu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya belum tentu menggambarkan kenaikan volume cadangan minyak bumi di tahun anggaran terkait mengingat prosentase pencapaian kinerja juga ditentukan oleh angka target yang ditetapkan dalam perencanaan sebelumnya. Dari segi prosentase capaian, selama lima tahun terakhir, pencapaian cadangan minyak bumi dapat dikatakan cenderung baik mengingat presentase yang diperoleh seluruhnya mencapai lebih dari 100%. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2017, baik dari segi volume maupun presentase capaian, pencapaian kinerja Pemerintah atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Migas mencapai angka tertinggi dibandingkan pencapaian cadangan minyak bumi selama lima tahun terakhir, dan lebih tinggi sebesar 3.9% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menjadikan tahun 2017 menjadi tahun yang menonjol dalam hal pencapaian indikator kinerja cadangan minyak bumi.

CAPAIAN INDIKATOR CADANGAN MINYAK BUMI 2013-2017

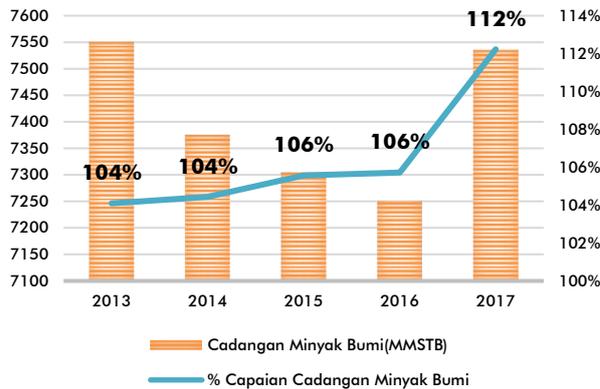


Diagram 26. Capaian indikator cadangan minyak bumi. Terlihat bahwa capaian realisasi cadangan minyak bumi cenderung lebih besar dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja selama tahun 2013-2017

CADANGAN MINYAK BUMI (MMSTB)

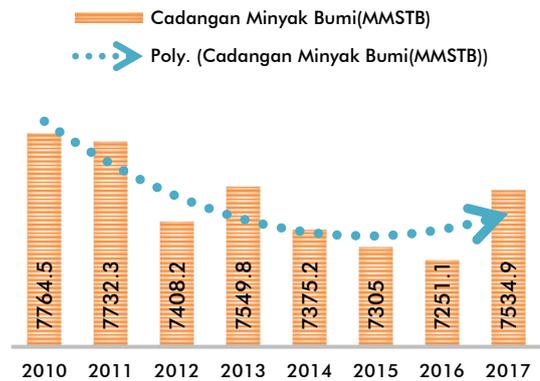


Diagram 27. Diagram penurunan cadangan minyak bumi. Diagram ini memperlihatkan terdapat indikasi kecenderungan penurunan cadangan minyak selama 2010-2016 meskipun tahun 2017 terjadi peningkatan.

3.1.3.2 Cadangan gas bumi

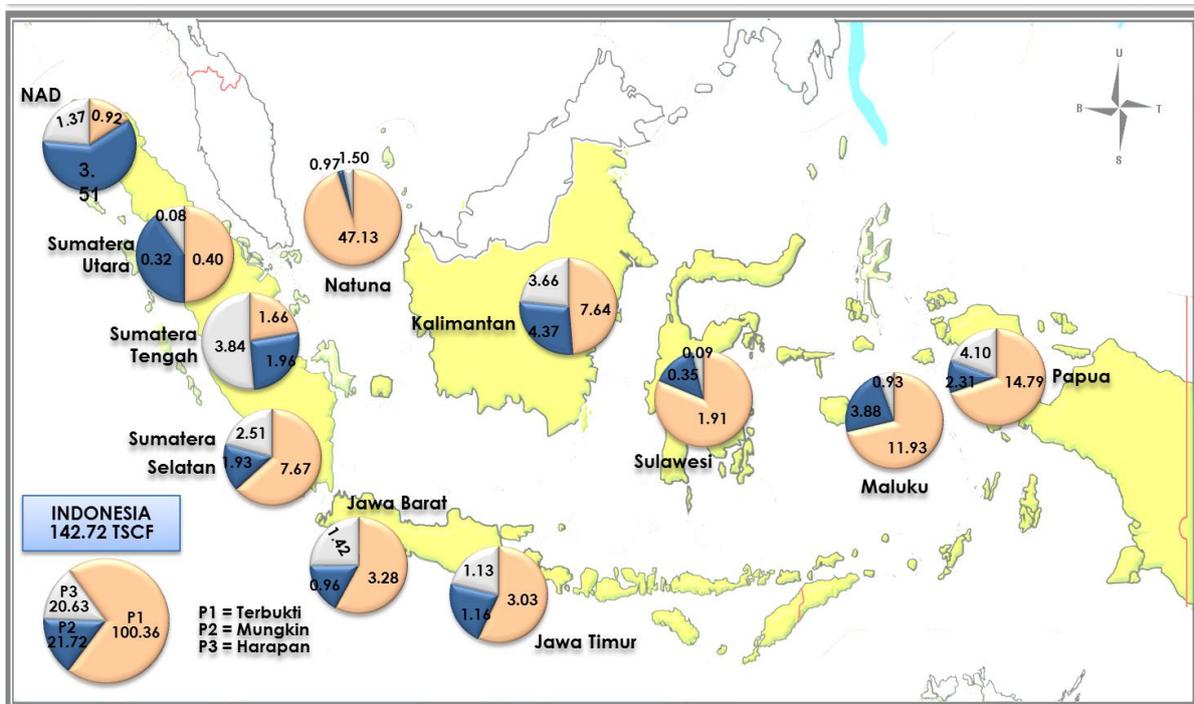


Diagram 28. Peta Cadangan Gas Bumi Status 1 Januari 2017

Namun demikian, berbeda dengan indikator cadangan minyak bumi, presentase capaian indikator gas bumi pada tahun 2017 dapat dikatakan kurang maksimal. Bahkan, secara keseluruhan pencapaian cadangan gas bumi selama delapan tahun terakhir dapat dikatakan belum optimal mengingat rerata pencapaian volume cadangan gas bumi

mengalami penurunan sejak tahun 2010. Rerata penurunan cadangan migas selama periode 2010-2017 mencapai 1.317% per tahun, meskipun cadangan gas bumi tahun 2015 sempat mengalami kenaikan menjadi 151.3 TCF atau sebesar 1.34% dari tahun sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, tidak hanya dari segi prosentase capaian, dari segi volume cadangan gas terjadi penurunan volume cadangan gas bumi di tahun 2017 meskipun penurunan volume cadangan gas bumi hanya mencapai 0.694%, lebih rendah dibandingkan penurunan rerata cadangan gas bumi selama periode 2010-2017

CAPAIAN CADANGAN GAS BUMI 2013-2017

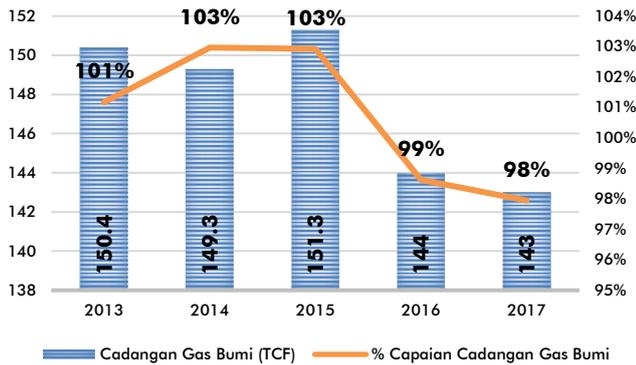


Diagram 29. Capaian cadangan gas bumi terhadap target perjanjian kinerja. Dari diagram di atas terlihat bahwa meskipun sejak tahun 2015 terjadi penurunan capaian cadangan migas terhadap target PK, namun sampai dengan tahun 2017, pencapaian cadangan migas terhadap target PK masih berada di atas 95%.

CADANGAN GAS BUMI (TCF)

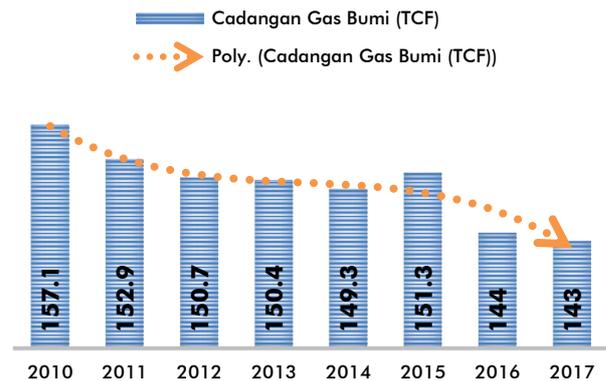


Diagram 30. Kecenderungan penurunan cadangan gas bumi. Dari diagram ini terlihat bahwa trend cadangan gas bumi secara volume mengalami penurunan selama periode 2010-2017 meskipun pada tahun 2015 sempat terjadi peningkatan cadangan gas bumi.

Dalam proses pelaksanaan kinerja terkait cadangan migas, dapat dikatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah antara lain adalah dikarenakan faktor harga minyak yang kurang mendukung serta belum ditemukannya cadangan baru. Harga minyak dunia mengalami penurunan yang signifikan sejak awal 2015. Hal ini turut membuat lesunya kegiatan eksplorasi dalam rangka mencari cadangan minyak dan gas bumi yang baru. Selanjutnya, berdasarkan diagram di bawah terlihat jelas bahwa realisasi pemboran eksplorasi memiliki korelasi terhadap dinamika harga minyak mentah Indonesia. Ini terlihat bahwa realisasi eksplorasi cukup tinggi pada saat harga minyak mentah Indonesia (ICP) berada pada harga yang cukup tinggi. Sebaliknya, apabila harga minyak mentah Indonesia rendah, realisasi eksplorasi juga mengalami penurunan.

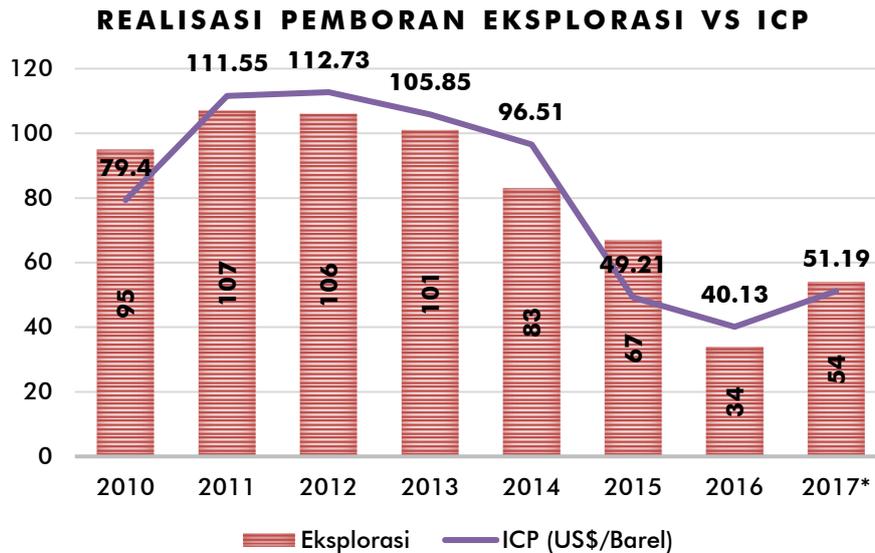


Diagram 31. Realisasi Pemboran Eksplorasi VS ICP. Dari diagram ini terlihat bahwa realisasi jumlah pemboran eksplorasi sangat dipengaruhi oleh dinamika harga minyak bumi. Realisasi pemboran eksplorasi cenderung meningkat ketika harga minyak bumi tinggi dan begitu pula sebaliknya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya, harga minyak dapat mempengaruhi peluang ditemukannya cadangan baru sebagai berikut:



Diagram 32. Pengaruh harga minyak terhadap peluang penemuan cadangan migas. Pada umumnya, harga minyak yang mendukung mempengaruhi peluang penemuan cadangan baru mengingat harga minyak yang mendukung memicu antusiasme KKKS untuk melakukan kegiatan eksplorasi.

Selain harga minyak, belum ditemukannya cadangan besar baru juga mempengaruhi besar cadangan migas di Indonesia pada tahun berjalan. Pada tahun 2017 tidak ditemukan cadangan besar yang dapat menggantikan cadangan yang telah diproduksi (Reserves Replacement Ratio (R3) < 1). Idealnya $R3 \geq 1$ dimana setiap produksi 1 barel harus diimbangi dengan penemuan cadangan dari eksplorasi ≥ 1 barel. Namun demikian, terlepas dari adanya faktor eksternal seperti harga minyak, Pemerintah tetap senantiasa melakukan control terhadap pelaksanaan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi sesuai komitmen yang telah disanggupi oleh masing-masing kontraktor.

PERKIRAAN CADANGAN TERSISA (REMAIANING RESERVES) MINYAK BUMI DAN KONDENSAT (TAHUN)

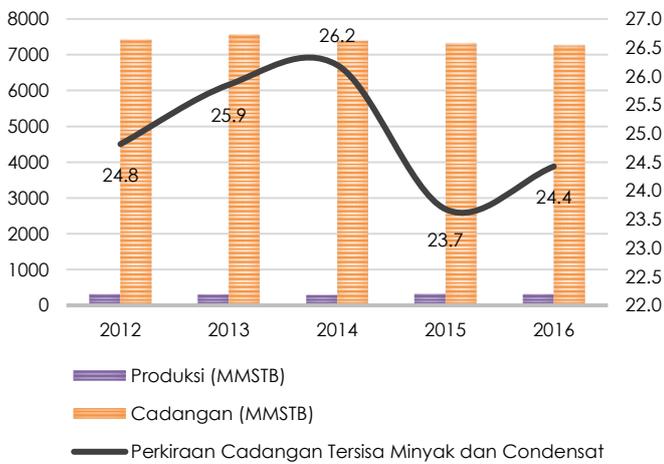


Diagram 33. remaining reserves minyak bumi dan kondensat. Dengan volume cadangan minyak bumi tahun 2016, jumlah umur cadangan tersisa pada tahun dimaksud meningkat dibanding tahun sebelumnya dan menjadi 24.4 tahun

PERKIRAAN CADANGAN TERSISA (REMAIANING RESERVES) GAS BUMI (TAHUN)

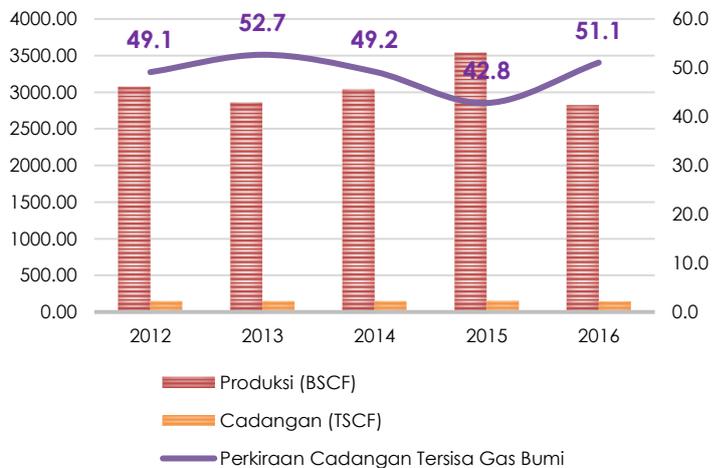


Diagram 34. remaining reserves gas bumi. Dibandingkan minyak bumi, umur cadangan tersisa gas bumi masih lebih besar dibandingkan minyak bumi dimana pada tahun 2016 cadangan tersisa gas bumi Indonesia adalah 51.1 tahun.

Selanjutnya, mengingat pentingnya Indonesia memiliki sumber cadangan migas yang besar, dalam rangka mencapai target di tahun 2018, Pemerintah berupaya melakukan beberapa upaya. Target pencapaian cadangan minyak bumi Tahun 2018 sebesar 6.441 MMSTB sedangkan gas bumi Tahun 2018 sebesar 143 TSCF. Dalam rangka pencapaian target cadangan minyak dan gas bumi tersebut, beberapa hal yang akan dilakukan antara lain adalah:

- Melakukan pemantauan lapangan dan koordinasi/konsinyering untuk inventarisasi data cadangan dan produksi minyak dan gas bumi dari lapangan eksisting untuk diketahui sisa cadangan (remaining reserves);
- Evaluasi data hasil kegiatan eksploitasi yang dapat meningkatkan status cadangan minyak dan gas bumi baik perubahan status dari cadangan harapan (*Possible*) ke mungkin (*Probable*) maupun dari cadangan mungkin (*Probable*) ke terbukti (*Proven*);
- Evaluasi potensi penambahan cadangan minyak dan gas bumi dari pengembangan lapangan baru. Inventarisasi cadangan minyak bumi dilakukan secara rutin setiap tahun untuk mengetahui ada tidaknya penambahan cadangan minyak bumi baik dari hasil kegiatan eksplorasi maupun reassessment cadangan karena adanya kegiatan pemboran pengembangan.

3.2 Meningkatkan investasi sub sektor migas

Sasaran strategis “meningkatkan investasi sub sector migas” berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2017 terdiri dari dua indikator kinerja utama, yaitu investasi sub sector migas dan jumlah rancangan peraturan perundang-undangan sub sector migas sesuai prolegnas. Adapun kinerja kedua indikator dimaksud diukur menggunakan kalsifikasi maximize dimana semakin tinggi capaian dari target yang telah ditetapkan, maka kinerja dapat dinyatakan semakin baik. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan untuk indikator investasi dan jumlah rancangan perunda-undangan merupakan target terendah atau minimal yang harus dicapai.

3.2.1 Investasi sub sektor migas

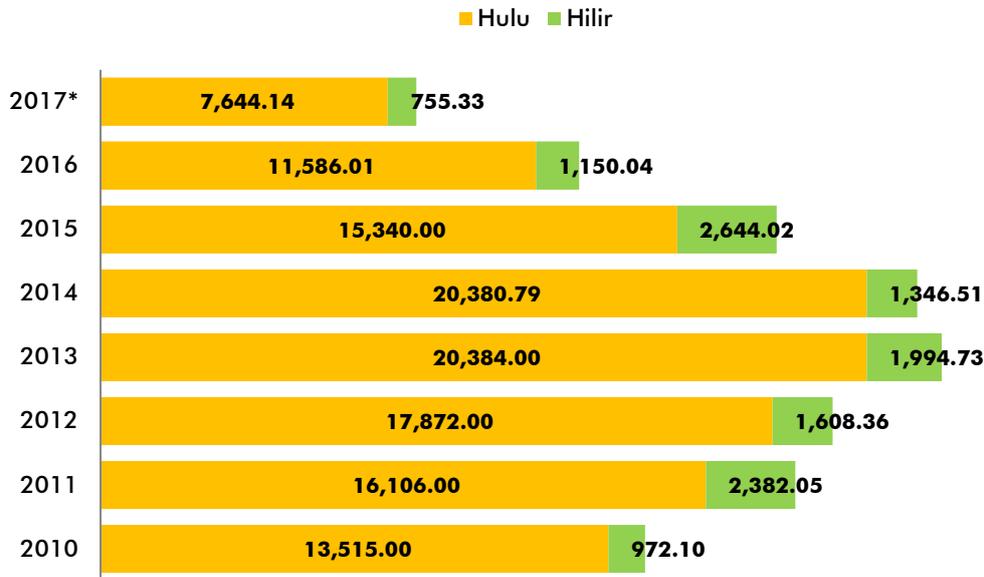
Investasi migas merupakan indikator utama yang penting dalam tolak ukur kinerja Pemerintah di sub sector migas. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia dalam situs resminya, definisi investasi adalah “penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan”. Berdasarkan definisi dimaksud, investasi migas dapat dikatakan merupakan penanaman modal suatu perusahaan di sub sector migas untuk mendapatkan keuntungan dari sub sector dimaksud. Dalam aplikasinya di lapangan, besarnya investasi migas dapat dikatakan menggambarkan daya tarik sub sector migas terhadap KKKS untuk menanamkan modal dan mengembangkan usaha sub sector migas di Indonesia. Investasi migas menjadi salah satu indikator utama Pemerintah mengingat besar harapan Pemerintah atas adanya multiplier effect, atau dampak positif investasi migas, baik terhadap perekonomian di Indonesia secara umum, maupun terhadap industry migas nasional.

Tabel 16. Indikator Utama Investasi Sub Sektor Migas 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Presentasi
4	Investasi sub sektor migas	Miliar US\$	22.2	8.3995	37.84%

Nilai realisasi investasi hulu migas diperoleh dari nilai expenditure yang direkapitulasi oleh SKK Migas yang terdiri dari nilai expenditure produksi dan non-produksi. Nilai expenditure yang dimaksud disini merupakan nilai belanja KKKS produksi dan non produksi. Belanja kegiatan non-produksi antara lain termasuk belanja untuk kegiatan seismik, studi GnG, pemboran fase eksplorasi, *pre-development cost*, dan UKL-UPL. Untuk kegiatan produksi termasuk kegiatan eksplorasi, development, dan kegiatan produksi. Nilai realisasi hilir migas diperoleh dari hasil rekapitulasi realisasi investasi berbasis izin usaha hilir migas. Rekapitulasi ini dilakukan oleh Ditjen Migas. Sehubungan dengan Peraturan Menteri ESDM nomor 29 Tahun 2017 tentang perijinan pada kegiatan usaha hilir migas dan Surat Keputusan Ijin Usaha, masing-masing BU hilir migas memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan terkait progres pembangunan infrastruktur hilir migas, dimana salah satu item yang dilaporkan adalah realisasi investasi hilir migas. Hasil rekapitulasi dimaksud kemudian menjadi angka realisasi investasi hilir migas. Adapun realisasi investasi migas dapat terlihat pada diagram berikut:

Realisasi Investasi Migas (Juta USD)



Status data tahun 2017:

*Hulu (Sumber: SKK Migas)

Data disubmit 5 Januari 2018.

- Data total expenditure KKKS Eksplorasi Nov 2017 berdasarkan Data Laporan Keuangan Gabungan Q3-2017 per 29 Desember 2017.
- Data total expenditure KKKS Eksploitasi berdasarkan FMR November 2017 per 29 Desember 2017.

*Hilir (Sumber: Ditjen Migas, PGN)

TMT 5 Januari 2018

Diagram 35. Realisasi investasi migas. Dari diagram ini terlihat bahwa realisasi investasi migas cenderung fluktuatif selama periode 2010-2017 dengan nilai investasi sub sektor migas tertinggi selama periode dimaksud terjadi pada tahun 2013.

Selama periode 2010-2017, investasi migas cenderung fluktuatif mengikuti dinamika perkembangan harga minyak mentah. Titik tertinggi investasi migas selama periode dimaksud terjadi pada tahun 2013. Adapun realisasi investasi migas yang dicapai sejak 2014-2017 cenderung menurun cukup signifikan sehingga pada tahun 2017, nilai investasi hasil submit per 5 Januari 2018 mencapai angka 8,399.47 Juta USD, atau sebesar 37.84% dari total nilai investasi migas di tahun 2013. Hal ini tidak dapat dipungkiri dipengaruhi oleh harga minyak yang cenderung kurang mendukung. Berdasarkan data yang ada, besarnya investasi migas cukup elastis terhadap ICP. Apabila di tahun sebelumnya ICP mencapai harga tinggi, maka di tahun selanjutnya kemungkinan besar nilai investasi migas juga mengalami peningkatan. Namun demikian juga sebaliknya, apabila di tahun sebelumnya ICP mencapai harga rendah, maka nilai investasi migas di tahun berikutnya akan menurun.

Realisasi Investasi Migas (Juta USD)

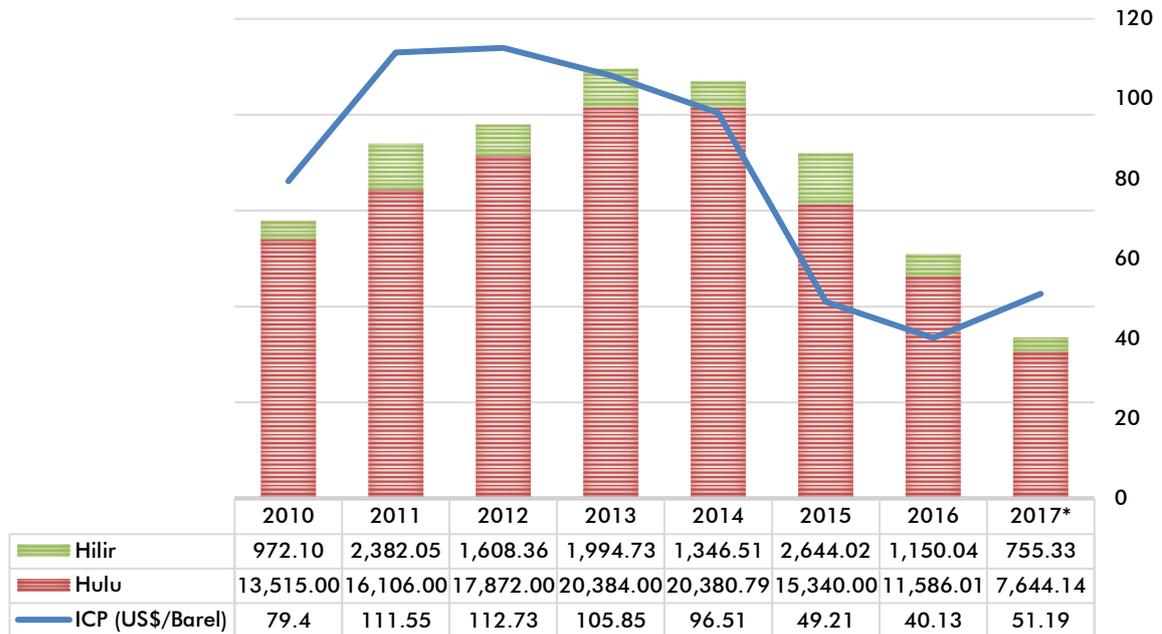
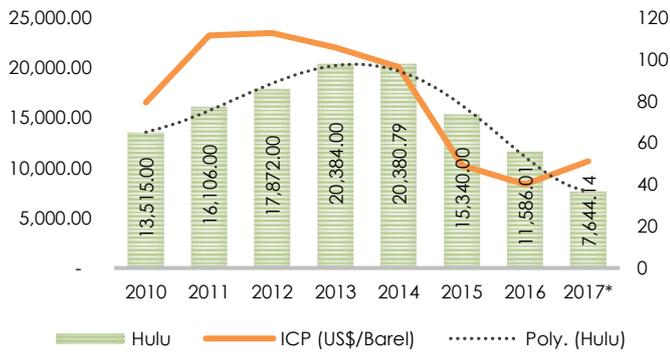


Diagram 36. Realisasi Investasi Migas VS Harga Minyak (ICP). Grafik di atas menunjukkan bahwa harga minyak sangat mempengaruhi minat investor di sub sector migas dan bahwa adanya *time lag* sebesar satu sampai dua tahun antara perubahan harga minyak dan realisasi investasi selama tahun 2010-2017.

Elastisitas nilai investasi migas terhadap harga minyak mentah dikarenakan besar nilai investasi hulu migas yang selama ini memberi kontribusi terhadap besaran total investasi migas, pada umumnya mengikuti harga minyak mentah. Ini dapat terlihat dari grafik dibawah yang memperlihatkan besaran investasi hulu lebih mengikuti besaran ICP dibandingkan dengan hilir migas. Rentannya investasi hulu migas terhadap harga minyak mentah menjadikan investasi migas elastis terhadap harga minyak mentah. Padahal, sudah menjadi rahasia umum di dunia kemigasannya bahwa realisasi investasi migas banyak diperoleh dari investasi hulu migas. Bahkan, sejak tahun 2012, prosentase kontribusi investasi hulu migas terhadap nilai investasi total migas tidak pernah kurang dari 85%. Pada tahun 2017, jumlah nilai investasi hulu migas mencapai 7644.14 Juta USD berdasarkan data hasil submit per 5 Januari 2018. Angka hulu migas tahun 2017 memberi kontribusi kepada total realisasi investasi migas pada tahun yang sama sebesar 89%.

INVESTASI HULU MIGAS (JUTA USD) VS ICP (USD/BAREL)



INVESTASI HILIR MIGAS (JUTA USD) VS ICP (USD/BAREL)

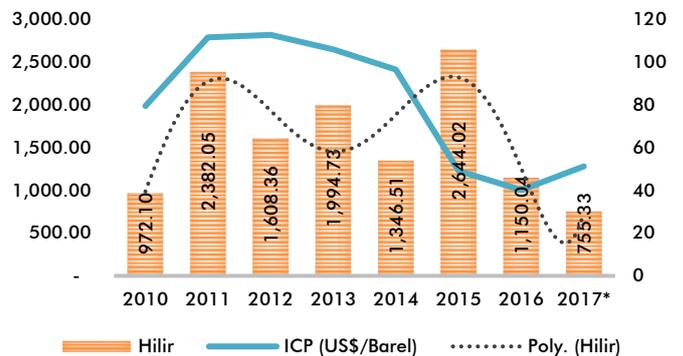
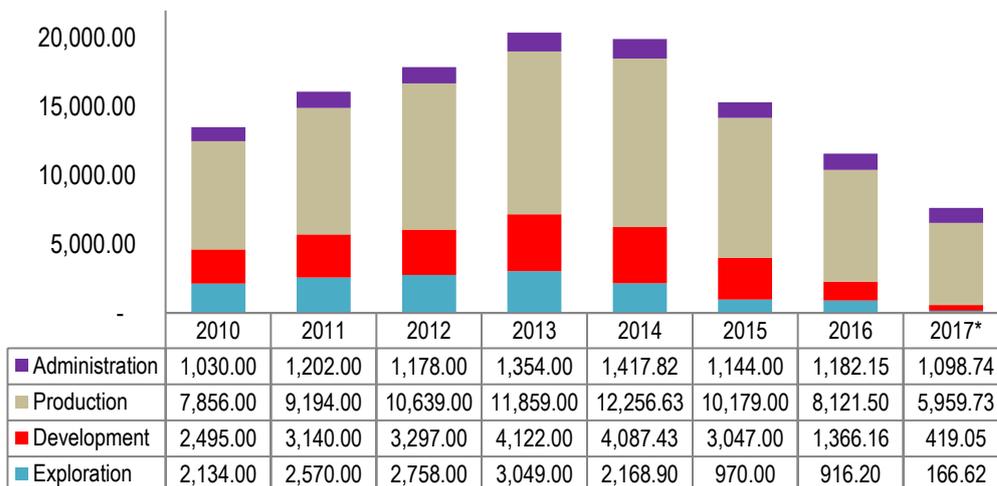


Diagram 37. elastisitas investasi hulu migas terhadap ICP. Dari diagram di atas terlihat bahwa nilai investasi hulu umumnya mengikuti kurva nilai ICP dengan *time lag* satu sampai dua tahun, dimana bila tahun sebelumnya ICP tinggi, maka nilai investasi di satu atau dua tahun berikutnya akan meningkat

Diagram 38. elastisitas investasi hilir migas terhadap ICP. Dari diagram di atas terlihat bahwa nilai investasi hilir tidak terlalu dipengaruhi oleh harga ICP. Hal ini terlihat ketika ICP menunjukkan angka yang tinggi tidak menjadikan investasi hilir ikut tinggi dan begitu pula sebaliknya.

Investasi hulu migas terdiri dari investasi dari kegiatan administrasi, investasi kegiatan produksi, investasi kegiatan pengembangan, dan investasi kegiatan eksplorasi. Selama tahun 2010-2017, investasi hulu migas sebagian besar berasal dari investasi kegiatan produksi sedangkan investasi untuk kegiatan pengembangan memberi kontribusi terbesar kedua terhadap realisasi investasi hulu migas.

Realisasi Investasi Hulu Migas (Juta USD)



*Sumber: SKK Migas

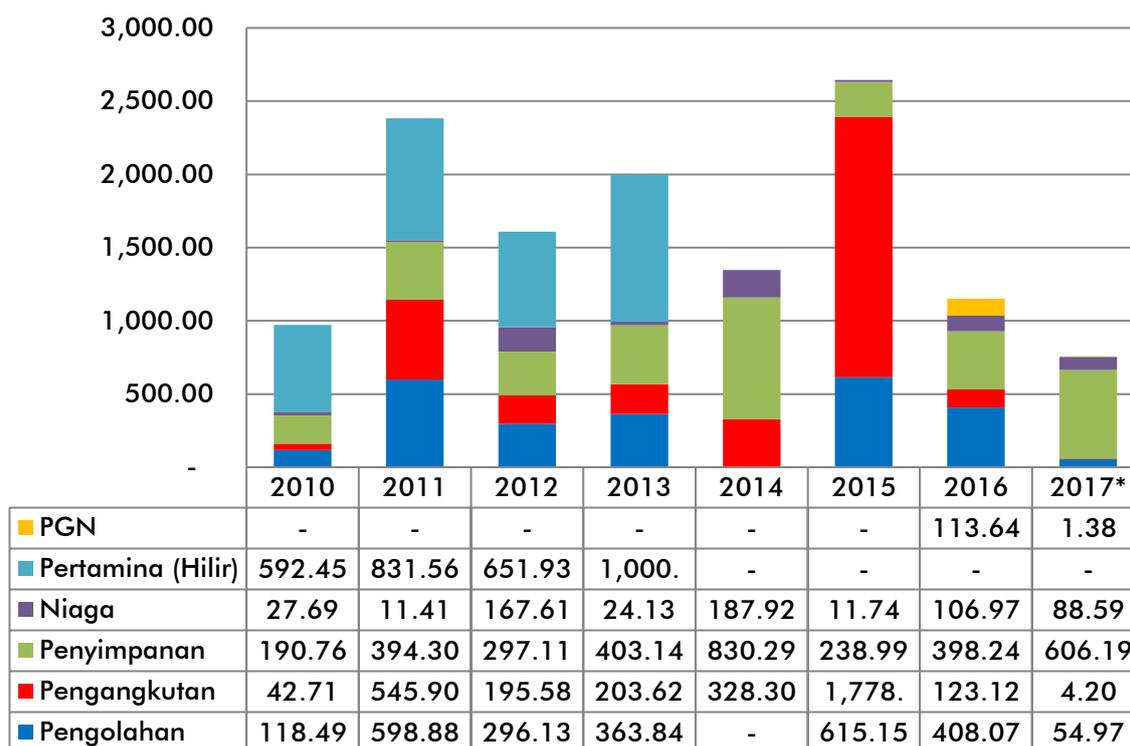
Data disubmit 5 Januari 2018.

- Data total expenditure KKKS Eksplorasi Nov 2017 berdasarkan Data Laporan Keuangan Gabungan Q3-2017 per 29 Desember 2017.
- Data total expenditure KKKS Eksploitasi berdasarkan FMR November 2017 per 29 Desember 2017.

Diagram 39. Realisasi Investasi Hulu Migas 2010-2017*. Dari diagram di atas terlihat bahwa investasi hulu migas lebih paling banyak berasal dari realisasi investasi produksi migas. Realisasi hulu migas cenderung fluktuatif selama tahun 2010-2017 mengikuti perkembangan ICP.

Besar investasi hilir migas setiap tahun cukup dinamis apabila dilihat dari segi komposisinya. Investasi hilir migas yang tercatat oleh Ditjen Migas dibedakan menjadi beberapa kategori seperti investasi PGN, Pertamina (Hilir), Niaga, Penyimpanan, Pengangkutan, dan Pengolahan. Pada tahun 2017, berdasarkan data input per 5 Januari 2018, investasi penyimpanan hilir migas memberi kontribusi terbesar pada investasi hilir migas keseluruhan. Hal ini cukup mempertegas dinamika investasi hilir migas, mengingat selama periode 2010-2012 investasi oleh Pertamina memberi sumbangan terbesar pada nilai total investasi hilir migas, pada tahun 2015 investasi pengangkutan memberikan kontribusi terbanyak pada investasi hilir migas, dan di tahun 2016 investasi pengolahan merupakan investasi terbesar di hilir migas. Selama periode 2010-2017, investasi penyimpanan migas mendominasi investasi hilir migas hanya pada tahun 2014. Besarnya investasi hilir migas ini bergantung dari perijinan usaha hilir migas yang diajukan pada tahun yang bersangkutan.

Realisasi Investasi Hilir Migas (Juta USD)



*Sumber: Ditjen Migas, PGN TMT 5 Januari 2018

Diagram 40. Realisasi Investasi Hulu Migas 2010-2017*. Dari diagram di atas terlihat bahwa investasi hulu migas lebih paling banyak berasal dari realisasi investasi produksi migas.

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa harga minyak bumi merupakan faktor utama yang menentukan besarnya realisasi investasi migas. Hal ini dikarenakan faktor fluktuasi harga minyak bumi mempengaruhi penurunan investasi dalam sektor migas. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan Pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi sub sektor migas antara lain adalah:

- Transparansi dan kemudahan akses data investasi migas baik di hulu maupun hilir
- Penyederhanaan perizinan dan keterbukaan informasi.
- Kemudahan-kemudahan berupa insentif dari pemerintah melalui kebijakan fiskal dan memberi opsi berupa gross split bagi investor.

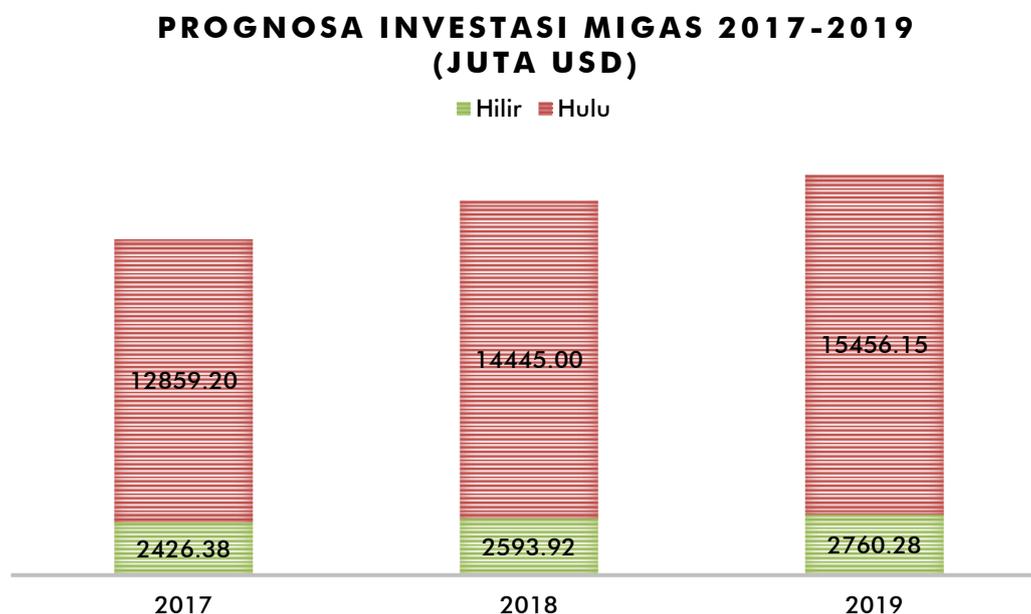


Diagram 41. Prognosa investasi migas 2017-2019. Diperkirakan realisasi investasi migas tahun 2018-2019 meningkat.

Terlepas dari belum optimalnya realisasi investasi migas dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja, diprediksikan realisasi investasi migas di tahun 2018 dan 2019 akan lebih besar dibandingkan dengan realisasi di tahun 2017. Prognosa investasi hulu migas tahun berjalan 2018 diambil dari WPnB SKK Migas. Sedangkan prognosa tahun berikutnya dilakukan menggunakan rate pertumbuhan 5-7% berdasarkan trend 10 tahun kebelakang dengan asumsi harga minyak stabil. Adapun prognosa investasi hilir migas tahun 2018-2019 dilakukan dengan perhitungan menggunakan metode *crystaln ball* dengan certainty 95%.

3.2.2 Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan sub sektor migas sesuai prolegnas

Tabel 17. Indikator Utama Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan sub sektor migas sesuai prolegnas 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Presentasi
5	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan sub sektor migas sesuai prolegnas	Rancangan	10	12	120.00%

Peraturan perundang-undangan memiliki peranan penting dalam industri minyak dan gas bumi, yaitu dalam rangka memberikan kepastian hukum maupun kepastian berusaha bagi dunia usaha. Bagian Hukum Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi selama tahun 2017 telah menyusun beberapa peraturan perundang-undangan baik yang merupakan peraturan perundang-undangan baru maupun perubahan atas peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan. Penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 240 K/06/MEM/2017 tentang Program Prioritas Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017 (Progsun 2017). Namun, berdasarkan kebijakan pimpinan dan/atau kebutuhan yang mendesak, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang diterbitkan diluar dari Progsun 2017.

Peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. PP 27/2017 tentang Perubahan atas PP 79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas.
2. Peraturan Menteri ESDM No. 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.
3. Peraturan Menteri ESDM No. 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Migas.
4. Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2017 tentang Percepatan Pemanfaatan BBG Transportasi Jalan.
5. Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan Usaha Hulu Migas.
6. Peraturan Menteri ESDM No. 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Migas.
7. Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan dan Harga Jual Gas Suar pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
9. Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi kepada BKPM.
10. Peraturan Menteri ESDM Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik.
11. Peraturan Menteri ESDM No. 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.
12. Peraturan Menteri ESDM Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

3.3 Meningkatkan alokasi migas domestik

3.3.1 Meningkatkan alokasi migas domestik

Tabel 18. Indikator Utama Presentase alokasi gas domestik 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Presentasi
----	-------------------	--------	--------	-----------	------------

6	Pemanfaatan gas bumi dalam negeri			
	a. Presentase alokasi gas domestik	%	62	60.6
				97.74%

Peningkatan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestic telah dicanangkan oleh Pemerintah melalui beberapa peraturan perundangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, selain energy terbarukan, gas bumi juga menjadi salah satu sumber energy yang diharapkan dapat memiliki proporsi yang lebih besar dalam supply energy nasional di masa yang akan datang, dimana disebutkan bahwa target bauran mix pada tahun 2050 mencapai minimal 24% untuk pemanfaatan gas bumi. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional mengamanatkan bahwa “energi tidak lagi berperan sebagai komoditi tetapi menjadi sumber daya pembangunan nasional” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat a serta Pasal 9. Peraturan dimaksud menegaskan komitmen Pemerintah untuk mengupayakan agar sumber daya energi nasional dimanfaatkan sebagai bahan baku pembangunan industri nasional.

Sehubungan dengan adanya *shifting paradigm* dimana gas bumi ditujukan sebagai modal pembangunan untuk memberi nilai tambah kepada perekonomian Nasional, maka Pemerintah berupaya meningkatkan alokasi gas untuk domestik yang sebelumnya banyak dialokasikan untuk kebutuhan ekspor. Untuk itu, dalam Rencana Strategis 2015-2019, target alokasi domestik meningkat setiap tahunnya sedangkan target alokasi ekspor gas ditargetkan menurun setiap tahunnya.

PROSENTASE ALOKASI GAS UNTUK DOMESTIK

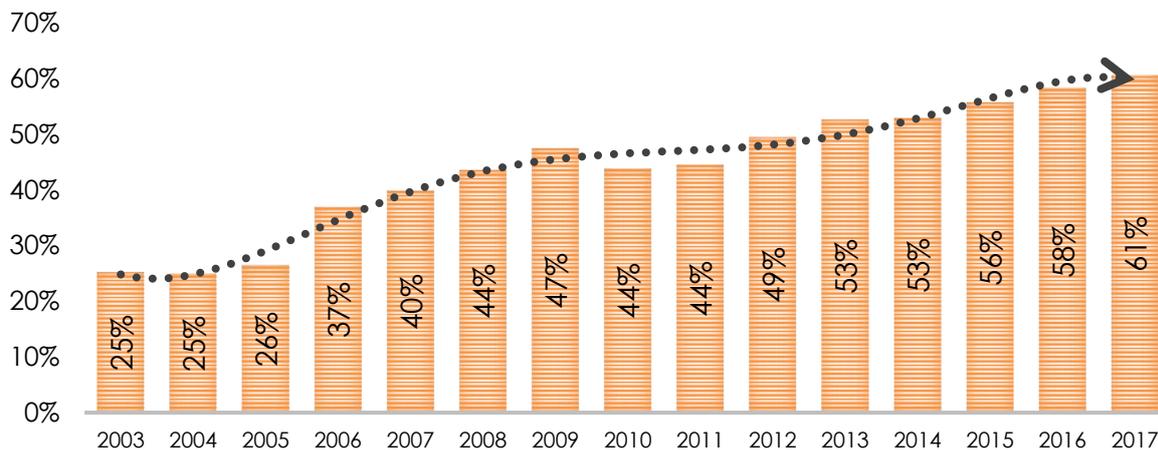


Diagram 42. Presentase alokasi gas untuk domestik. Terlihat bahwa terjadi peningkatan presentase alokasi gas untuk domestik sejak tahun 2003 sampai dengan 2017.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Pemerintah senantiasa memenuhi komitmennya dalam mengalokasikan gas untuk kebutuhan domestik. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan presentasi alokasi gas untuk domestic per tahun. Terjadi peningkatan alokasi gas untuk domestik rata-rata 9% sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2016. Peningkatan alokasi gas bumi untuk kebutuhan domestic masih terus berlangsung di tahun

2017. Pada tahun 2017, kebutuhan domestik lebih besar dibandingkan ekspor dengan porsi 61% dari total penyaluran gas. Mengingat data realisasi rata-rata penyaluran gas dimutakhirkan setiap 3 bulan sekali, sehingga realisasi gas pada bulan Desember 2017 diperkirakan dapat mencapai target sebesar 62%.

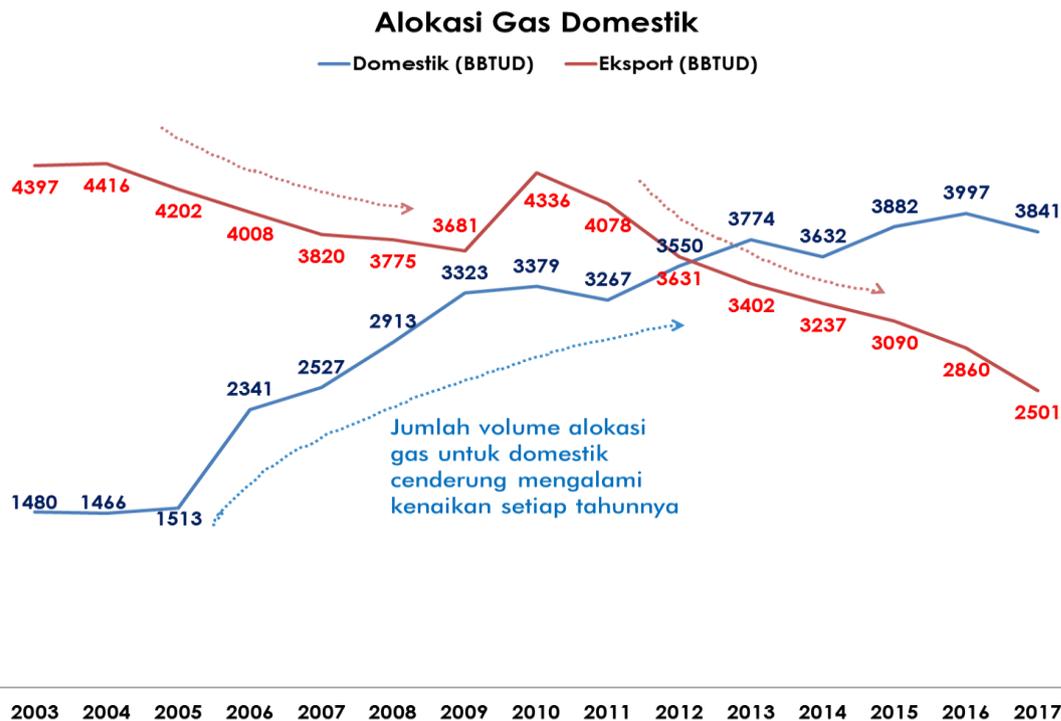


Diagram 43. Realisasi Pemanfaatan Gas Bumi Indonesia Oktober 2017. Dari diagram ini terlihat bahwa seiring dengan meningkatnya volume gas bumi yang dialokasikan untuk pemenuhan domestik, volume gas bumi peruntukkan ekspor menurun. Hal ini menunjukkan upaya Pemerintah mewujudkan komitmennya dalam mengupayakan penggunaan gas bumi domestik untuk bahan baku pembangunan Nasional

Dalam pelaksanaannya di lapangan, Pemerintah kembali menetapkan prioritas atas alokasi gas bumi untuk kebutuhan domestic. Pasal 5 Peraturan Menteri ESDM nomor 06 tahun 2016 menjelaskan bahwa alokasi pemenuhan kebutuhan energy domestic dilakukan berdasarkan urutan prioritas yang terdiri dari:

- 1) Pemanfaatan untuk program Pemerintah seperti Penyediaan Gas Bumi untuk Transportasi, Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga, Rumah Tangga, dan Pelanggan Kecil;
- 2) Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi Nasional;
- 3) Industri pupuk;
- 4) Industri berbasis gas bumi;
- 5) Penyediaan gas bumi untuk tenaga listrik;
- 6) Industri yang ber bahan bakar gas bumi.

Proporsi Alokasi Gas Bumi

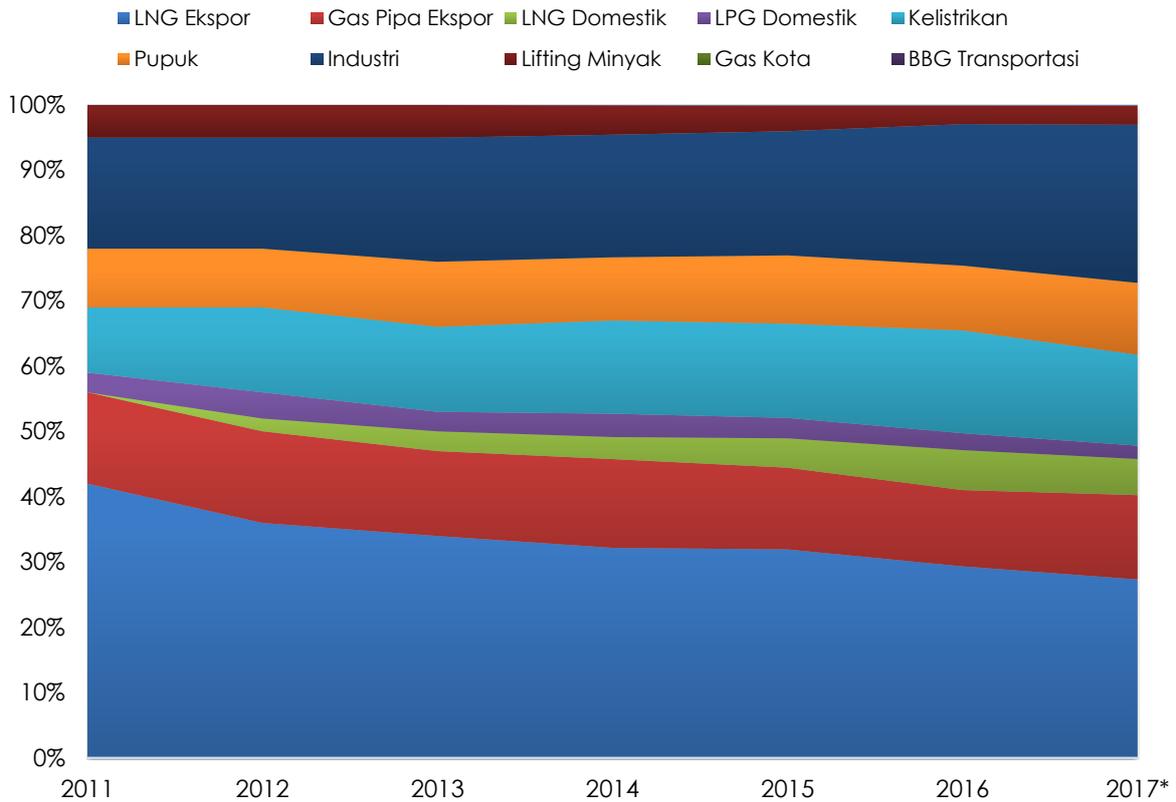


Diagram 44. Proporsi alokasi gas bumi tahun 2011-2017. Terlihat bahwa apabila dibagi berdasarkan peruntukannya, alokasi LNG ekspor memiliki proporsi terbesar dalam alokasi gas bumi selama periode dimaksud. Namun demikian, alokasi gas bumi untuk domestik tetap lebih tinggi dibandingkan untuk ekspor sejak tahun 2013 dimana sektor industri merupakan sektor pengguna alokasi gas domestik terbesar dibandingkan sektor lainnya di Indonesia.

Selama periode 2011-2017, komposisi alokasi gas bumi cenderung fluktuatif meskipun, industri, ekspor LNG dan kelistrikan merupakan tiga jenis sector yang memanfaatkan gas bumi Indonesia terbanyak selama periode dimaksud. Namun demikian, dapat terlihat bahwa proporsi konsumsi gas bumi untuk keperluan ekspor, seperti ekspor LNG dan ekspor gas pipa cenderung menurun atau stabil sementara pemanfaatan gas untuk sector domestic lain, seperti LNG domestic, gas kota, BBG transportasi, Industri dan Pupuk mengalami peningkatan. Ini menunjukkan upaya Pemerintah yang mendorong pemanfaatan gas bumi untuk keperluan domestic.

REALISASI PENYALURAN GAS TAHUN 2017 (BBTUD)

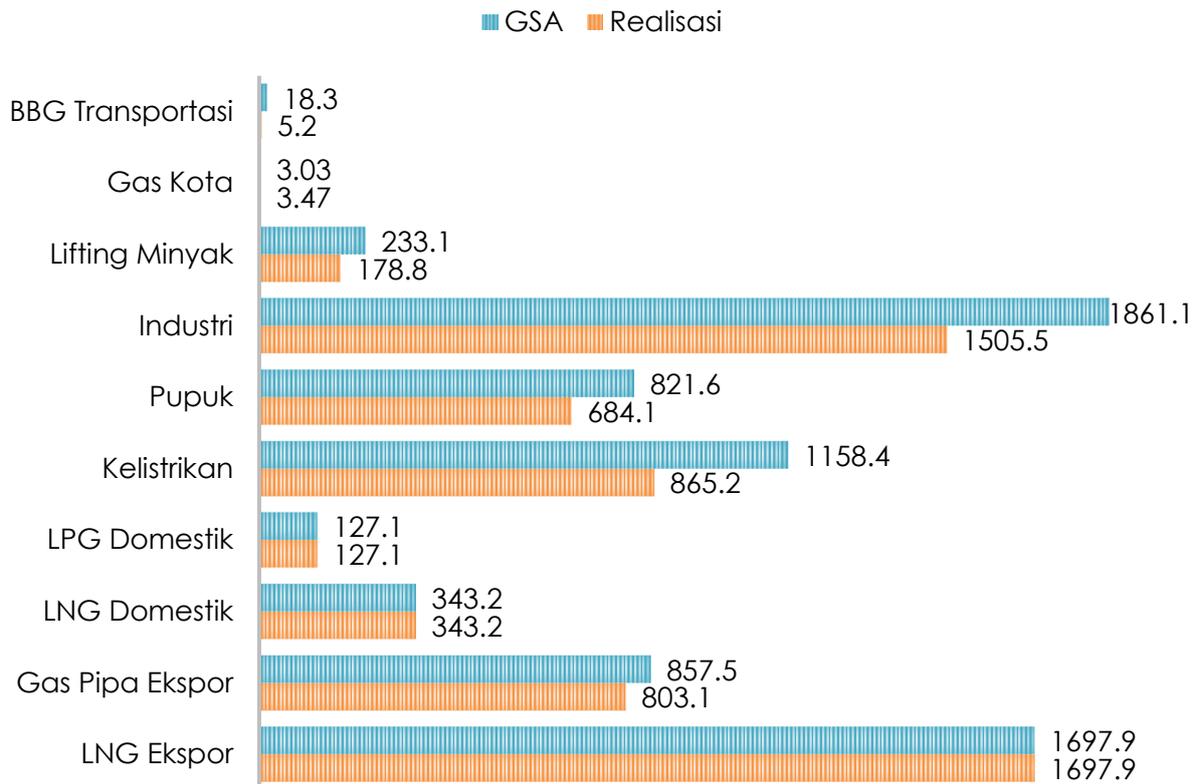


Diagram 45. Realisasi penyaluran gas tahun 2017. Diagram ini menunjukkan bahwa penggunaan gas bumi belum sepenuhnya sesuai dengan komitmen awal di beberapa sektor.

Sektor industri merupakan pengguna terbesar gas domestik Indonesia selama tahun 2017, kemudian disusul oleh kelistrikan dan pupuk. Untuk ketiga sektor tersebut, rata-rata realisasi penyerapan lebih rendah bila dibandingkan dengan komitmen pada *Gas Sales Agreement* (GSA). Perlambatan ekonomi terutama sektor retail, dipercaya sebagai salah satu penyebab menurunnya jumlah produksi sebagian besar industri. Pada sektor kelistrikan, sistem *merit order* pada penggunaan energi primer menyebabkan penyerapan gas sulit mencapai nilai maksimum sesuai dengan GSA. Selain itu, terdapat tren penurunan konsumsi listrik rumah tangga sehingga angka penyerapan gas semakin menurun.

Selanjutnya, sejak harga minyak dunia mengalami penurunan drastis, permasalahan gas bumi domestik berkaitan dengan aspek *affordability*. Beberapa trader dan end-user mengeluhkan harga yang sangat tinggi. Selain hal tersebut, perihal *accessibility* juga dikeluhkan dimana pembeli gas terkendala dalam mengakses gas dari sumber pasokan yakni KKKS sehingga terdapat lapangan gas di pedalaman yang tidak dapat dikembangkan (*stranded*), yang pada akhirnya mengakibatkan krisis gas maupun kelistrikan (seperti di beberapa bagian di Sumatera dan Kalimantan) yang merupakan daerah penghasil gas.

3.3.2 Fasilitas Pembangunan FSRU/Regasifikasi/LNG Terminal (Unit)

Tabel 19. Indikator Utama Fasilitas pembangunan FSRU (Flating Storage Regasification Unit/Regasifikasi on-shore/LNG Terminal) 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Presentasi
6	Pemanfaatan gas bumi dalam negeri				
	b. Fasilitas pembangunan FSRU (Flating Storage Regasification Unit/Regasifikasi on-shore/LNG Terminal)	Unit	1	1	100.00%

Sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Ditjen Migas menargetkan terlaksananya fasilitas pembangunan kepada unit FSRU/Regasifikasi/LNG Terminal yang berbeda setiap tahunnya. Fasilitas pembangunan FSRU yang ditargetkan dilakukan pada tahun 2017 adalah pembangunan fasilitas FSRT (Floating Storage Regasification Terminal) Banten oleh PT Energi Dian Kemala. Pembangunan dimaksud merupakan salah satu program/kegiatan prioritas yang dipantau oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dan tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional guna mendukung kemandirian energi Nasional. FSRT Banten yang sedang dibangun oleh PT Energi Dian Kemala telah diinisiasi semenjak tahun 2011 dan direncanakan akan beroperasi pada tahun 2015, namun karena terkendala beberapa faktor teknis dan non-teknis maka jadwal onstream mundur hingga tahun 2017, namun pada tahun 2017 pun belum terealisasi.



Diagram 46. Lokasi terminal FSRT

Fasilitas FSRT Banten terdiri dari kapal yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan LNG dan terminal LNG di darat yang berfungsi sebagai fasilitas regasifikasi. Progress pembangunan hingga September 2017, adalah 54,01% dengan rincian sebagai berikut:

PROGRES PEMBANGUNAN FSRU

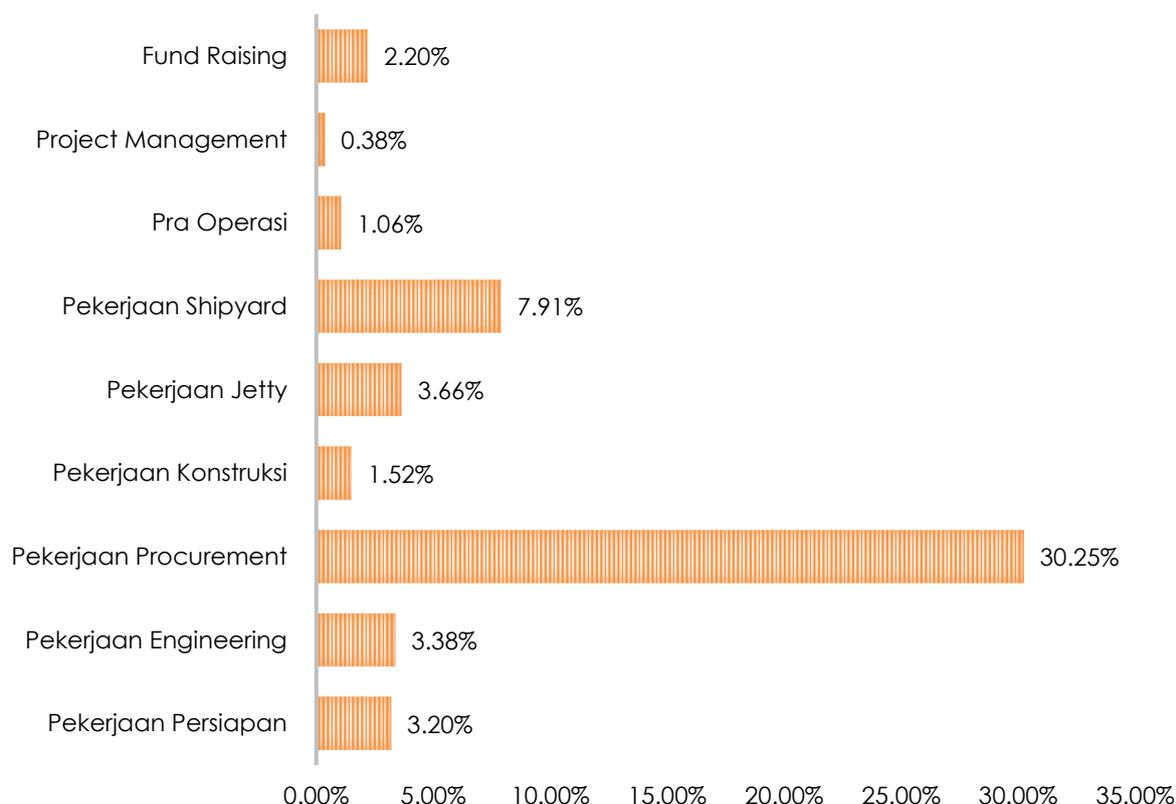


Diagram 47. Progres pembangunan FSRU.

Pelaksanaan fasilitasi yang diselenggarakan oleh Ditjen Migas terkait pembangunan FSRU antara lain adalah:

- 1) Pada Tanggal 23 Mei 2017 dilaksanakan rapat koordinasi dengan PT Energi Dian Kemala dalam rangka monitoring pencapaian program prioritas pantauan KSP Tahun 2017 dengan hasil antara lain sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan terhenti pada pengurugan dan pemadatan lahan dikarenakan belum selesainya proses persetujuan pembiayaan oleh perbankan
 - b. PT Energi Dian Kemala tetap melakukan pekerjaan dengan pembiayaan sendiri, meliputi: Jasa Konsultansi, Survei dan pengurusan perizinan.
 - c. Kegiatan Pembangunan dapat diselesaikan pada Oktober 2018 jika pembiayaan dari perbankan disetujui.
 - d. Kendala utama PT Energi Dian Kemala dalam pembangunan FSRU adalah masalah finansial
- 2) Pada Tanggal 16 Agustus 2017 telah dilakukan kunjungan lapangan ke lokasi FSRU milik PT Energi Dian Kemala dalam rangka monitoring dan evaluasi pembangunan FSRU, dengan hasil antara lain sebagai berikut:
 - a. Fasilitas yang akan dibangun:

- 1 unit Floating Storage Unit (FSU) dengan kapasitas 129.000 m³
 - Terminal LNG dengan 2 unit Regasifikasi kapasitas 4000 Mton/hari
 - Jetty
- b. Terminal LNG yang akan dibangun berlokasi di Kawasan Industrial Estate, Cilegon – Banten seluas 31.000 m³ dengan status lahan sewa dari PT Krakatau Daya Listrik selama tiga puluh tahun sejak tanggal 24 Januari 2012
 - c. Pembelian Fsu telah dilakukan pembelian dimana saat ini posisi FSU sedang dry *docking* di Batam
 - d. Kondisi terminal LNG telah selesai tahap pematangan lahan dan belum dilakukan pembangunan fasilitas lanjutan dikarenakan alasan finansial
 - e. Pembangunan direncanakan dimulai Januari 2018 jika pembiayaan perbankan disetujui.
- 3) Pada tanggal 25 September 2017 telah dilaksanakan pertemuan antara Ditjen Migas, PT Energi Dian Kemala dan pihak perbankan (PT Bank CIMB Niaga, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT BRI (Persero), PT Shinhan Bank Indonesia) untuk membahas kepastian pembiayaan pembangunan FSRU oleh PT Energi Dian Kemala. Pihak Perbankan menyampaikan bahwa masih terdapat beberapa hal yang masih menjadi evaluasi terkait persetujuan pembiayaan, antara lain : kondisi supply dan demand gas bumi di Indonesia, harga gas bumi di pengguna akhir dan kepastian keberlangsungan proyek.

Sampai dengan akhir 2017, Pekerjaan Persiapan telah dilakukan antara lain meliputi pengurusan perijinan, Survey lapangan termasuk soil test maupun bathymetry, serta pengadaan lahan. Terkait dengan pengadaan lahan, saat ini pengadaan lahan sudah dilakukan dengan menyewa lahan milik PT KDL. Kegiatan engineering untuk processing, mechanical, piping, electrical, control system dan civil telah selesai 100%. Pekerjaan Procurement antara lain meliputi pembelian floating storage unit, mechanical dan equipment, serta pengadaan tiang pancang. Untuk Floating Storage Unit sudah dilakukan pembelian sejak tahun 2012 dan saat ini sedang dry docking di galangan kapal MMHE, Johor Baru Malaysia. Terkait dengan mechanical dan equipment, tipe tangki LNG sudah dilakukan evaluasi dan potential supplier sudah ditentukan. Selanjutnya, pengadaan tiang pancang dermaga sudah ditentukan sampai dengan September tahun 2017.

Terkait dengan pekerjaan konstruksi, telah dilakukan kegiatan pengurugan dan pemadatan lahan, penentuan titik-titik lokasi pondasi bangunan, jalan, filling dan truck loading. Progress pekerjaan Jetty sampai dengan September 2017 meliputi survey meta-ocean yang telah dilakukan, evaluasi orientasi posisi platform dermaga, dan penyelesaian 100% pekerjaan engineering dan design. Untuk Pekerjaan Shipyard, PT EDK telah menunjuk galangan kapal MMHE di Malaysia untuk melakukan assembling dengan pemeriksaan teknis kapal oleh Team dari Shipyard. Selanjutnya akan dilakukan dry docking dan life extension. Terkait dengan Pra Operasi, sampai dengan september 2015 PT Energi Dian Kemala telah menyediakan kegiatan pra operasi dengan LNG STS sebagai operator terminal LNG untuk penyusunan Standard Operating Procedure (SOP). Berkaitan dengan realisasi aspek Project Management, dalam kegiatan pembangunan FSRT Banten, PT Energi Dian Kemala menunjuk Project Management PT Synergy yang akan memantau

dan mengevaluasi kegiatan pembangunan dan *as built drawing* yang sudah ditentukan dan memberikan laporan secara periodik kepada manajemen perusahaan PT Energi Dian Kemala.

Namun demikian. Terlepas dari progres pembangunan FSRU di aspek lainnya, Fund Raising atau pendanaan merupakan faktor penting dalam merealisasikan proyek FSRT Banten. Kendala dalam fund raising ini menyebabkan tertundanya kegiatan pembangunan terminal LNG. Sebelumnya PT EDK telah melakukan pendekatan kepada pihak perbankan namun sampai saat ini belum mendapatkan kepastian pendanaan dari perbankan. Pihak perbankan menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi faktor pendanaan pembangunan infrastruktur gas bumi dalam hal ini pembangunan FSRT PT EDK di Banten yaitu kondisi supply demand gas bumi Indonesia, harga gas bumi di pengguna akhir, dan kepastian keberlangsungan proyek. Pihak perbankan juga akan melakukan evaluasi secara rinci terkait persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan peminjaman modal pembangunan infrastruktur antara PT EDK dengan perbankan.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa selain masalah kepastian pendanaan proyek, kendala utama pembangunan FSRT juga meliputi mekanisme pasokan LNG. Sumber pasokan gas direncanakan diperoleh dari dalam negeri atau luar negeri. Pasokan dalam negeri rencananya akan dipasok dari Tangguh atau Bontang sedangkan luar negeri diperoleh dari Shell Eastern Trading (Pte). Ltd. PT EDK juga telah memiliki MoU dengan konsumen seperti PT Krakatau Daya Listrik, PT Bayu Buana Gemilang, PT Energasindo Heksa Karya dan PT Muntok Listrik Utama.

3.4 Meningkatkan akses dan infrastruktur migas

3.4.1 Kapasitas kilang BBM

Target kapasitas kilang BBM pada Perjanjian Kinerja Ditjen Migas 2017 ditetapkan sebesar 39 Juta KL untuk indikator kinerja produksi BBM dari kilang dalam negeri dan 1169 MBPD untuk indikator kapasitas kilang BBM dalam negeri. Kapasitas terpasang kilang BBM dihitung berdasarkan pada ijin usaha pengolahan yang diterbitkan oleh Pemerintah, atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Migas. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2015-2019, target indikator kapasitas kilang BBM dalam negeri sedikit berbeda dari target Renstra yang ditetapkan sebesar 1167 MBPD, dikarenakan pada saat penetapan target Renstra 2015-2017, target total kilang BBM dihitung berdasarkan kapasitas produksi PT TWU sebesar 16 MBCD. Namun demikian, sesuai dengan ijin usaha pengolahan yang terbit pada tahun 2014 untuk train 2 PT. TWU, maka kapasitas terpasang PT. TWU menjadi 18 MBCD sehingga kapasitas total kilang BBM menjadi 1169.1 MBCD.

Tabel 20. Indikator Utama Kapasitas Kilang BBM 2017

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Presentasi
-------------------	--------	--------	-----------	------------

Kapasitas kilang BBM				
a) Produksi BBM dari kilang dalam negeri	Juta KL	39	42.3	108.46%
b) Kapasitas kilang BBM dalam negeri	Ribu BPD	1169	1169	100.00%

3.4.1.1 Produksi BBM dari Kilang Dalam Negeri

Besar kemungkinan bahwa produksi BBM dari kilang dalam negeri akan melebihi target yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Produksi kilang minyak dalam negeri sampai dengan bulan Oktober 2017 adalah sebesar 35,3 juta KL dan diperkirakan sampai dengan bulan Desember 2017 adalah 42,3 juta KL. Berdasarkan data prognosa, total produksi BBM lebih besar dari yang ditargetkan sebesar 39 juta KL, hal ini disebabkan karena ada penambahan produk dan volume produksi BBM.

Tabel 21. Data Produksi 3 tahun terakhir

No	Produk BBM	Volume (KL)		
		2015	2016	2017
1	Avtur	3.216.058	3.621.887	3.611.622
2	Premium	11.398.310	10.944.576	7.971.437
3	Minyak Tanah	790.863	1.026.319	924.428
4	Solar	20.546.720	19.665.171	20.837.172
5	Minyak Diesel	154.525	154.009	115.804
6	Minyak Bakar	1.903.385	1.958.476	1.499.818
7	Pertamax	1.386.431	3.882.289	6.262.659
8	Pertamax Plus	99.684	47.691	-
9	Pertamax Racing	7.151	4.052	-
10	Pertamax Turbo	-	42.263	81.627
11	Pertadex	38.528	79.879	54.790
12	Pertalite	-	33.686	56.1368
13	MGO	-	945.365	385.496
14	Dexlite	-	-	19.634
15	MFO 380	-	5.506	3.835
TOTAL		39.541.655	42.411.169	42.329.690

Sedangkan, apabila ditelusuri lebih jauh, berdasarkan jenisnya, tiga jenis BBM yang paling banyak diproduksi oleh kilang dalam negeri selama tiga tahun terakhir adalah BBM dengan jenis solar, premium, dan pertamax turbo.

Data Produksi Bbm 2013-2017 (Kilo Liter)

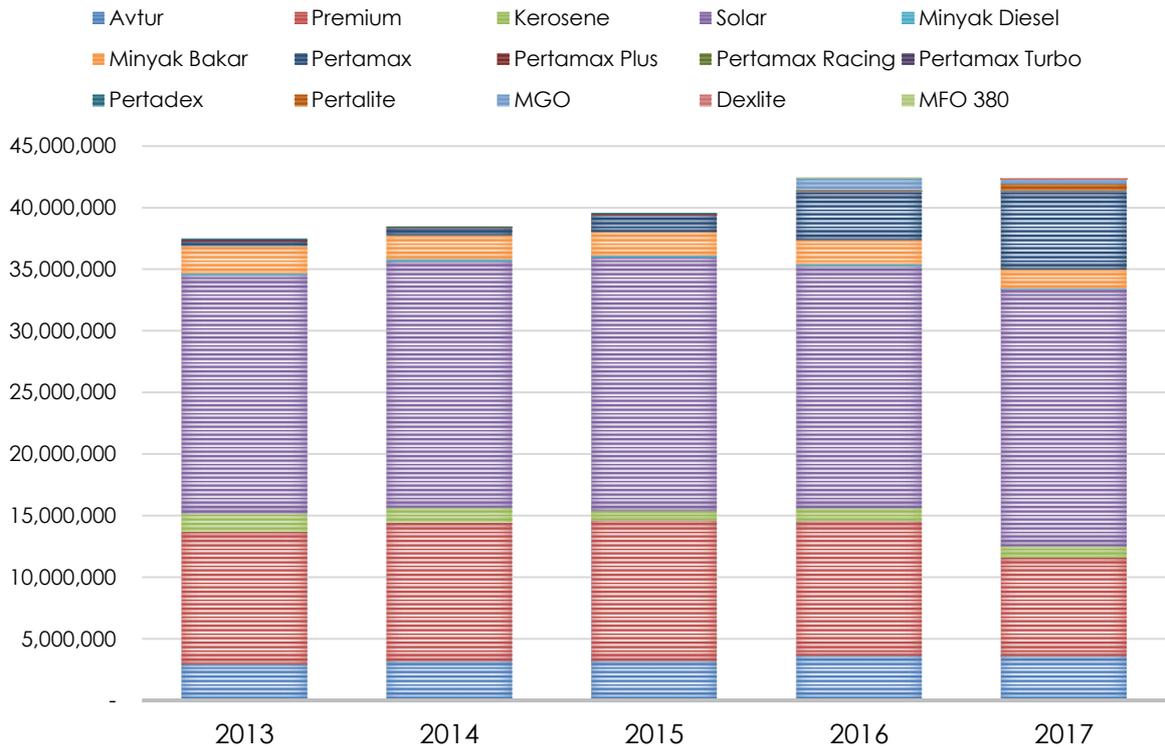


Diagram 48. Data Produksi BBM dalam negeri tahun 2015-2017

Produksi BBM dari kilang dalam negeri cukup fluktuatif setiap tahunnya selama periode 2011-2017. Secara umum, rerata produksi BBM dari kilang dalam negeri mengalami kenaikan setiap tahunnya selama tahun 2011-2017. Rerata kenaikan jumlah produksi BBM dari kilang dalam negeri mencapai 2.12% per tahun. Namun demikian, volume produksi BBM sempat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2012 dan 2017.

Produksi Total BBM 2011-2017 (Kilo Liter)

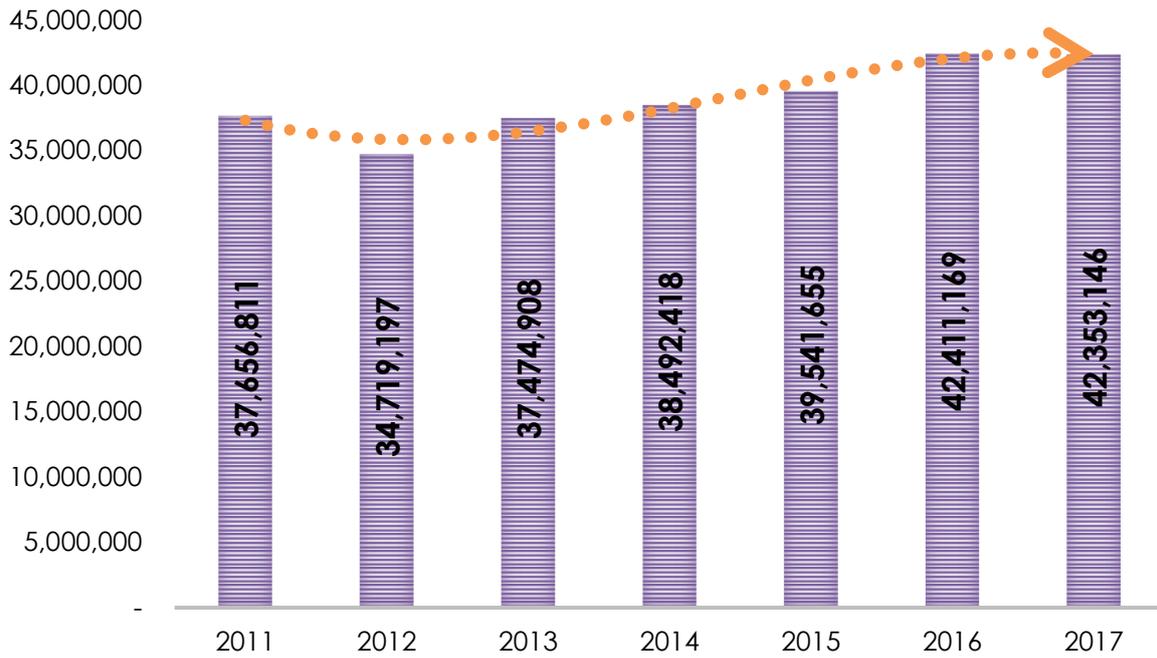


Diagram 49. Produksi total BBM 2011-2017.

KILANG MINYAK DI INDONESIA

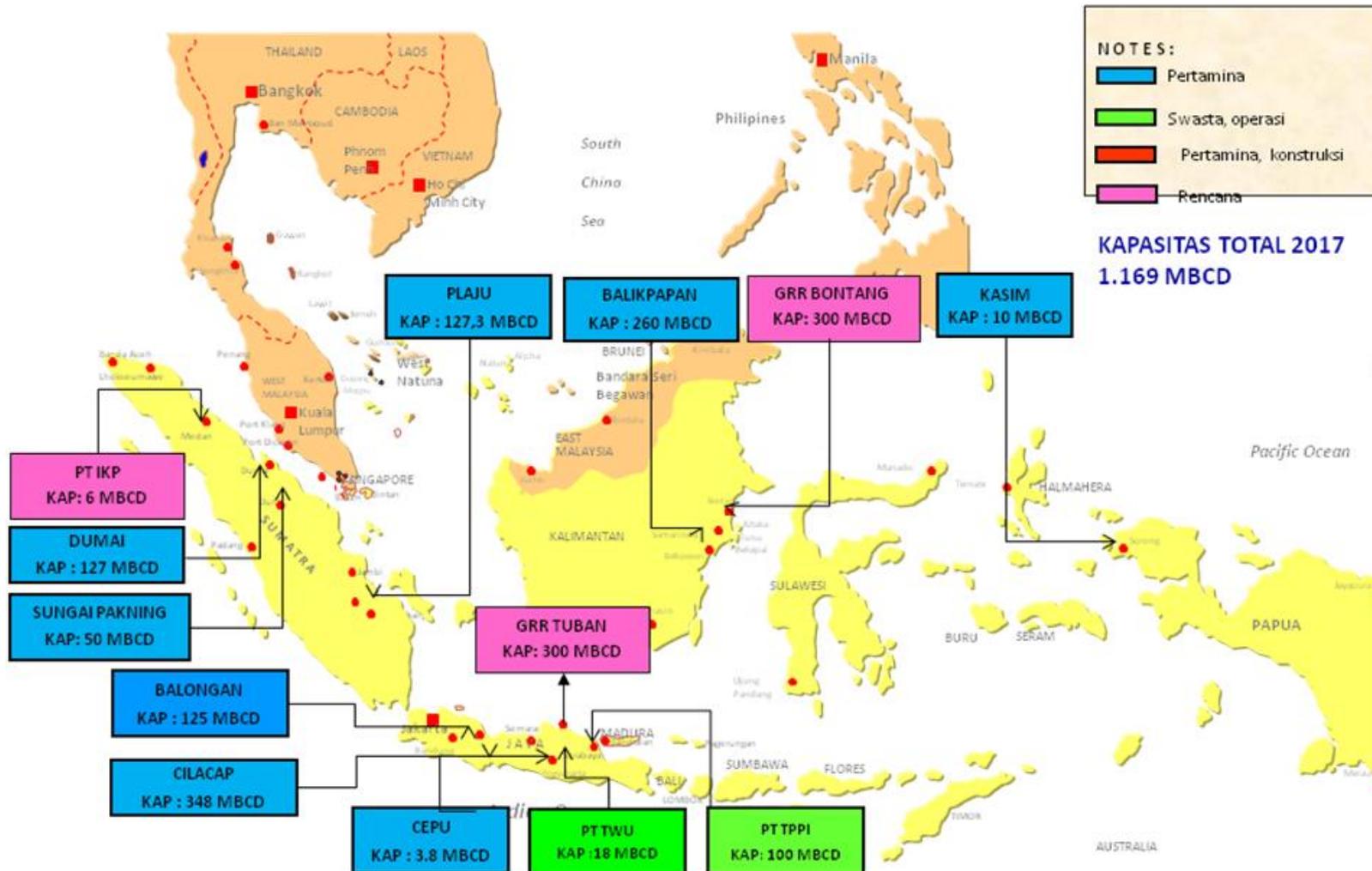


Diagram 50. Kilang Minyak Indonesia

3.4.1.2 Kapasitas kilang BBM dalam negeri

Sampai dengan tahun 2017 kapasitas kilang minyak di Indonesia masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 1169.1 MBCD dengan rata-rata usia kilang sekitar 30 tahun. Hal ini mengakibatkan kegiatan pengolahan yang tidak efisien dan kompleksitasnya rendah. Seperti kita ketahui, konsumsi BBM dalam negeri semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga kebutuhan bahan baku untuk memproduksi BBM juga mengalami peningkatan. Akan tetapi, kondisi produksi bahan baku minyak mentah dari lapangan domestik mengalami penurunan, maka dilakukan impor.

Kilang yang mengolah bahan baku minyak mentah impor adalah PT Pertamina (Persero): (RU IV Cilacap, RU V Balikpapan, RU VI Balongan) dan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan total impor sebesar 54% dari total kebutuhan kilang. Sumber impor berasal dari mentah ALC, Bonny Light, Azeri, Saharan, Qua Iboe, dan Escravos Light dan bahan baku domestik berasal dari lapangan Duri, Arjuna, Jene, Katapa, Belanak, Geragai dan Banyu Urip. Kemudian kedua bahan baku ini dilakukan blending yang mendekati desain awal kilang.

Kapasitas total kilang minyak yang beroperasi di Indonesia pada akhir tahun 2017 adalah sebesar 1169.1 MBCD yang terdiri atas:

- 1) Kilang PT Pertamina (Persero) dengan total kapasitas 1047,3 MBCD
 - RU-II Dumai / Sungai Pakning : 177 MBCD
 - RU-III Plaju / S. Gerong : 127.3 MBCD
 - RU-IV Cilacap : 348 MBCD
 - RU-V Balikpapan : 260 MBCD
 - RU-VI Balongan : 125 MBCD
 - RU-VII Kasim : 10 MBCD
- 2) Kilang Pusdiklat Migas Cepu dengan kapasitas 3,8 MBCD
- 3) Kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan kapasitas 100 MBCD
- 4) Kilang PT Tri Wahana Universal (TWU) Train 1 dengan kapasitas 6 MBCD, dan Train 2 dengan kapasitas 12 MBCD.

Adapun daftar Badan Usaha pengolahan minyak bumi dan hasil olahan di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Badan Usaha Pengolahan Minyak Bumi (Izin Usaha Tetap)

No	Badan Usaha	Komoditas Usaha	Kapasitas Kilang
1	PT Pertamina (Persero)		

No	Badan Usaha	Komoditas Usaha	Kapasitas Kilang
	RU II	BBM & LPG	177 MBCD
	RU III	BBM & LPG	127,3 MBCD
	RU IV	BBM & LPG	348 MBCD
	RU V	BBM & LPG	260 MBCD
	RU VI	BBM & LPG	125 MBCD
	RU VII	BBM & LPG	10 MBCD
2	Pusdiklat Migas Cepu	BBM	3,8 MBCD
3	PT Tri Wahana Universal	BBM	18 MBCD
4	PT Trans Pacific Petrochemical Indotama	BBM & LPG	100 MBCD

Tabel 23. Badan Usaha Pengolahan Minyak Bumi (Izin Usaha Sementara)

No	Badan Usaha	Komoditas Usaha	Kapasitas Kilang
1	PT Indo Kilang Prima	BBM	6 MBCD
2	PT Dex Indonesia	BBM	2 x 20.000 barel/hari
3.	PT Envio Energi International	BBM	9.500 barel/hari
4.	PT Tierra Energi Perkasa	BBM	10.000 BOPD
5.	PT Palembang GMA Refinery Consortium (PT PGRC)	BBM	300.000 BOPD
6.	PT Intim Perkasa Kilang Energi	BBM	30.000 BOPD
7.	PT Mirah Ganal Energi	BBM	600 BPD

Tabel 24. Badan Usaha Pengolahan Hasil Olahan (Izin Usaha Tetap)

No	Badan Usaha	Komoditas Usaha	Kapasitas Disain
1	PT Patra SK	BBM	25.000 barel/hari
2	PT Tawu Inti Bati	BBM	48000 ton/tahun (Pelumas Bekas)
3	PT Petrogas Jatim Utama	BBM	500 ton/bulan (SludgeOil)
4	PT Tri Putri Atari	BBM	120 KL/hari (Pelumas Bekas)
5	PT Isano Lopo Industri	BBM	2500 KL/tahun (Pelumas Bekas)
6	PT Laguna Industri Nusantara	BBM	1500 KL/bulan (Pelumas Bekas)
7	PT Primergy Solution	BBM	2300 KL/bulan Pelumas Bekas
8	PT BSSTEC	BBM	12000 ton/tahun

No	Badan Usaha	Komoditas Usaha	Kapasitas Disain
9	PT Mega Green Technology	BBM	1626 KL/month (Pelumas Bekas, Sludge & Slope Oil)
10	PT Metro Abadi Raya	BBM	2400 KL/month (Pelumas Bekas)
11	PT Berdikari Jaya Bersama	BBM	1200 KL/bulan (Pelumas Bekas)
12	PT Eminens Resources Indonesia	BBM	660 KL/month (Sludge Oil)
13.	PT Berkat Restu Guru	BBM	1200 Ton/bulan
14.	PT Beringin Petroleum Energy	BBM	480 KL
15.	PT Sinar Surya Maju Sentosa	BBM	2145 KL/month (Pelumas Bekas) & 1378 KL/month (Sludge Oil)

Tabel 25. Badan Usaha Pengolahan Hasil Olahan (Izin Usaha Sementara)

No	Badan Usaha	Komoditas Usaha	Kapasitas Kilang
1.	PT Sejahtera Bersama Energi	BBM	3520 KL/month (Sludge Oil)
2.	PT Bina Samudera Sejahtera	BBM	1100 KL/month
3.	PT Dewi Sri Lestari Energi	Propane dan Butane	8 ton/day
4.	PT Sumber Anugerah Utama	BBM	55 ton/hari
5.	PT Bumi Mandala Energi	BBM	800 KL/bulan
6.	Balikpapan Energy Services	BBM	10.000 KL

Mengingat tingginya kebutuhan Nasional atas BBM, Pemerintah berupaya mendorong pembangunan kilang baru di Indonesia. Sampai saat ini Pemerintah telah menyusun kebijakan dalam hal perkembangan kilang minyak di Indonesia antara lain sebagai berikut:

- Perpres Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak dalam Negeri.
- Kepmen ESDM Nomor 807 K/12/MEM/2016 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pembangunan dan Pengoperasian Kilang Minyak di Tuban, Provinsi Jawa Timur
- Kepmen ESDM Nomor 7935 K/10/MEM/2016 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pembangunan dan Pengoperasian Kilang Minyak di kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur
- Kepmen ESDM Nomor 1001 K/12/MEM/2016 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pengembangan dan Pengoperasian Kilang Minyak di kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

- Kepmen ESDM Nomor 1000 K/12/MEM/2016 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pengembangan dan Pengoperasian Kilang Minyak di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Timur

3.4.2 Kapasitas Terpasang Kilang LPG

Definisi LPG sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 adalah “gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri dari propana, butana, maupun campuran keduanya”. LPG dapat dihasilkan dari kilang minyak maupun kilang gas. Adapun angka realisasi kapasitas terpasang kilang LPG direkapitulasi oleh Ditjen Migas berdasarkan pada perijinan pengolahan LPG yang telah diterbitkan. Dalam penentuan targetnya, target PK 2017 untuk indikator kapasitas terpasang kilang LPG ditetapkan sebesar 4.74 Juta MT sedangkan dalam Rencana Strategis 2015-2019, target untuk indikator dimaksud pada tahun 2017 ditetapkan sebesar 4.64 Juta MT. Perbedaan ini disebabkan karena dalam perhitungan target Renstra 2015-2019, kilang yang tidak lagi beroperasi dan telah habis masa izin usaha pengolahan migasnya tidak dimasukkan dalam perhitungan. Namun demikian, pada saat penetapan target PK Ditjen Migas 2017, kilang yang tidak lagi beroperasi tetap dimasukkan dalam target total kapasitas kilang.

Tabel 26. Indikator Kinerja Utama Kapasitas Terpasang LPG

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Presentasi
Kapasitas terpasang kilang LPG	Juta MT	4.7	4.74	100.85%

Pada tahun 2017, realisasi kapasitas terpasang kilang LPG mencapai 4.74 Juta MT. Ini menyebabkan pencapaian indikator kinerja dimaksud mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dalam PK Ditjen Migas 2017 maupun target yang ditetapkan dalam Renstra 2015-2019. Kapasitas kilang LPG skema hulu dan hilir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 27. Kapasitas kilang LPG

Nama Badan Usaha	Lokasi	Kapasitas (Ton/hari)	Kapasitas (MTPA)
Kilang Minyak			
PT. Pertamina (Persero)	Dumai	185	68
PT. Pertamina (Persero)	Plaju	360	131
PT. Pertamina (Persero)	Cilacap	871	318
PT. Pertamina (Persero)	Balikpapan	250	91
PT. Pertamina (Persero)	Balongan	1500	548
Sub Total Kilang Minyak			1.156
Kilang Gas Skema Hulu			

Nama Badan Usaha	Lokasi	Kapasitas (Ton/hari)	Kapasitas (MTPA)
PT. Badak NGL	Bontang	2740	1.000
PT. Chevron *	T. Santan	247	90
PT. Petrogas *	Basin	38	14
PT. Petrochina	Jabung	1644	600
PT. Conoco Phillips *	Belanak	1439	525
PT. Saka Indonesia	Ujung Pangkah	310	113
Sub Total Kilang Gas Skema Hulu			2.342
Kilang Gas Skema Hilir			
PT. Pertamina (Persero) *	P. Brandan	120	44
PT. Maruta Bumi Prima *	Langkat	46,57	17
PT. Medco LPG Kaji *	Kaji	200	73
PT. Pertamina (Persero)	Mundu	101	37
PT. Titis Sampurna	Prabumulih	200	73
PT. Sumber Daya Kelola	Tugu Barat	19	7
PT. Bina Bangun Wibawa Mukti	Tambun	151	55
PT. Surya Esa Perkasa	Lembak	225	82
PT. Yudhistira Haka Perkasa *	Cilamaya	120	44
PT. Wahana Insannugraha *	Cemara	102	37
PT. Media Karya Sentosa Phase I *	Gresik	160	58
PT. Tuban LPG Indonesia	Tuban	480	175
PT. Yudistira Energi	Pondok Tengah	160	58
PT. Media Karya Sentosa Phase II	Gresik	230	84
PT. Gasuma Federal Indonesia	Tuban	71	26
PT. Pertasamtan Gas	Sungaigerong	710	259
PT. Sumber Daya Kelola	Losarang	11	3,8
PT. Arsynergy Resources	Gresik	300	109,5
Sub Total Kilang Gas Skema Hilir			1.242,3
Grand Total Kapasitas LPG			4.740,3

Catatan: * tidak beroperasi

Kapasitas kilang LPG skema hulu dan hilir tahun 2017 adalah sebesar 4,74 MMTPA, angka ini tidak mengalami perubahan dari tahun 2016. Namun demikian dari kapasitas sebesar 4,74 MMTPA yang beroperasi hanya sebesar 3,84 MMTPA. Hal ini disebabkan karena ada beberapa kilang skema hulu dan skema hilir yang tidak beroperasi pada tahun 2017. Sementara itu Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Sementara Pengolahan Gas Bumi yaitu PT. Bumi Jambi Energi pada tahun 2017 masih dalam tahap konstruksi

Kapasitas kilang LPG skema hulu dan LPG skema hilir dapat dilihat pada tabel berikut:

Kapasitas Kilang LPG (MMTPA)

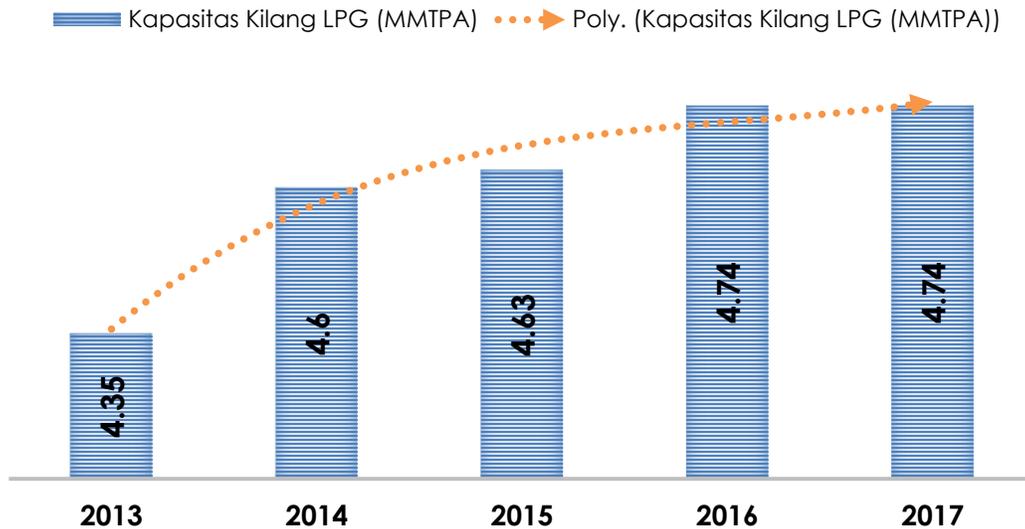


Diagram 51. Kapasitas kilang LPG tahun 2013 - 2017

Meskipun kapasitas kilang LPG nasional selama periode 2013-2017 mengalami peningkatan, namun kenaikan ini tidak diikuti oleh realisasi volume produksi LPG. Hal ini dapat terjadi karena faktor tidak beroperasinya beberapa kilang. Produksi LPG pada tahun 2017, misalnya, menurun dibandingkan tahun 2016, hal ini disebabkan karena ada beberapa kilang LPG skema hulu dan hilir yang tidak beroperasi pada tahun 2017. Tidak beroperasinya beberapa skema kilang pada akhirnya mempengaruhi komposisi produksi LPG berdasarkan kilang, meskipun selama tahun 2013-2016 produksi LPG paling banyak dihasilkan dari kilang skema hulu, meskipun jumlah LPG yang diproduksi oleh kilang minyak semakin meningkat selama periode 2013-2017.

Kapasitas Terpasang Kilang LPG (MT)

■ Kilang Minyak ■ Kilang Pola Hulu ■ Kilang Pola Hilir

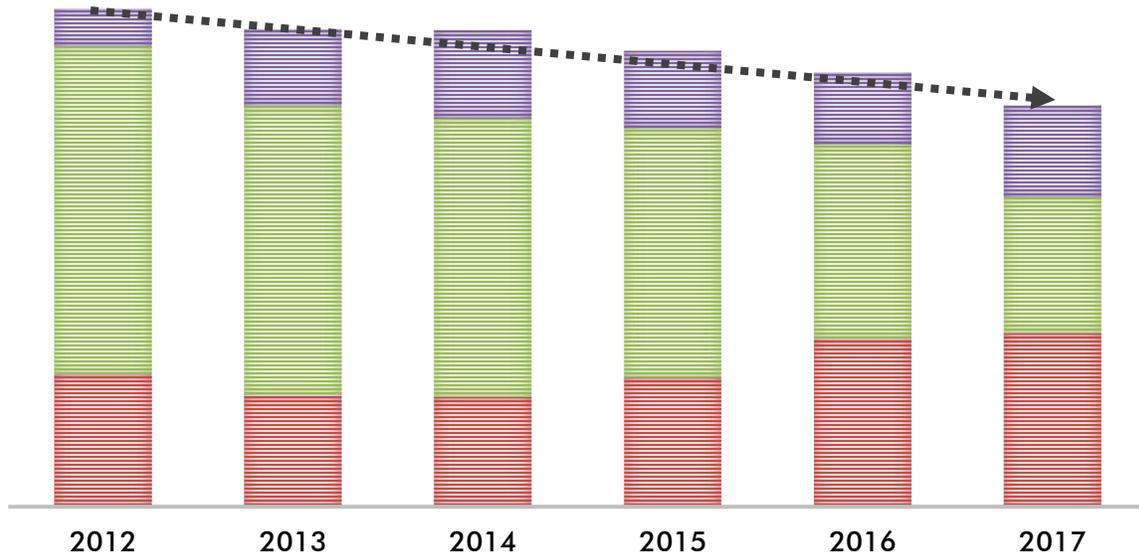


Diagram 52. Diagram Produksi LPG Tahun 2012 - 2017

Sejak Indonesia menjalankan program konversi minyak tanah ke LPG pada tahun 2007, konsumsi LPG dalam negeri melonjak drastis. Kebutuhan LPG untuk program tersebut pada tahun 2007 sebesar 0,033 juta Ton dan meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2017 berdasarkan data dari PT Pertamina (Persero) diperkirakan meningkat menjadi sebesar 7,11 juta Ton (PSO dan non PSO/industri). Hal ini berakibat target persen pemenuhan produksi LPG dari dalam negeri yang ditargetkan dapat menyuplai 50 % kebutuhan LPG dalam negeri namun diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2017 hanya tercapai sebesar 28,18 %. Selisih antara jumlah produksi dan kebutuhan dipenuhi dari impor, yang jumlahnya setiap tahun terus meningkat seiring berjalannya program konversi minyak tanah ke LPG.

Melihat statistik supply demand kebutuhan akan LPG dari tahun ke tahun, dimana peningkatan akan jumlah produksi tidak dapat mengimbangi peningkatan dari sisi konsumsi, sehingga pemenuhan kekurangannya harus dipenuhi dari impor. Tentunya dengan adanya impor ini mengakibatkan beban anggaran Pemerintah semakin besar dan dapat menimbulkan ketergantungan dari pihak luar. Melihat kondisi yang ada, maka dirasa Pemerintah perlu membangun infrastruktur pengolahan sehingga angka ketergantungan impor dapat ditekan dan ketahanan energi dapat terwujud, selain itu perlu membuat suatu

rumusan peraturan untuk meningkatkan minat investasi Badan Usaha untuk membangun kilang LPG.

Tabel 28. Perbandingan Produksi, Impor, dan Konsumsi LPG 2012 - 2016

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Impor (x 1000 Ton) *	2.573	3.299	3.604	4.308	4.512,4	5.358,8
Kilang Gas (x 1000 Ton)	1.823,5	1.827,8	1.831,7	1.631,6	1.410,2	1.137,8
Kilang Minyak (x 1000 Ton)	662	555,9	547,4	675,8	831,4	867,1
Konsumsi Total *(x 1000 Ton)	5058,5	5682,7	5982,7	6583,9	6680	7112,9

Melihat statistik supply demand kebutuhan akan LPG dari tahun ke tahun, dimana peningkatan akan jumlah produksi tidak dapat mengimbangi peningkatan dari sisi konsumsi, sehingga pemenuhan kekurangannya harus dipenuhi dari impor. Tentunya dengan adanya impor ini mengakibatkan beban anggaran Pemerintah semakin besar dan dapat menimbulkan ketergantungan dari pihak luar. Melihat kondisi yang ada, maka dirasa Pemerintah perlu membangun infrastruktur pengolahan sehingga angka ketergantungan impor dapat ditekan dan ketahanan energi dapat terwujud, selain itu perlu membuat suatu rumusan peraturan untuk meningkatkan minat investasi Badan Usaha untuk membangun kilang LPG.

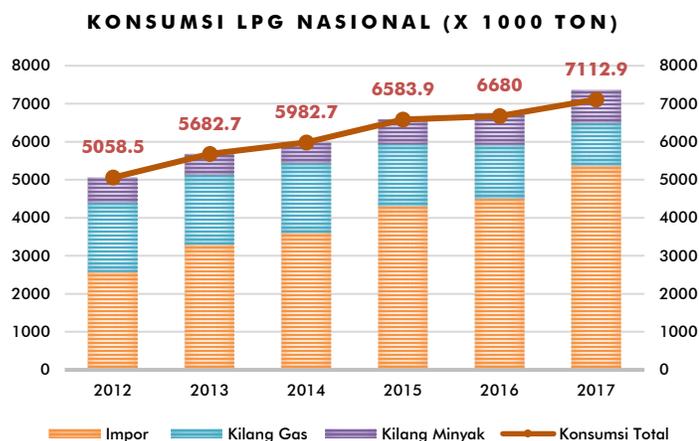


Diagram 53. Perbandingan produksi, impor, dan konsumsi LPG Tahun 2012 – 2017

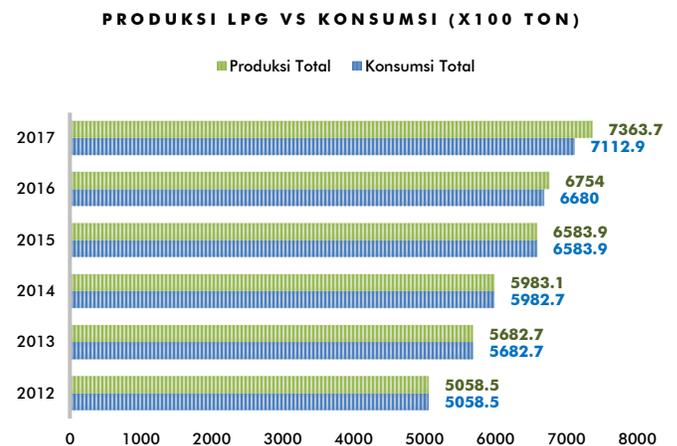


Diagram 54. Perbandingan produksi dan konsumsi LPG Tahun 2012 – 2017

3.4.3 Pembangunan jaringan gas kota

Tabel 29. Indikator Kinerja Pembangunan Jaringan Gas Kota 2017

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Presentasi
Pembangunan jaringan gas kota				
a) Jumlah wilayah dibangun jaringan gas kota	Lokasi	9	10	111.11%
b) Rumah tangga tersambung gas kota	SR	53700	49934	92.99%

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang mengamanatkan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi harus menjamin efisiensi dan efektifitas tersedianya minyak dan gas bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri, serta Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, maka dilakukan langkah-langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas melalui pembangunan sarana dan prasarana minyak dan gas bumi.

Dalam rangka mendukung program tersebut, Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi pada TA 2017 melakukan upaya yaitu dengan melaksanakan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga. Berdasarkan hasil evaluasi meliputi keberadaan jaringan gas eksisting dan sumber gasnya, pada tahun 2017 ini dibangun Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di 10 lokasi, yaitu: Kab. Musi Banyuasin (6.031 SR), Kab. Muara Enim (4.785 SR), Kab. PALI (5.375 SR), Kota Pekanbaru (3.270 SR), Kota Bandar Lampung (10.321 SR), Kota Bontang (8.000 SR), Kab. Mojokerto (5.101 SR), Kota Mojokerto (5.000 SR), Kota Samarinda (4.500 SR) dan Rusun PUPR Kemayoran (7.426 SR). Adapun progress pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran 2017 sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 30. Realisasi Pembangunan Jaringan Gas Kota 2017

No	Program/ Kegiatan/ Lokasi	Output	Nilai Kontrak Rp (Miliar)	Ralisasi s.d. Akhir Desember 2017		Keterangan
				FISIK (%)	KEU (%)	
A	JARGAS RUMAH TANGGA		607,177			
1	Kota Mojokerto	5.000 SR	47,78	100	100	
2	Kab. Mojokerto	5.101 SR	38,4	100	100	
3	Kota Pekanbaru	3.270 SR	27,1	100	100	
4	Rusun PUPR Kemayoran	7.426 SR	58,3	100	100	
5	Kab. Musi Banyuasin	6.031 SR	61,7	100	100	
6	Kab. Muara Enim	4.785 SR	67,6	100	100	
7	Kota Bandar Lampung	10.321 SR	125,2	100	100	
8	Kota Bontang	8.000 SR	91,4	70,04	100	Penyedia jasa mengajukan perpanjangan penyelesaian pekerjaan maksimal 90 hari

No	Program/ Kegiatan/ Lokasi	Output	Nilai Kontrak Rp (Miliar)	Ralisasi s.d. Akhir Desember 2017		Keterangan
				FISIK (%)	KEU (%)	
A	JARGAS RUMAH TANGGA		607,177			
						kalender dengan jaminan Bank Garansi. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan, maka jaminan Bank Garansi akan dicairkan.
9	Kota Samarinda	4.500 SR	42,8	17,204	15,88	Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. PPK akan melakukan tindakan penghentian atau pemutusan kontrak sesuai aturan yang berlaku
10	Kab. PALI	5.375 SR	46,8	63,378	26,71	

Kendala selama pelaksanaan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga antara lain:

a) Kendala Perizinan

Pusat :

1. Persinggungan dengan utilitas instansi lain :
2. Jalan Nasional (*crossing* dan sejajar) → Kementerian PUPR – BBPJN
3. Jalan Tol (*crossing* dan sejajar) → Kementerian PUPR – BPJT
4. Sungai (*crossing* dan sejajar) → Kementerian PUPR - BBWS
5. Jalur KAI (*crossing* dan sejajar) → Kementerian Perhubungan - Ditjen KA dan PT KAI)
6. Hutan → Kementerian LHK

Daerah :

1. UKL/UPL → Dinas Lingkungan Prov./Kota/Kab.
2. Penggunaan Jalan Provinsi/Kab./Kota (*crossing* dan sejajar) → Dinas PU
3. Penggunaan Taman → PTSP Prov./Kota/Kab.
4. Penggunaan Fasilitas Umum & Sosial → Walikota/Bupati

b) Kendala Sosial

Gangguan dari Kelompok Masyarakat tertentu dan Pungutan Liar

c) Kendala Teknis

1. Pada pengadaan dengan proses pelelangan umum, Memungkinkan masih terdapat resiko mendapatkan penyedia jasa yang kurang qualified sesuai kebutuhan.
2. Proses kalibrasi Gas Meter yang terhambat dikarenakan peralatan kalibrasi yang masih terbatas di Indonesia.

3.4.4 Pembangunan infrastruktur sarana bahan bakar gas

Tabel 31. Indikator kinerja pembangunan infrastruktur sarana bahan bakar gas 2017

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Presentasi
Pembangunan infrastruktur sarana bahan bakar gas	Lokasi	1	0	0.00%

Pada tahun 2017, Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tidak melaksanakan pembangunan infrastruktur sarana bahan bakar gas (SPBG). Pada awalnya, tahun 2017 Direktorat Jenderal Migas berencana untuk melaksanakan pembangunan SPBG yang dinyatakan putus kontrak pada tahun anggaran 2015. Adapun demikian, mengingat rencana pembangunan SPBG dimaksud membutuhkan serangkaian *review* yang melibatkan berbagai pihak yang membutuhkan waktu cukup panjang, maka waktu tersisa untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur menjadi terbatas. Keterbatasan waktu pelaksanaan pembangunan dimaksud dapat mengakibatkan tidak terselesainya pembangunan infrastruktur dimaksud dengan baik apabila rencana pembangunan SPBG sebagaimana rencana dilaksanakan sehingga pada akhirnya diputuskan untuk pembangunan SPBG yang dianggarkan dilaksanakan tahun 2017 dilanjutkan dengan dana Pertamina.

Adapun demikian, Pemerintah tetap menjaga komitmennya dalam meningkatkan penggunaan gas bumi dan melaksanakan konversi BBM ke bahan bakar gas di sektor transportasi di tahun 2017 melalui kegiatan pendistribusian konverter kit. Pada tahun 2017, Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi akan mendistribusikan konverter kit untuk kendaraan pada lokasi: Palembang, Prabumulih, Depok, Subang, Balikpapan, Cirebon, Indramayu, Jakarta, Bogor, Bandar Lampung, Batam, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Subang, Sukabumi, Purwakarta, Cilegon, Bandung. Dipilihnya daerah-daerah tersebut karena di daerah tersebut telah terdapat fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) eksisting yang telah dibangun oleh Pemerintah maupun BUMN/swasta.

Pelaksanaan Konversi BBM ke BBG untuk Kendaraan TA 2017 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 32. Distribusi Konverter Kit Untuk Kendaraan 2017

No	Program/ Kegiatan/ Lokasi	Output	Nilai Kontrak Rp (Miliar)	Realisasi s.d. Akhir Desember 2017	
				FISIK (%)	KEU (%)
B	KONKIT KENDARAAN		97,48		
1	Paket 1 (Palembang, Prabumulih, Depok, Subang)	1.500 Paket	30,9	100	100
2	Paket 2 (Balikpapan, Cirebon, Indramayu, Jakarta)	1.500 Paket	28,8	100	100
3	Paket 3 (Jakarta, Bogor, Lampung, Batam)	1.000 Paket	19,1	100	100
4	Paket 4 (Surabaya, Gresik, Sukabumi, Purwakarta, Cilegon, Bandung)	1.000 Paket	18,7	100	100

Kendala selama pelaksanaan Konversi BBM ke BBM untuk Kendaraan antara lain:

- 1) Kendaraan umum (taksi) di beberapa kota yang sebelumnya bersedia untuk dipasang konkit, berubah menjadi membatalkan pemasangan konkit tersebut
- 2) Kendaraan dinas yang masuk list beberapa tidak memenuhi kriteria utk dipasang
- 3) Perbedaan HS Code Konverter kit antara Bea Cukai dan Kemnperin, yang berakibat pada tertahannya peralatan converter kit di Pelabuhan masuk ke zona merah

3.4.5 Volume BBM subsidi (APBN 2016)

Target/kuota subsidi BBM yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2017 ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR. Adapun angka kuota yang diusulkan Pemerintah dimaksud dihitung berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi serta kebijakan pemerintah di tahun berikutnya. Terkait dengan hal ini, Pemerintah berharap subsidi BBM yang diberikan kepada rakyat tepat sasaran. Mengingat bahwa dalam pelaksanaannya capaian realisasi subsidi BBM dikatakan baik apabila realisasi BBM berada di bawah target yang ditetapkan dan tidak ada kelangkaan dalam distribusinya, maka perhitungan capaian kinerja subsidi BBM menggunakan

perhitungan *minimize* dimana semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

Realisasi penyaluran BBM diperoleh dari data Badan Usaha penugasan. Pada tahun 2017, penugasan penyaluran BBM diberikan kepada PT. Pertamina dan PT. AKR. Selanjutnya, data realisasi dimaksud diverifikasi oleh BPH Migas. Adapun realisasi subsidi BBM dapat terlihat pada table sebagai berikut:

Tabel 33. Indikator Kinerja Jumlah Volume BBM subsidi 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Terpantainya subsidi BBM dan LPG	1. Jumlah Volume BBM subsidi (Target APBNP 2017):	Ribu KL	16,11	14,952*	93%
	a. Premium	Ribu KL	-	-	-
	b. Minyak Tanah	Ribu KL	0,61	0,53	86%
	c. Solar	Ribu KL	15,50	14,42	93%

*Realisasi unverified

Untuk mewujudkan subsidi BBM dan LPG yang lebih tepat sasaran dan dengan pertimbangan perkembangan kebutuhan nasional atas BBM, Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Desember 2014 menandatangani Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Jenis BBM yang diatur dalam Perpres ini terdiri dari jenis BBM tertentu, jenis BBM khusus penugasan dan jenis BBM umum. Berikut tabel realisasi jenis BBM tertentu terhadap kuota dari tahun 2011-2017:

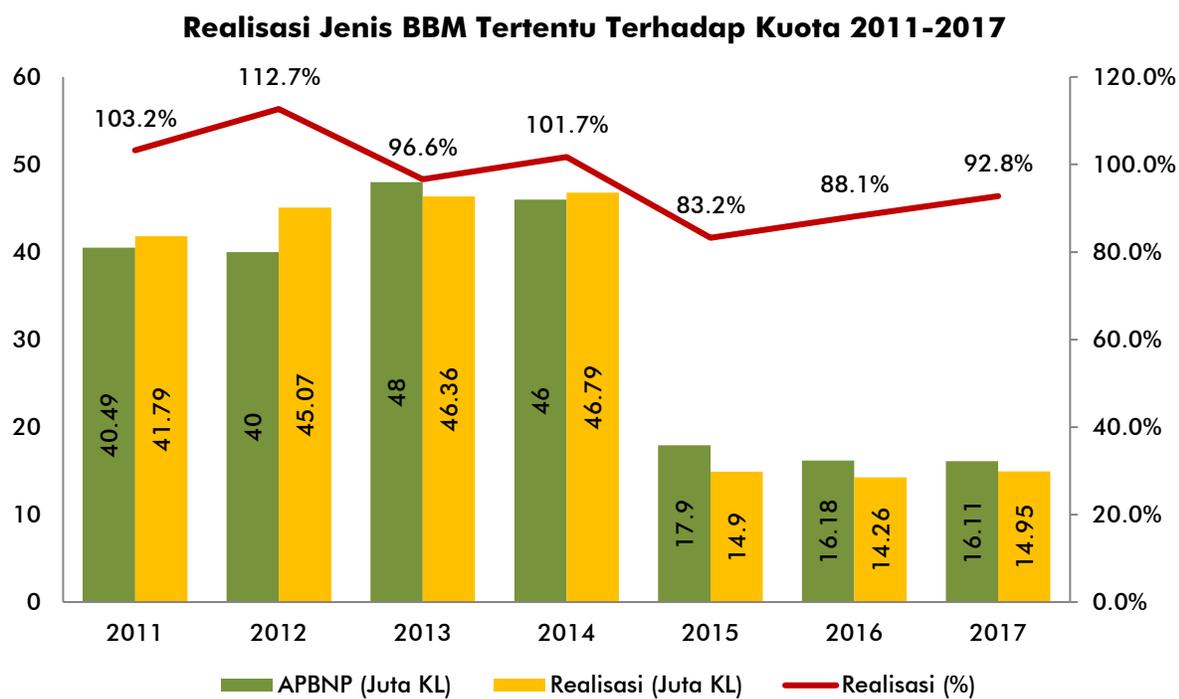


Diagram 55. Realisasi Jenis BBM Tertentu Terhadap Kuota 2011 – 2017. Diagram ini menjelaskan bahwa rerata capaian indikator ini lebih dari 83% dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja meskipun target dan volume realisasi berbeda setiap tahunnya.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi jenis BBM tertentu sejak tahun 2015 lebih rendah dibandingkan kuota yang ditetapkan APBN/APBNP. Ini tentunya merupakan prestasi tersendiri mengingat sasaran yang dituju adalah distribusi BBM dan LPG yang tepat sasaran. Dengan adanya distribusi tepat sasaran, maka diharapkan kegiatan penyediaan energi untuk rakyat akan menjadi lebih efisien. Adapun upaya pengurangan subsidi BBM yang telah dilakukan oleh Pemerintah sampai saat ini antara lain adalah:

- 1) Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 Kg
- 2) Konversi BBM ke BBG
- 3) Pembangunan Jaringan Gas Kota
- 4) Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, perubahan menjadi:
 - a. Subsidi bensin dihapus
 - b. Minyak Solar (Gas oil) diberikan subsidi tetap Rp 500/liter dengan harga jual eceran berfluktuasi
 - c. Harga minyak tanah (kerosine) sebesar Rp 2500/liter dengan besaran subsidi berfluktuasi seperti yang berlaku sebelumnya

3.4.6 Volume LPG Bersubsidi (APBN 2016)

Sama halnya dengan indikator subsidi BBM, perhitungan capaian kinerja subsidi LPG 3 Kg juga menggunakan perhitungan *minimize* mengingat ketepatan distribusi merupakan kunci penting dalam keberhasilan pencapaian indikator kinerja dimaksud. Dengan kata lain, distribusi BBM dan LPG bersubsidi dikatakan baik jika realisasi berada di bawah kuota yang ditetapkan selama tidak terjadi kelangkaan BBM atau LPG 3 Kg di masyarakat sasaran subsidi energi. Terkait dengan hal ini semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik. Adapun realisasi subsidi LPG 3 Kg dapat terlihat pada table sebagai berikut:

Tabel 34. Indikator Kinerja Jumlah Volume LPG subsidi 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Terpantaunya subsidi BBM dan LPG	1. Jumlah Volume LPG subsidi (Target APBN 2017):	Juta Kg	7,096	6,305	89%
	2. Jumlah volume LPG bersubsidi (Target APBNP 2017)	Juta Kg	6,199	6,305	102%

**unverified*

Realisasi penyaluran LPG 3 Kg diperoleh dari data Pertamina dan diverifikasi oleh Ditjen Migas. Berikut tabel realisasi LPG Tabung 3 Kg terhadap kuota APBN-P dari tahun 2011-2017:

Realisasi LPG Tabung 3 Kg terhadap kuota APBN-P (Juta MT)

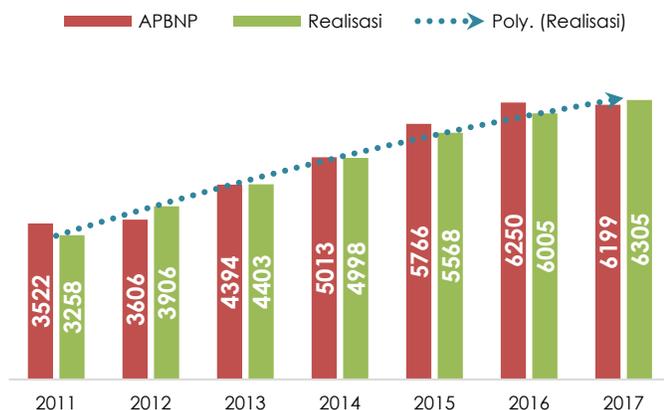


Diagram 56. Realisasi LPG tabung 3 kg terhadap kuota APBNP. Dari diagram ini terlihat bahwa kuota Lpg 3 kg dan realisasi distribusi LPG 3 Kg setiap tahun meningkat selama periode 2011-2017.

Realisasi LPG 3 KG Berdasarkan Perjanjian Kinerja

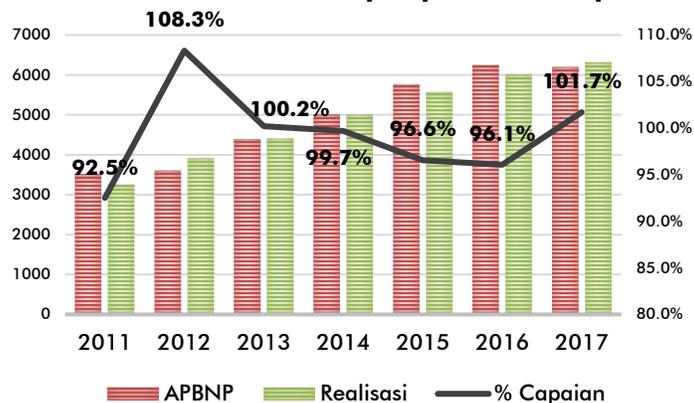


Diagram 57. Realisasi LPG tabung 3 kg Berdasarkan Perjanjian Kinerja 2011-2017. Terlihat bahwa realisasi pencapaian LPG 3 kg cenderung fluktuatif. Adapun pencapaian tahun 2017 cukup bandung dibandingkan pencapaian selama 5 tahun terakhir

Namun demikian, kuota LPG 3 Kg setiap tahunnya mengalami peningkatan mengikuti penambahan sasaran distribusi subsidi LPG 3 Kg yang disebabkan oleh:

- Peningkatan pertambahan penduduk
- Peningkatan Pertumbuhan ekonomi
- Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan LPG 3 kg
- Peningkatan jumlah usaha mikro
- Perubahan budaya masyarakat dalam rangka penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan.
- Konversi Minyak Tanah ke LPG untuk Rumah Tangga dan Usaha Mikro
- Konversi BBM ke LPG untuk Nelayan Kecil

Dalam Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg, Badan Usaha Penugasan (Pertamina) telah melaksanakan sistem Monitoring LPG 3 Kg (SIMOL3K) untuk memonitor pendistribusian LPG hingga ke tingkat Sub Penyalur (Pangkalan). Dengan SIMOL3K tersebut pendistribusian LPG dapat terpantau secara on-line untuk meminimalisir penyalahgunaan LPG Tabung 3 Kg.

Tabel 35. Target Tahun 2018

2018	Satuan	Target
Volume BBM Subsidi (APBN 2018)	Juta KL	16,11
Volume LPG Subsidi (APBN 2018)	Juta MT	6,450

Strategi untuk mencapai target tahun 2018

Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg dilaksanakan dengan terlebih dahulu memberikan kuota dimasing-masing Kabupaten/kota diseluruh Provinsi wilayah konversi.

PT. Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha yang mendapatkan penugasan pendistribusian LPG tabung 3 Kg dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral membagikan kuota LPG Tabung 3 Kg ke masing-masing Agen (penyalur) tiap bulan selama 1 tahun.

Pendistribusian BBM Bersubsidi dilaksanakan oleh Badan Usaha yang mendapatkan penugasan dari BPH Migas dan untuk pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi dilakukan oleh BPH Migas.

3.5 Mengoptimalkan penerimaan negara dari sub sektor migas

Jumlah penerimaan negara sub sektor migas diperoleh dari hasil penjumlahan penerimaan pajak penghasilan, penerimaan bukan pajak dan penerimaan lainnya dari minyak bumi. Penerimaan pajak penghasilan migas merupakan kewajiban pajak penghasilan yang disetorkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, penerimaan bukan pajak migas merupakan bagian Negara yang diperoleh berdasarkan persentase bagi hasil migas antara pemerintah dan kontraktor, sedangkan penerimaan lainnya dari minyak bumi merupakan penerimaan bersih dari Domestic Market Obligation (DMO) dan Bonus Production KKKS.

Tabel 36. Indikator Kinerja Jumlah realisasi penerimaan negara dari sub sektor migas terhadap target APBN

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Mengoptimalkan penerimaan negara dari sub sektor migas	13	Jumlah realisasi penerimaan negara dari sub sektor migas terhadap target APBN	Rp. Triliun	105,45	138.007	130.87%

Pada tahun 2017, realisasi penerimaan sub sector migas mencapai 138 triliun rupiah. Ini menjadikan pencapaian indikator kinerja penerimaan negara sub sector migas mencapai 130.87% dari target APBN yang ditetapkan sebesar 105.45 triliun rupiah. Di tahun 2017, jumlah realisasi penerimaan negara sub sector migas paling banyak diperoleh dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) SDA dengan total realisasi sebanyak 82.5 miliar rupiah.

Realisasi Penerimaan Negara Dari Sub Sektor Migas (Rp. Miliar)

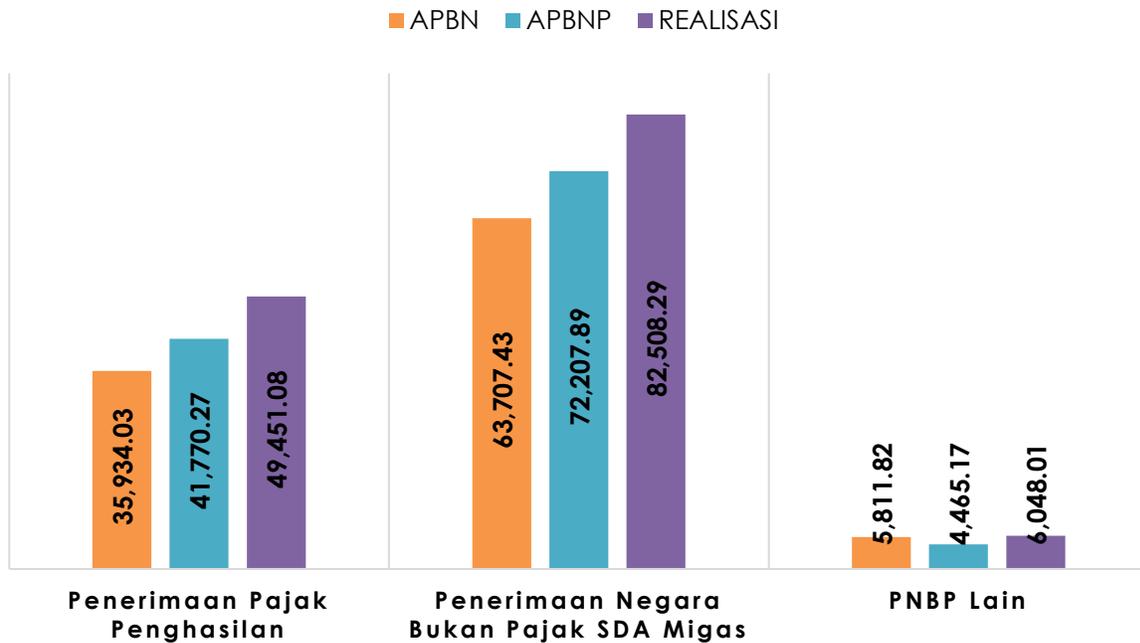


Diagram 58. Komposisi realisasi penerimaan negara sub sektor migas dibandingkan dengan target APBN dan APBNP. Terlihat bahwa secara keseluruhan, realisasi penerimaan negara per komposisi lebih besar dari target yang telah ditetapkan dalam APBN dan APBNP.

Besaran realisasi Penerimaan negara subsektor migas dipengaruhi oleh realisasi lifting migas, harga minyak mentah Indonesia (ICP), *Cost Recovery* dan nilai tukar rupiah (kurs) terhadap US\$. Hal ini dapat terlihat pada diagram di bawah dimana penerimaan negara sub sector migas terindikasi sangat elastis terhadap harga minyak mentah Indonesia. ICP yang rendah cenderung diikuti dengan rendahnya penerimaan negara sub sector migas dan demikian sebaliknya. Hal ini menjadikan pencapaian indikator kinerja penerimaan negara sub sector migas sangat bergantung pada dinamika harga minyak mentah Indonesia dan dunia, mengingat harga ICP cenderung mengikuti dengan harga minyak mentah dunia, WTI dan Brent.

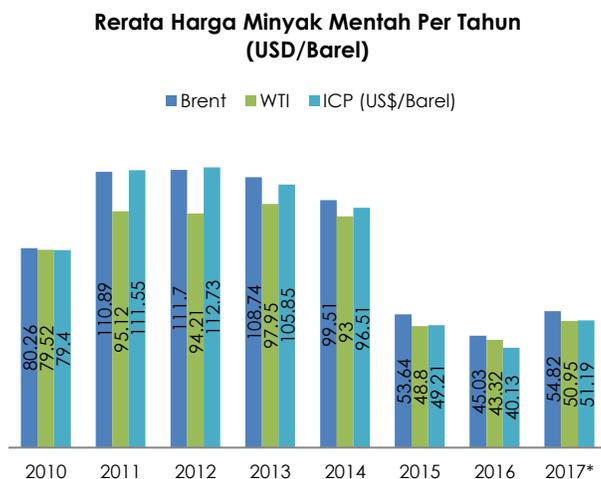
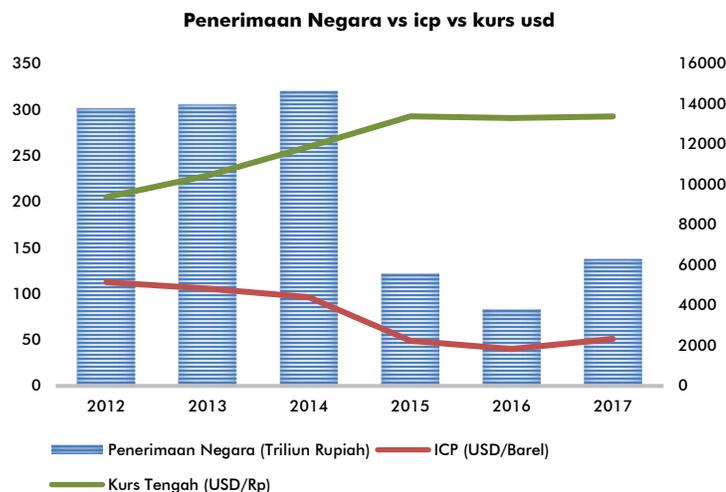


Diagram 59. Diagram penerimaan negara vs ICP VS Kurs USD. Diagram ini menunjukkan bahwa kurva penerimaan negara sub sektor migas elastis kurva terhadap ICP namun tidak terhadap kurs USD

Diagram 60. Diagram perbandingan rerata harga ICP, WTI dan Brent. Diagram ini menunjukkan bahwa rerata harga ICP per tahun hamper sama dengan rerata harga Brent dan WTI

Meskipun pencapaian indikator penerimaan negara tahun 2017 telah melebihi target yang telah ditetapkan dalam APBN 2017, namun demikian pencapaian penerimaan negara tahun 2017 masih berada dibawah target rencana jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Migas 2015-2019. Hal ini dikarenakan rata-rata harga minyak mentah dunia di tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan harga minyak di tahun 2014 ketika Renstra Ditjen Migas dimaksud disusun. Akibatnya, prognosa penerimaan negara 2015-2019 yang disusun pada tahun 2014 masih tinggi mengingat perhitungan menggunakan harga minyak dunia sebelum tahun 2015.

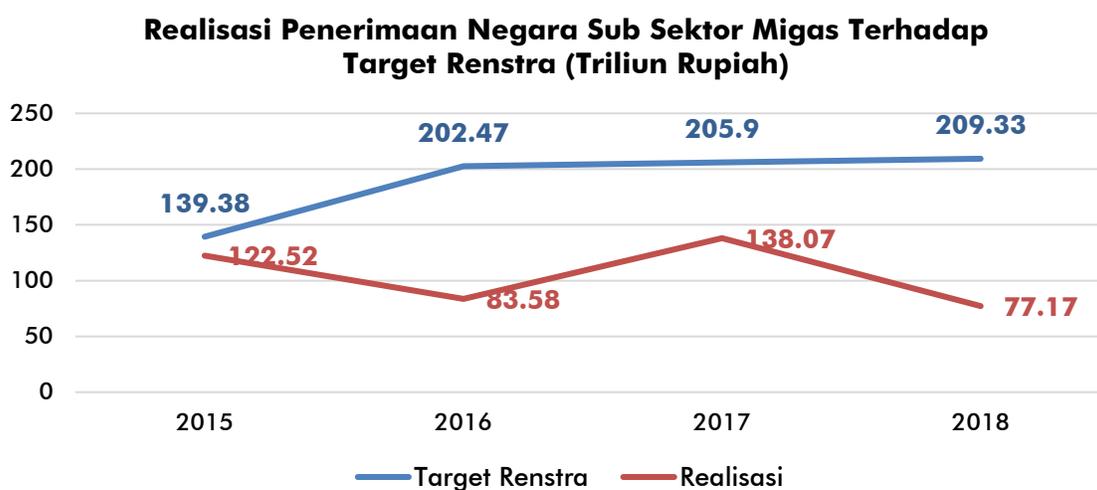


Diagram 61. Diagram realisasi penerimaan negara sub sektor migas terhadap target Renstra Ditjen Migas 2015-2019

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk dapat mencapai realisasi sebagaimana ditetapkan dalam target antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 37. Kebijakan Teknis Pendapatan SDA Migas (Berdasarkan Nota Keuangan dan RAPBN 2018)

No.	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1.	<p>Pencapaian target lifting migas tahun 2018 yaitu minyak sebesar 771-815 MBOPD dan gas sebesar 1.194-1.235 MBOPED akan didukung dengan melakukan program utama pengembangan wilayah kerja, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Program pengeboran pengembangan sumur yang meliputi > 200 sumur. b. Program work over (kerja ulang) sumur-sumur tua yang meliputi > 850 sumur. c. Program maintenance (pemeliharaan) sumur-sumur produksi yang meliputi > 50.000 kegiatan.
2.	<p>Pemenuhan rencana onstream 9 (Sembilan) proyek baru dengan total investasi capital sebesar USD 4,2 miliar, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 2 proyek baru pengembangan minyak bumi. b. 2 proyek baru pengembangan gas bumi. c. 5 proyek baru pengembangan minyak dan gas bumi. <p>Proyek terbesar yang akan mencapai full onstream pada tahun 2018 adalah Muara Bakau untuk Lapangan Jangkrik dan Jangkrik North East dengan perkiraan total investasi sebesar USD 2,7 miliar.</p>
3.	<p>Pelaksanaan monitoring secara intensif terhadap 9 proyek pengembangan lapangan onstream di tahun 2018, dengan perkiraan kontribusi sekitar 29,81 MMBBL (82 MBOPD) dan 1.731BSCF (MMSCFD).</p>
4.	<p>Peningkatan lifting migas tahun 2018 melalui upaya optimasi lapangan existing yang dilakukan dengan penerapan teknologi terkini dan tepat guna.</p>
5.	<p>Penerapan Production (PSC) dengan skema gross split yang akan mengganti PSC dengan mekanisme Cost Recovery. Penerapan PSC dengan skema gross split tersebut terutama akan diterapkan untuk pengembangan lapangan-lapangan migas yang telah mengalami terminasi. Pada tahun 2018 terdapat kurang lebih 8 wilayah kerja yang akan mengalami terminasi.</p>

3.6 Terwujudnya lindung lingkungan keselamatan operasi dan usaha penunjang migas

3.6.1 Jumlah Perusahaan yang dibina untuk melaksanakan kaidah keteknikan yang baik

Tabel 38. Indikator Kinerja Jumlah perusahaan yang dibina untuk melaksanakan kaidah keteknikan yang baik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2017	% Capaian
Terwujudnya lingkungan keselamatan operasi dan usaha penunjang migas	Jumlah perusahaan yang dibina untuk melaksanakan kaidah keteknikan yang baik	Perusahaan	45	45	100

Rantai bisnis minyak dan gas bumi yang dimulai dari kegiatan eksplorasi dan produksi, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan penjualan minyak dan gas bumi mempunyai risiko kecelakaan dan kegagalan yang cukup tinggi. Terjadinya kecelakaan dan kegagalan dalam kegiatan minyak dan gas bumi menyebabkan timbulnya eksternalitas berupa pencemaran lingkungan, kerugian harta benda dan juga nyawa manusia. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh rantai kegiatan minyak dan gas bumi berjalan dengan aman, dan ramah lingkungan.

Untuk mencapai tujuan kegiatan migas yang aman dan ramah lingkungan dilakukan melalui pengaturan dengan regulasi teknis agar perusahaan perusahaan maupun bentuk usaha tetap menerapkan kaidah keteknikan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang Undang No, 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Penerapan kaidah keteknikan yang baik adalah penerapan metoda rekayasa keteknikan yang telah terbukti, praktek-praktek, prosedur yang diterima secara luas, efisien dan memenuhi regulasi yang ada. Penerapan kaidah keteknikan yang baik dalam industri minyak dan gas bumi yang dijadikan tolok ukur adalah:

- 1) Dampak terhadap sumber daya dan lingkungan seperti program inovatif penurunan emisi melalui manajemen yang baik, substitusi bahan berbahaya, perawatan peralatan yang lebih baik
- 2) Pencegahan terbuangnya sumber daya, antara lain pemanfaatan gas suar bakar
- 3) Identifikasi risiko, mitigasi risiko dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan dampak
- 4) Pemenuhan kewajiban pelaporan; kecelakaan, tumpahan minyak, pemakaian bahan kimia dan produksi limbah dan baku mutu emisi dan limbah.

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan kaidah keteknikan yang baik sebanyak 45 Badan usaha atau Bentuk usaha tetap dari target yang ditetapkan sebanyak 45 perusahaan atau tercapai 100%. Jika dibandingkan dengan capaian sejak tahun 2014, capaian ini terus meningkat dari tahun ke tahun.

Jumlah Perusahaan yang Dibina untuk Melaksanakan Kaidah Keteknikan yang Baik

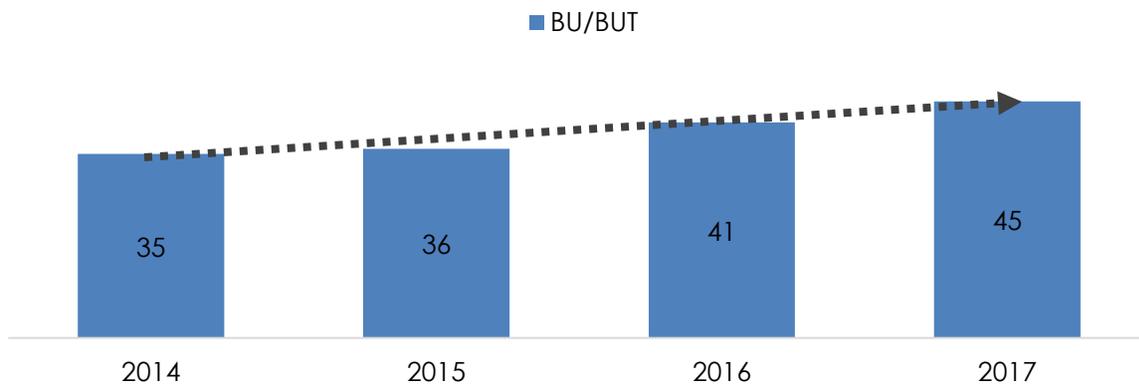


Diagram 62. Diagram jumlah perusahaan yang dibina untuk melaksanakan kaidah keteknikan yang baik. Dari diagram ini terlihat bahwa rata-rata jumlah perusahaan yang dibina meningkat setiap tahunnya.

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan implementasi kaidah keteknikan yang baik dalam industri minyak dan gas bumi didasarkan pada peraturan yang berlaku, antara lain:

- a. Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- b. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai.
- c. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1979 tentang Pengawasan Pelaksanaan Pemurnian dan Pengolahan Migas.
- d. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan.
- e. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas.
- f. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas.
- g. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- h. Mijjn Politie Reglement No. 341 tahun 1930 tentang Peraturan Kepolisian Pertambangan.
- i. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 04/P/M/Pertamb/1973 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Perairan dalam Kegiatan Eksplorasi dan atau Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.
- j. Peraturan Menteri No. 06.P/0746/M.PE/1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang Dipergunakan dalam Pertambangan Migas.
- k. Permen PE No. 02.P/075/M.PE/1992 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas.
- l. Permen LH No. 05 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- m. Permen ESDM No. 31 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

- n. Permen ESDM No. 38 Tahun 2017 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Untuk meningkatkan efektifitas pemenuhan kaidah keteknikan yang baik dilakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Penyelenggaraan pemeriksaan dan pembinaan keteknikan dan keselamatan lingkungan migas dengan melakukan pemeriksaan atau inspeksi rutin dan insidental;
2. Koordinasi kinerja keteknikan dan keselamatan lingkungan pada kegiatan kegiatan SPBU, SPBE dan SPPBE Kota Manado
3. Penyelenggaraan pembinaan pemanfaatan gas suar bakar kepada BU/BUT sebagai wadah berbagi pengetahuan dan informasi tentang pemanfaatan gas suar bakar dan upaya peningkatan pemanfaatan gas suar bakar. Pada tahun 2017 dilakukan program pengurangan gas suar melalui fasilitasi agar gas suar bakar dapat dimanfaatkan dengan total volume yang dimanfaatkan sebesar 260.913 MMSCFD dari 29 Perusahaan Hulu dan 3 Perusahaan Hilir.
4. Upaya dalam penerapan kaidah keteknikan lainnya di tahun 2017, juga melakukan Inventarisasi Emisi dari Sumber Tidak Bergerak (Fugitive) dan Inventarisasi Merkuri Pada Kegiatan Usaha Migas. Kegiatan ini bermanfaat bagi pelaku kegiatan usaha minyak dan gas bumi dalam mengidentifikasi dan memperbaiki fasilitas operasi apabila terjadi kebocoran emisi fugitive atau adanya kandungan merkuri pada fluida produksi sehingga dicapainya operasi kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang lebih aman, andal dan akrab lingkungan.

3.6.2 Prosentase penurunan jumlah kecelakaan fatal pada operasi kegiatan hulu dan hilir migas

3.6.2.1 Prosentase penurunan jumlah kecelakaan fatal pada operasi kegiatan hulu migas

Tabel 39. Indikator Kinerja Jumlah perusahaan hulu migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan fatal

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2017	% Capaian
Terwujudnya lindung lingkungan, keselamatan operasi dan usaha penunjang migas	Jumlah perusahaan hulu migas yang kegiatannya tidak operasinya tidak	Perusahaan	90	92	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2017	% Capaian
	terjadi kecelakaan fatal				

Jumlah perusahaan yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan fatal

Kegiatan operasi hulu migas merupakan kegiatan yang tinggi resiko, biaya, dan teknologi. Kegiatan di sektor ini harus senantiasa diawasi dan dibina agar tidak menimbulkan kerugian yang besar, baik kerugian terhadap para pekerja, masyarakat umum, asset, ataupun lingkungan. Berbagai macam code dan standar serta peraturan telah diterbitkan berkaitan tentang kegiatan ini untuk mencapai kegiatan operasi hulu migas yang aman tanpa kecelakaan. Keselamatan adalah faktor utama yang harus mengilhami kegiatan operasi hulu migas.

Berdasarkan surat edaran Direktur Teknik Pertambangan Migas selaku Kepala Inspeksi Tambang Migas tanggal 25 Oktober 1996, terdapat empat klasifikasi kecelakaan tambang yaitu ringan, sedang, berat, dan fatal. Statistik kecelakaan operasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi tahun 2012 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada diagram berikut:

Statistik Kecelakaan Kerja Kegiatan Hulu Migas Tahun 2012 - 2017

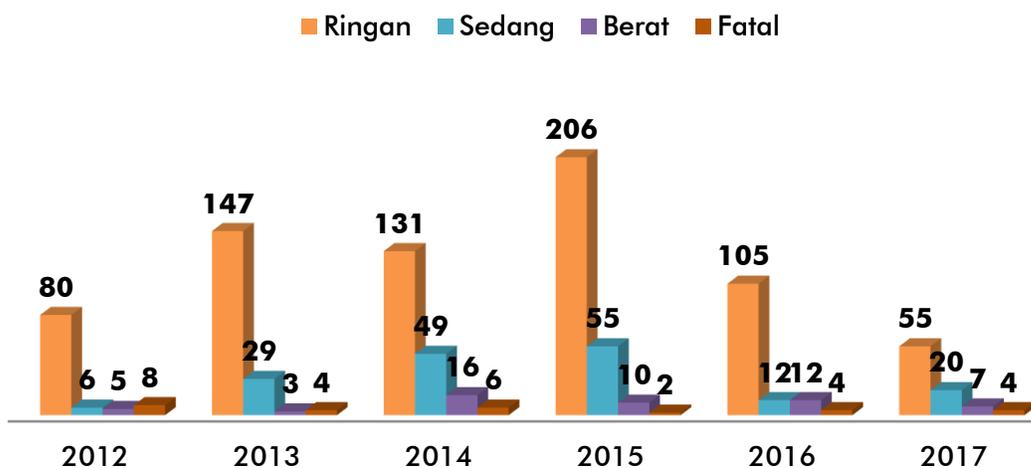


Diagram 63. Kecelakaan Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 2012 – 2017.

Kecelakaan ringan tambang terjadi secara fluktuatif setiap tahunnya. Kecelakaan ringan adalah kecelakaan yang hanya mengakibatkan luka ringan tanpa menyebabkan kehilangan hari kerja sehingga kecelakaan ringan tidak dihitung sebagai kecelakaan tambang. Kecelakaan ringan pada tahun 2017 terjadi sebanyak 55 kali. Terjadi penurunan jumlah kecelakaan ringan pada tahun 2017 dari tahun sebelumnya yaitu dari 105 menjadi 55 kali kecelakaan.

Kecelakaan sedang merupakan kecelakaan kerja pada kegiatan usaha hulu migas yang mengakibatkan pekerja kehilangan hari kerja kurang dari 21 hari kerja. Kecelakaan ringan pada tahun 2017 terjadi sebanyak 20 kecelakaan, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 12 kecelakaan.

Kecelakaan berat merupakan kecelakaan kerja pada kegiatan usaha hulu migas yang mengakibatkan cacat permanen atau kehilangan hari kerja lebih dari 21 hari. Jumlah kecelakaan kerja berat tambang pada 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu dari 12 kecelakaan menjadi 7 kecelakaan berat tambang.

Kecelakaan fatal merupakan kecelakaan kerja pada kegiatan usaha hulu migas yang mengakibatkan nyawa pekerja ataupun masyarakat meninggal. Insiden kecelakaan fatal tambang pada tahun 2017 sebanyak 4 kecelakaan. Untuk itu harus dilakukan pengawasan terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Migas secara berkelanjutan untuk menekan angka kecelakaan kerja.

Disamping itu, terdapat 92 perusahaan hulu migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan fatal dari 112 perusahaan hulu yang melapor setiap bulannya. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada kegiatan usaha hulu migas perlu diterapkan lebih optimal.

Untuk terus dapat menurunkan angka kecelakaan perlu ditingkatkan beberapa faktor, sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan di kegiatan hulu migas.
- 2) Meningkatkan pemahaman BU/BUT terhadap tanggung jawab keselamatan kerja.
- 3) Meningkatkan pemahaman pekerja terhadap aspek keselamatan kerja dan bahaya di lingkungan kerja.
- 4) Menambah jumlah pegawai migas untuk dapat langsung melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kontraktor di kegiatan hulu migas.

Pada dasarnya kecelakaan merupakan kejadian yang tidak diharapkan dan direncanakan. Diharapkan kecelakaan sedapat mungkin tidak terjadi sehingga dilakukan upaya-upaya pencegahan dari segi pekerja dan umum, serta peralatan dan instalasi yang digunakan pada kegiatan usaha hulu migas.

Upaya-upaya dan strategi yang dilakukan untuk menghindari kecelakaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan keselamatan pada usaha hulu migas melalui inspeksi rutin dan insidental ke lapangan mengenai aspek keselamatan pekerja dan umum serta peralatan dan instalasi.
- 2) Melakukan kegiatan pembinaan kepada para Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik melalui pertemuan, forum komunikasi ataupun rapat.
- 3) Menyusun pedoman atau prosedur kerja pemeriksaan teknis instalasi dan sistem alat ukur.
- 4) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada BU.
- 5) Melakukan kegiatan bimbingan teknis kepada para *stakeholders* migas

3.6.2.2 Prosentase penurunan jumlah kecelakaan fatal pada operasi kegiatan hilir migas

Tabel 40. Indikator Prosentase penurunan jumlah kecelakaan fatal pada operasi kegiatan hilir migas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian
1	Jumlah perusahaan yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan kerja (<i>zero accident</i>) dan kegagalan operasi (<i>unplanned shutdown</i>) Hilir	Perusahaan	180	180
2	Perusahaan Hilir yang memiliki SMKMM dengan rating dengan nilai diatas 80	Perusahaan	18	18

Kegiatan usaha migas terdiri atas kegiatan usaha hulu dan hilir migas. Kegiatan hilir migas terdiri dari pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan niaga migas. Kegiatan migas merupakan kegiatan yang sangat terkait erat dengan kelangsungan perekonomian suatu daerah, kota ataupun Negara. Karena itu maka diperlukan pembinaan dan pengawasan aspek keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pelaksanaan kegiatan usaha migas.

Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengamanatkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilakukan oleh Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Inspeksi yang dibantu oleh para Inspektur Migas. Mengingat kompleksnya dan semakin berkembangnya kegiatan usaha migas maka diperlukan pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi, sehingga diharapkan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dapat beroperasi dengan aman, handal, efektif, efisien dan aman terhadap lingkungan.

Sepanjang tahun 2017, 180 badan usaha hilir migas yang dilakukan pengawasan oleh Ditjen Migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan kerja, sehingga capaian adalah 100%.

Pada tahun 2017, Perusahaan Hilir yang memiliki SMK dengan rating dengan nilai diatas 80 sebanyak 18 perusahaan

Upaya-upaya dan strategi tahun 2017 yang dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah sebagai berikut:

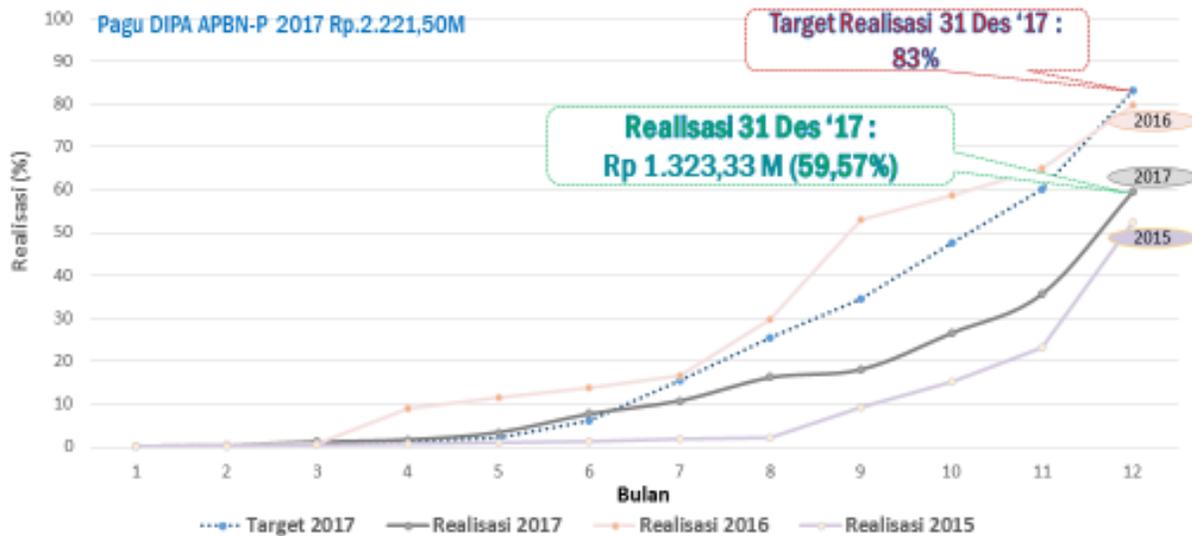
1. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan keselamatan pada usaha migas melalui inspeksi rutin dan inspeksi insidental ke lapangan mengenai aspek keselamatan pekerja dan umum serta peralatan dan instalasi;
2. Melakukan kegiatan pembinaan kepada para Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik melalui pertemuan, forum komunikasi ataupun rapat, terutama untuk mengamankan kompetensi tenaga kerja outsourcing dan mengadakan pengawasan yang ketat terhadap keselamatan tenaga kerja outsourcing;
3. Melaksanakan Forum Komunikasi Migas sebagai wadah pertemuan para pemangku kepentingan di bidang Migas.
4. Penerbitan Peraturan Menteri terkait Pemeriksaan Keselamatan.
5. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada Badan Usaha Migas;
6. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Badan Usaha Migas; dan
7. Membentuk dan mengoptimalkan kegiatan Tim Independen Pengendalian Keselamatan Migas yang telah berjalan dalam hal memberi masukan-masukan dalam penerapan sistem manajemen keselamatan migas pada Badan Usaha.

Beberapa capaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Subdirektorat Keselamatan Hilir Migas sepanjang tahun 2017 antara lain adalah sebagai berikut :

1. Simposium K3 Nasional tanggal 21-22 April 2017 di Serpong
2. Peresmian Asosiasi K3 Migas, Sosialisasi Pedoman Pemeriksaan Teknis Operasi dan Instalasi SPBU, dan Bedah Buku Manajemen Keselamatan Proses tanggal 22 April di Serpong
3. Grand Safety Talk RU VI Balongan tanggal 13 April 2017
4. Terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 38 Tahun 2017 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi pada tanggal 23 Mei 2017
5. Focus Grup Discussion dan Sosialisasi Permen 38/2017 kepada BU/BUT
6. Forum Komunikasi Keselamatan Migas pada tanggal 29 sd 30 Agustus 2017 di Palembang. Rangkaian acara meliputi Launching Asosiasi K3 Migas, Atlas Keselamatan Migas 2017 dan Malam Penghargaan Keselamatan Migas.
7. FGD SOP Migas Crisis Center tanggal 23 s.d 25 Oktober 2017 yang dilanjutkan dengan simulasi tanggap darurat pada tanggal 21 November 2017 di Jakarta.

3.7 Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2017 realisasi keuangan Ditjen Migas mencapai angka 59.57% dari pagu anggaran yang bersumber dari APBN berupa Rupiah Murni. Ditjen Migas pada tahun 2017 memperoleh pagu anggaran awal sebesar Rp.2.540.109.538.000, seiring dengan adanya kebijakan dalam TA 2017 berupa APBN-P 2017, pagu anggaran Ditjen Migas mengalami perubahan menjadi Rp. 2.221.504.736.000.



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
Target 2017	0.23	0.47	0.72	1.38	2.26	6.16	15.55	25.45	34.49	47.66	60.00	83.00
Realisasi 2017	0.14	0.45	1.19	1.69	3.40	7.71	10.77	16.21	18.08	26.58	35.74	59.57
Realisasi 2016	0.10	0.44	0.84	9.08	11.57	13.66	16.51	29.82	52.99	58.65	64.95	79.68
Realisasi 2015	0.05	0.17	0.33	0.70	0.91	1.17	1.72	2.12	9.23	15.08	23.12	52.44

Diagram 64. Target dan realisasi anggaran Ditjen Migas.

Seperti terlihat pada grafik diatas, realisasi anggaran Ditjen Migas Tahun 2017 hanya sebesar 59,57% dari pagu APBN-P. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target realisasi sebesar 83% yaitu:

1. Blokir Anggaran / Penolakan Buka Blokir Anggaran oleh DJA
2. Penolakan Reviu BPKP karena sudah masuk ranah hukum (Rp 62,52 M / 2,81%)
3. Keterlambatan material dari vendor
4. Kurangnya kemampuan kontraktor menyediakan material & tenaga kerja

Tabel 41. Realisasi Anggaran DIPA Ditjen Migas Tahun Anggaran 2017 per Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU AWAL (Rp)	PAGU APBN-P (Rp)	Realisasi s.d. Desember 2017(Rp)	(%)	SISA ANGGARAN (Rp)	(%)
1. BELANJA PEGAWAI	69.357.800.000	71.144.856.000	70.481.025.853	99,07	663.830.147	0,93
2. BELANJA BARANG	860.873.420.000	466.237.096.000	408.582.973.625	87,63	57.654.122.375	12,37
3. BELANJA MODAL	1.609.878.318.000	1.684.122.784.000	844.273.540.114	50,13	839.849.243.886	49,87
TOTAL	2.540.109.538.000	2.221.504.736.000	1.323.337.539.592	59.57	898.167.196.408	40.43

Secara umum, DIPA Ditjen Migas dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Tahun 2017, Belanja Pegawai Ditjen Migas merupakan Belanja dengan realisasi terbesar sekitar 99,07% dari jenis Belanja yang lain.

Terkait dengan realisasi anggaran yang terdapat pada unit eselon II di lingkungan Ditjen Migas, dapat terlihat seperti tabel dibawah ini:

Tabel 42. Realisasi Anggaran Per Unit Eselon II di Lingkungan Ditjen Migas

NAMA KEGIATAN	PAGU APBN-P	Realisasi	
		Rp	%
Penyiapan Kebijakan dan Peningkatan Kerja Sama Bilateral dan Multilateral Dalam Rangka Optimasi Penerimaan Negara dan Peningkatan Investasi Kegiatan Usaha Migas Serta Pemberdayaan Kapasitas Nasional	34.698.418.000	27.809.223.500	80,15
Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	64.598.035.000	37.330.560.514	57,59
Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	24.065.757.000	18.022.237.945	74,89
Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas	17.985.194.000	16.677.391.546	92,73
Dukungan Manajemen Teknis Ditjen Migas	206.547.845.000	188.938.921.496	91.47
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pengadaan Pembangunan, Pelaksanaan dan	187.360.9487.000	1.034.559.204.591	55,22

NAMA KEGIATAN	PAGU APBN-P	Realisasi	
		Rp	%
Pengawasan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	Pembangunan		
TOTAL	2.221.504.736.000	1.323.337.539.592	59,57

Realisasi anggaran tahun 2017 dengan capaian tertinggi ada pada kegiatan Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas dengan capaian 92,73% dan terendah ada pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pengadaan Pembangunan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Migas dengan capaian 55,22%.

Kinerja keuangan Ditjen Migas selama lima tahun terakhir mulai 2013-2017, menunjukkan jumlah pagu anggaran mengalami fluktuasi dengan tingkat realisasi anggaran cenderung naik dari tahun ke tahun. Dan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir capaian tertinggi terdapat pada tahun 2016 sebesar 79,67%.

Tabel 43. Realisasi DIPA Ditjen Migas Tahun Anggaran 2013-2017

TAHUN	2013	2014	2015	2016	2017
PAGU DIPA	2.142.806.734.000	3.591.089.749.000	4.249.582.356.000	2.244.110.487.000	2.221.504.736.000
REALISASI DIPA	1.620.054.395.870	1.371.155.369.520	2.228.189.291.430	1.787.963.439.496	1.323.337.539.592
% REALISASI	75,60	38,18	52,43	79,67	59,57

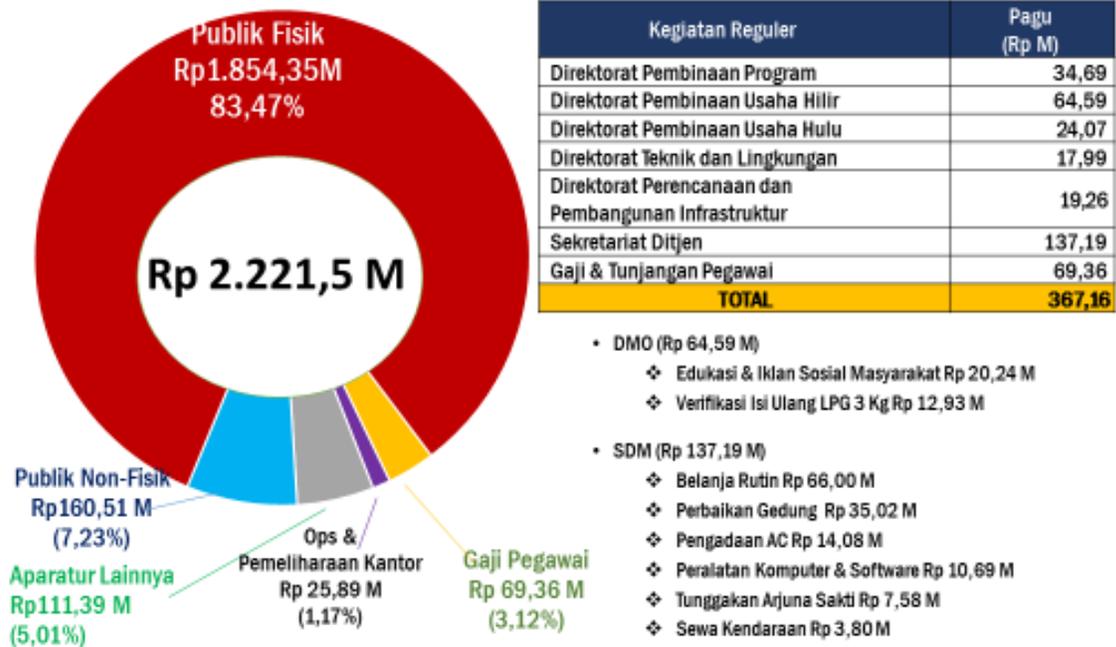


Diagram 65. Postur Anggaran Ditjen Migas Tahun 2017

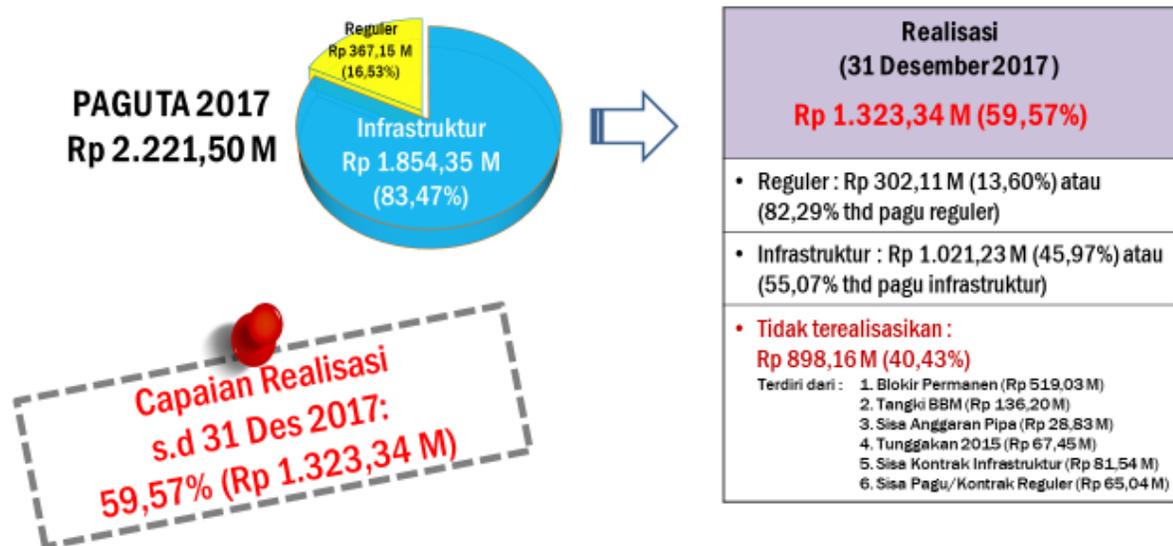


Diagram 66. Summary penyerapan anggaran Ditjen Migas TA 2017

Seperti terlihat pada bagan diatas, realisasi anggaran Ditjen Migas Tahun 2017 sebesar 59,97% atau lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 79,67%. Hal ini diakibatkan oleh beberapa alasan seperti yang dapat dilihat dari bagan diatas.

Tabel 44. Realisasi Anggaran Per Unit Eselon I Kementerian ESDM Tahun 2016

UNIT ESELON I	PAGU	REALISASI	% REALISASI
Setjen KESDM	406.560.349.000	369.069.531.169	90,78
Itjen KESDM	79.690.724.000	72.786.725.661	91,34
Ditjen Migas	2.221.504.736.000	1.323.337.539.592	59,57
Ditjen Ketenagalistrikan	160.714.252.000	146.691.389.972	91,27
Ditjen Minerba	322.785.258.000	299.942.557.193	92,92
DEN	63.911.144.000	58.778.213.546	91,97
Balitbang	555.502.941.000	495.463.656.109	89,19
BPSDM	513.062.754.000	468.060.483.389	91,23
Badan Geologi	748.066.390.000	663.097.488.804	88,64
BPH Migas	206.900.236.000	153.429.337.890	74,,16
Ditjen EBTKE	1.295.897.248.000	867.235.994.649	66,92
TOTAL	6.574.596.032.000	4.917.892.917.974	74,80

Seperti terlihat pada tabel diatas, realisasi anggaran Ditjen Migas merupakan realisasi anggaran terendah jika dibandingkan dengan unit Eselon I lainnya di KESDM dengan capaian sebesar 59,57%. Untuk alokasi Pagu anggaran Ditjen Migas menempati posisi terbesar dikarenakan Ditjen Migas ditugaskan membangun infrastruktur yang berkaitan dengan kemigas di Indonesia selain infrastruktur yang dibangun oleh BUMN lainnya. Rincian dari capaian anggaran dapat terlihat pada bagan seperti di bawah ini:

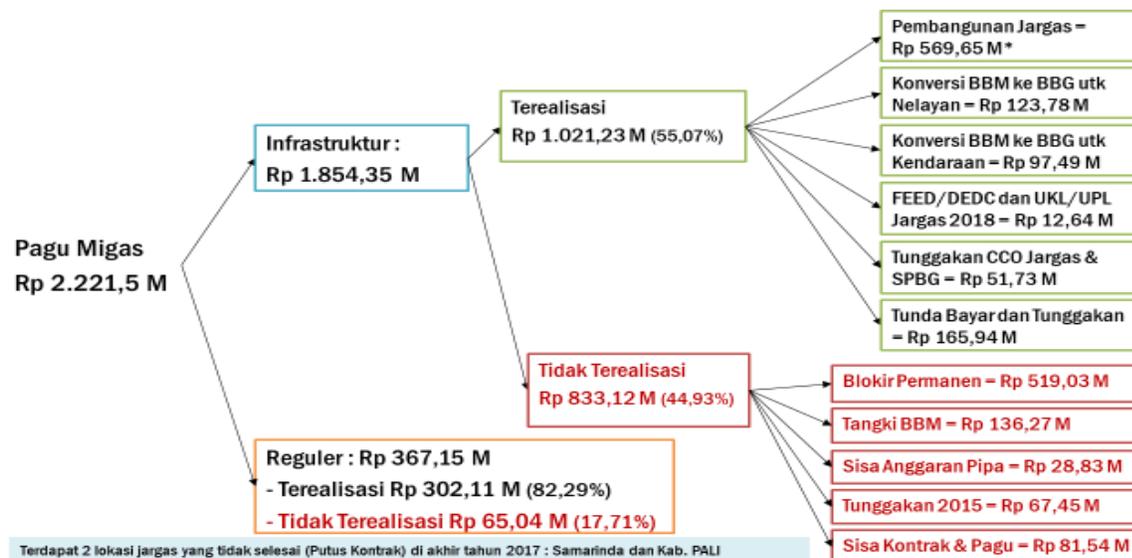


Diagram 67. Realisasi anggaran per 31 Desember 2017

Tabel 45. Realisasi anggaran per 31 Desember 2017

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%KINERJA	%ANGGARAN	Anggaran	Realisasi	%KINERJA	%ANGGARAN	Anggaran	Realisasi	
							2017	2016						
Optimalisasi Penyediaan Energi Fosil	1	Lifting minyak gas bumi												
	a.	Lifting minyak bumi (APBN 2016)	MBOPOD	815	803	98.53	76,65	14.295.534.000	10.957.624.369	99,88	79,55	12.475.508.000	9.924.274.645	
	b.	Lifting gas bumi (APBN 2016)	MBOEPD	1150	1140	99.13				102,86				
	2	Jumlah penandatanganan KKKS Migas												
	a.	Konvensional	KKKS	4	0	0,00	74,88	5.080.757.000	3.804.604.252	0,00	92,76	5.100.849.000	4.731.299.271	
	b.	Non konvensional	KKKS	2	0	0,00	85,31	5.520.420.000	4.709.607.633	50,00	94,55	5.944.282.000	5.620.392.279	
	3	Cadangan minyak gas bumi												
	a.	Cadangan minyak bumi	MMSTB	6714	7534	112,21	40,96	16.128.161.657	6.605.879.021	110,05	90,05	8.486.070.000	7.642.091.657	
	b.	Cadangan gas bumi	TCF	146	143	97,95				98,63				
Meningkatkan investasi sub sektormigas	4	Investasi sub sektormigas	Miliar US\$	22,2	8,4897	38,24	29,72	41.010.204.335	12.189.477.937	47,98	92,25	18.347.537.000	16.925.353.335	
	5	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan sub sektormigas sesuai prosedur	Rancangan	10	12	120,00	91,47	206.547.845.000	188.938.921.496	120,00	86,24	177.550.575.000	156.668.983.240	
Meningkatkan alokasi migas domestik	6	Pemanfaatan gas bumi dalam negeri												
	a.	Presentase alokasi gas domestik	%	62	60,6	97,74	85,51	4.281.584.000	3.661.060.626	95,08	84,72	8.407.511.000	7.123.249.393	
	b.	Fasilitas pembangunan FSRU (Floating Storage Regasification Unit) / Regasifikasi on-shore (LNG Terminal)	Unit	1	1	100,00	90,53	2.246.059.000	2.033.435.628	100,00	84,93	3.321.001.000	2.820.562.648	
Meningkatkan akses dan infrastruktur migas	7	Kapasitas kilang BBM												
	a.	Produksi BBM dari kilang dalam negeri	Juta KL	39	42,3*	108,46	33,79	33.031.905.113	11.160.232.488	107,69	88,81	17.494.649.000	15.537.256.113	
	b.	Kapasitas kilang BBM dalam negeri	Ribu BCPD	1169	1169	100,00				100,17				
	8	Kapasitas terpasang kilang LPG	Juta MT	4,7	4,74	100,85				97,19				
	9	Pembangunan jaringan gas kota												
		a.	Jumlah wilayah dibangun jaringan gas kota	Lokasi	9	10	111,11	55,22	1.873.609.487.000	1.034.559.204.591	100,00	78,11	1.896.942.308.000	1.481.726.510.176
b.		Rumah tangga sambungan gas kota	SR	53700	59809	111,14				101,00				
10	Pembangunan infrastruktur sarana bahan bakar gas	Lokasi	1	0	0,00				100,00					
Mewujudkan subsidi energi yang lebih tepat sasaran	11	Volume BBM subsidi (APBN 2016)	Juta KL	16,61	14,952*	90,02	23,76	101.590.880.253	24.136.892.398	85,14	90,97	52.569.595.000	47.822.238.253	
	12	Volume LPG subsidi (APBN 2016)	Juta MT	7,09	6,305	88,93				90,99				
Mengoptimalkan penerimaan negara dari sub sektormigas	13	Jumlah realisasi penerimaan negara dari sub sektormigas terhadap target APBN (APBN 2016)	Rp. Triliun	105,45	1.380,074	130,87	49,14	7.943.308.642	3.903.207.607	66,23	84,15	9.439.465.000	7.943.308.642	
Terwujudnya lingkungan yang aman dan sehat bagi masyarakat	14	Jumlah perusahaan yang melaksanakan kepatuhan yang baik	Perusahaan	45	45	100,00	33,54	23.175.424.469	7.773.574.145	102,50	83,28	12.644.614.000	10.530.810.469	
	15	Jumlah perusahaan hulu migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan fatal	Perusahaan	90	92	102,22	23,67	17.169.470.621	4.063.202.874		83,71	9.346.095.500	7.823.375.121	
		b.	Jumlah perusahaan hilir migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan fatal	Perusahaan	180	180	100	80,14	6.040.427.500	4.840.614.527		84,82	6.040.427.500	5.123.734.255

Di tahun 2017, Ditjen Migas mulai memetakan anggaran yang digunakan dalam pencapaian target yang terdapat dalam PK Ditjen Migas Tahun 2017. Seperti terlihat pada tabel di atas, capaian anggaran yang ada disandingkan dengan setiap indikator yang tertera di PK. Pemetaan tersebut berasal dari anggaran unit Eselon III yang bertanggung jawab terhadap

capaian masing-masing indikator. Selain itu, tabel diatas juga membandingkan dengan capaian kinerja dan anggaran di tahun 2016. Sehingga dapat terlihat, dalam dua tahun terakhir terdapat perbedaan indikator dalam PK. Hal ini dimungkinkan terjadi ketika, dalam tahun berjalan indikator tersebut tidak relevan lagi dengan kondisi riil yang ada. Indikator tersebut adalah Persentase penurunan jumlah kecelakaan fatal pada operasi kegiatan hulu dan hilir migas. Karena setiap tahun, tidak dapat dipastikan terjadi penurunan kecelakaan fatal pada operasi kegiatan hulu dan hilir migas.

Tabel 46. Realisasi PNBP TA 2017

NO	JENIS PENERIMAAN	Rp
1	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	270.289.510.395
2	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5.109.397.089
3	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.320.968.600
4	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	16.229.204.979
5	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	82.221.850
6	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	2.269.838.927
7	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	16.464.202.395
8	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	2.926.000
TOTAL		312.768.270.235

Seperti terlihat pada tabel diatas, kontribusi PNBP Ditjen Migas Tahun 2017 terbesar ada pada Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas yang terdiri dari Signatur Bonus, Firm Commitment, Bid Commitment dan setoran dari Giro dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 47. Kontribusi PNBP Ditjen Migas Tahun 2016

NO	JENIS SETORAN	WILAYAH KERJA	JUMLAH (Rp)
1	Signature Bonus	Blok Offshore North West Java	66.625.000.000
2	Signature Bonus	WK Bentu - EMP Bentu	13.343.000.000
3	Firm Commitment	WK Terumbu - AWE (TERUMBU) NZ LIMITED	80.293.000.000
4	Firm Commitment	WK Bulungan - ENI Limited	53.288.000.000
5	Firm Commitment	WK Bengkulu I - Total E&P	55.273.850.000
6	Bid Document		1.466.660.395
TOTAL			270.289.510.395

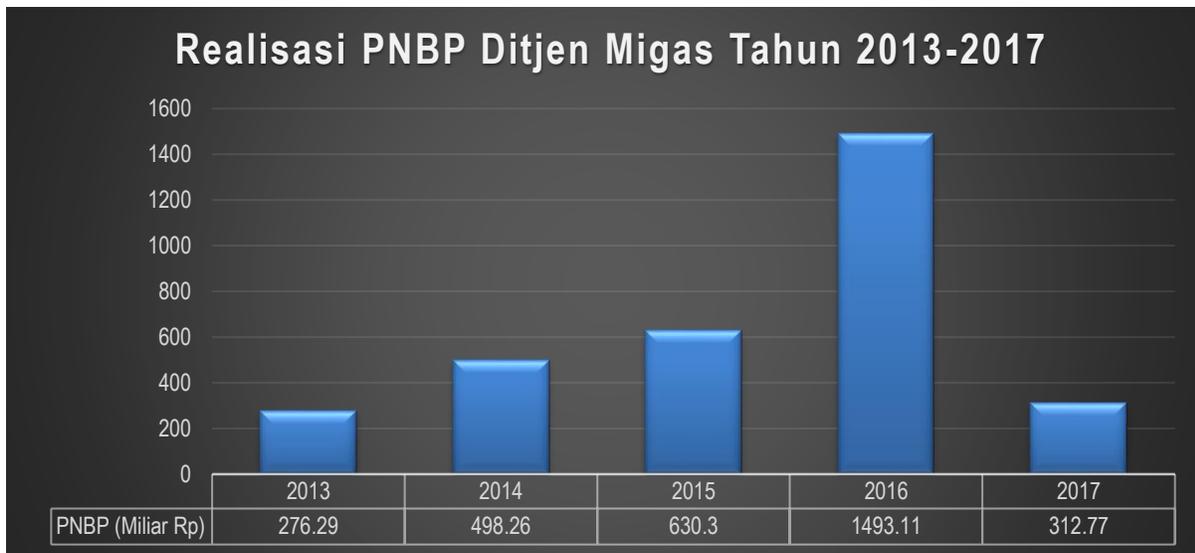


Diagram 68. Realisasi PNBP Ditjen Migas Tahun 2013-2017

Seperti terlihat pada tabel diatas, realisasi PNBP Ditjen Migas tahun 2017 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2016.

Tabel 48. Capaian Anggaran Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Per Unit Eselon II Tahun 2017

Kode Nama Kegiatan / Output	Pagu	Realisasi
1892 Penyiapan Kebijakan Dan Peningkatan Kerja Sama Bilateral Dan Multilateral Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara	34.698.418.000	27.809.223.500
1892009 Layanan Pembinaan dan Pengawasan Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Barang Operasi Migas	5.362.250.000	3.903.207.607
1892010 Layanan Pembinaan, Pengawasan dan Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sub Sektor Migas	14.295.534.000	10.957.624.369
1892011 Layanan Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri, Bilateral, Regional, dan Multilateral Minyak dan Gas Bumi	5.021.736.000	4.709.427.371
1892012 Layanan Pembinaan dan Pengembangan Investasi Migas	5.737.314.000	4.577.903.527
1892013 Layanan Pengawasan dan Penyiapan Program Minyak dan Gas Bumi	4.281.584.000	3.661.060.626
1893 Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	64.598.035.000	37.330.560.514
1893020 Layanan Dalam Rangka Fasilitas Kegiatan Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi	1.714.596.000	1.643.813.463
1893021 Layanan Dalam Rangka Fasilitas Kegiatan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi	2.416.413.000	2.388.361.475
1893022 Layanan Dalam Rangka Fasilitas Kegiatan Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi	2.246.059.000	2.033.435.628
1893023 Layanan Dalam Rangka Fasilitas Kegiatan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi serta Hasil Olahahan	9.863.128.000	9.516.419.025
1893024 Rekomendasi Kebijakan Harga dan Subsidi Bahan Bakar	47.158.792.000	20.600.669.262
1893951 Layanan Internal (Overhead)	1.199.047.000	1.147.861.661
1894 Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	24.065.757.000	18.022.237.945
1894016 Layanan Penawaran kontrak kerja sama migas dan penetapan Hasil Lelang Wilayah Kerja Migas Konvensional	5.080.757.000	3.804.604.252
1894017 Layanan Penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional dan Penetapan Pemenang Hasil Lelang Wilayah Kerja Migas	5.520.420.000	4.709.607.633
1894018 Layanan Pemantauan dan Pengawasan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi	4.406.054.000	2.798.636.259
1894019 Layanan Pembinaan dan Pengembangan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi	3.136.714.000	2.902.147.039
1894020 Layanan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Kegiatan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi	5.921.812.000	3.807.242.762
1895 Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas	17.985.194.000	16.677.391.546
1895018 Layanan Pembinaan pengawasan keteknikan dan keselamatan lingkungan Minyak dan Gas Bumi	4.128.315.000	3.794.656.260
1895019 Layanan Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Usaha Penunjang dan Perusahaan jasa inspeksi teknis (PJIT) Migas	2.727.764.000	2.590.911.874
1895020 Layanan Pembinaan pengawasan keselamatan operasi Hilir migas	3.008.776.000	2.767.746.937
1895021 Layanan Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Operasi Hulu Migas	4.052.772.000	3.545.158.590
1895022 Layanan Pembinaan dan Pengawasan Standardisasi Migas	4.067.567.000	3.978.917.885
1896 Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Migas	206.547.845.000	188.938.921.496
1896950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	59.517.276.000	53.591.720.479
1896951 Layanan Internal (Overhead)	51.781.659.000	42.020.078.112
1896994 Layanan Perkantoran	95.248.910.000	93.327.122.905
4998 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pengadaan Pembangunan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur	1.873.609.487.000	1.034.559.204.591
4998001 Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga	962.010.112.000	588.572.007.995
4998002 Infrastruktur Sarana Bahan Bakar Gas untuk Transportasi	449.577.400.000	218.987.890.604
4998003 Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan	130.205.323.000	126.814.282.228
4998004 Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Kendaraan	100.664.701.000	99.144.207.373
4998005 Stasiun LCNG/LNG	2.041.233.000	8.290.000
4998006 Tangki Penyimpanan LPG	90.910.000.000	7.976.000
4998007 Tangki Penyimpanan BBM	136.388.541.000	98.455.600
4998008 Infrastruktur Migas di Wilayah 3T (Tertuar, Tertinggal dan Terdepan) Indonesia	193.255.000	10.768.000
4998009 Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg	1.618.922.000	915.326.791
TOTAL	2.221.504.736.000	1.323.337.539.592

Bab IV

Pembahasan dan Kesimpulan

Berdasarkan dari penelaahan terhadap hasil capaian kinerja Ditjen Migas selama tahun anggaran 2017, dapat dikatakan bahwa kinerja Ditjen Migas tahun dimaksud cukup baik. Hal ini dikarenakan rerata pencapaian kinerja Ditjen Migas pada tahun 2017 mencapai angka 87.77% yang meskipun masih lebih rendah dibandingkan pencapaian tahun 2015, tetapi cukup meningkat dibandingkan dengan rerata capaian per indikator kinerja pada tahun 2016.

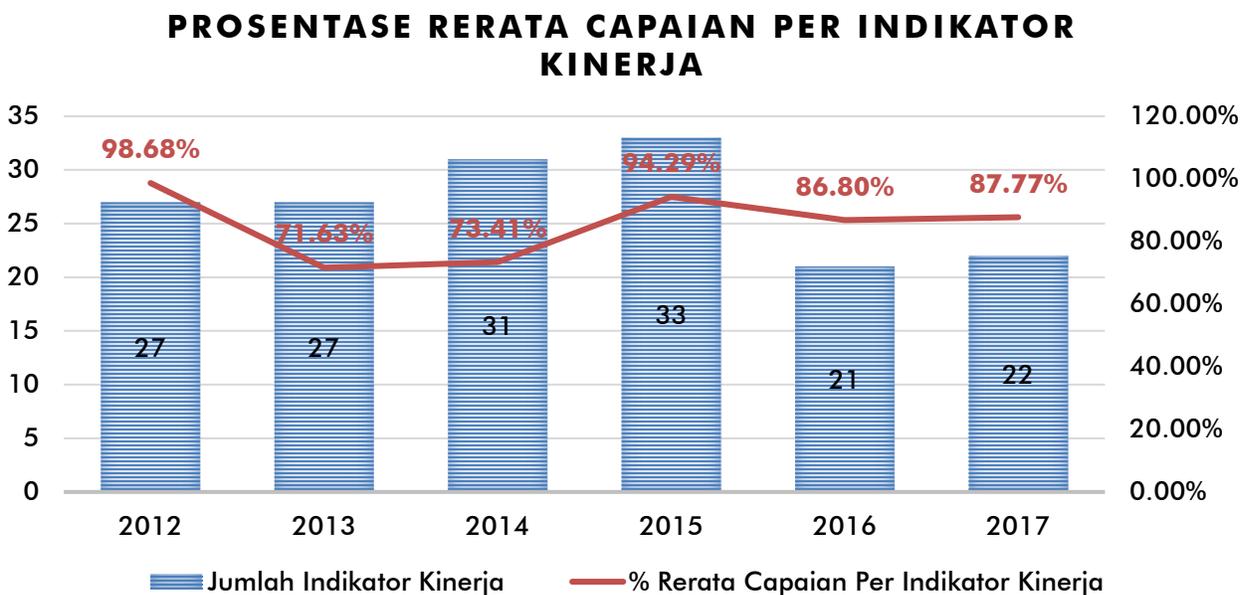


Diagram 69. Prosentase Rerata Capaian Per Indikator Kinerja

Adapun rekapitulasi capaian kinerja atas target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Ditjen Migas 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 49. Rekapitulasi capaian kinerja Ditjen Migas 2017

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Presentasi
Optimalisasi Penyediaan Energi Fosil	1	Lifting minyak dan gas bumi				
		a. Lifting minyak bumi (APBN 2016)	MBOPD	815	803	98.53%
		b. Lifting gas bumi (APBN 2016)	MBOEPD	1150	1140	99.13%
	2	Jumlah penandatanganan KKKS Migas				
	a. Konvensional	KKKS	4	0	0.00%	

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Presentasi
		b. Non konvensional	KKKS	2	0	0.00%
	3	Cadangan minyak dan gas bumi				
		a. Cadangan minyak bumi	MMSTB	6714	7534	112.21%
		b. Cadangan gas bumi	TCF	146	143	97.95%
Meningkatkan investasi sub sektor migas	4	Investasi sub sektor migas	Miliar US\$	22.2	8.3995	37.84%
	5	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan sub sektor migas sesuai prolegnas	Rancangan	10	12	120.00%
Meningkatkan alokasi migas domestik	6	Pemanfaatan gas bumi dalam negeri				
		a. Presentase alokasi gas domestik	%	62	60.6	97.74%
		b. Fasilitasi pembangunan FSRU (Flating Storage Regasification Unit/Regasifikasi on-shore/LNG Terminal)	Unit	1	1	100.00%
Meningkatkan akses dan infrastruktur migas	7	Kapasitas kilang BBM				
		a. Produksi BBM dari kilang dalam negeri	Juta KL	39	42.3	108.46%
		b. Kapasitas kilang BBM dalam negeri	Ribu BCPD	1169	1169	100.00%
	8	Kapasitas terpasang kilang LPG	Juta MT	4.7	4.74	100.85%
	9	Pembangunan jaringan gas kota				
		a. Jumlah wilayah dibangun jaringan gas kota	Lokasi	9	10	111.11%
		b. Rumah tangga tersambung gas kota	SR	53700	49934	92.99%
	10	Pembangunan infrastruktur sarana bahan bakar gas	Lokasi	1	0	0.00%
Mewujudkan subsidi energi yang lebih tepat sasaran	11	Volume BBM subsidi (APBN 2016)	Juta KL	16.61	14.952	109.98%
	12	Volume LPG subsidi (APBN 2016)	Juta MT	7.09	6.305	111.07%
Mengoptimalkan penerimaan negara dari sub sektor migas	13	Jumlah realisasi penerimaan negara dari sub sektor migas terhadap target APBN (APBN 2016)	Rp. Triliun	105.45	138.0074	130.87%
Terwujudnya lindung lingkungan keselamatan operasi dan	14	Jumlah perusahaan yang melaksanakan keteknikan yang baik	Perusahaan	45	45	100.00%
	15	Jumlah perusahaan hulu dan hilir migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan fatal:				

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Presentasi
usaha penunjang migas	a.	Jumlah perusahaan hulu migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan fatal	Perusahaan	90	92	102.22%
	b.	Jumlah perusahaan hilir migas yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan fatal	Perusahaan	180	180	100.00%

Selanjutnya, dari hasil penelaahan terhadap pencapaian masing-masing indikator kinerja yang tercantum dalam PK 2017, dapat disimpulkan bahwa secara umum kendala yang dialami dalam realisasi target terdiri dari beberapa faktor sebagai berikut:

a) Harga Minyak dunia

Harga minyak dunia, sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, merupakan faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja pada beberapa indikator kinerja, seperti penerimaan negara, investasi migas, penandatanganan kontrak kerja sama, dan bahkan indikator kinerja realisasi cadangan migas mengingat harga minyak bumi berpotensi untuk mempengaruhi antusiasme KKKS dalam melakukan eksplorasi di Indonesia. Harga minyak dunia, sampai dengan saat ini masih merupakan faktor eksternal yang menjadi tantangan terbesar bagi Ditjen Migas untuk mencapai target Perjanjian Kinerja.

b) Kondisi wilayah kerja yang semakin terbatas dan sumur-sumur di Indonesia yang menua

Kondisi wilayah kerja yang semakin terbatas dan sumur-sumur di Indonesia yang menua merupakan faktor *given* atau yang bersifat fisik serta merupakan faktor internal di dalam wilayah Indonesia. Faktor keterbatasan wilayah kerja dan menuanya sumur-sumur Indonesia ini mempengaruhi capaian indikator lifting migas, dan penerimaan negara. Saat ini, kondisi wilayah kerja migas yang kaya hidrokarbon di daerah on-shore dan mudah untuk dilakukan eksplorasi dan eksploitasi semakin terbatas. Sehingga kegiatan eksplorasi dan eksploitasi semakin diarahkan untuk ke wilayah Timur Indonesia dan di laut dalam. Selain itu, penurunan produksi migas secara alamiah masih menjadi salah satu momok bagi sub sektor migas. Sudah banyak diketahui umum bahwa kondisi sumur-sumur migas di Indonesia banyak yang merupakan sumur tua. Dengan demikian, tidak hanya dibutuhkan kegiatan produksi dengan ekstra yang lebih untuk dapat mengoptimalkan produksi migas, tetapi juga dibutuhkan adanya penemuan lapangan dengan potensi cadangan yang cukup besar dan bisa meningkatkan cadangan dan produksi migas.

c) Transisi kebijakan PSC menjadi *Gross Split*

Pemberlakuan kebijakan *Gross Split* ini pada dasarnya merupakan salah satu kondisi yang diharapkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi biaya operasi kegiatan hulu migas. Namun demikian, selama periode transisi pemberlakuan kebijakan

ini, beberapa indikator kinerja Penandatanganan KKS migas tidak dapat tercapai pada tahun 2017, tahun dimana transisi masih berlangsung dikarenakan dilakukan penambahan waktu bagi KKKS untuk menyerahkan dokumen partisipasi yang akhirnya berdampak pada jadwal penandatanganan yang mundur dari semula.

d) Keterbatasan infrastruktur penunjang

Keterbatasan infrastruktur merupakan salah satu tantangan dalam upaya distribusi manfaat sumber daya migas sebesar besar untuk kemakmuran rakyat. Keterbatasan infrastruktur juga menjadi kendala dalam pencapaian indikator alokasi gas bumi dimana gas bumi nasional belum secara optimal terserap untuk kebutuhan industri domestik.

e) Kendala dalam proses penyelenggaraan pengadaan

Kendala ini umumnya bersifat insidental dan tidak tentu terjadi di setiap tahunnya. Kendala ini menjadi faktor utama tidak tercapainya pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga serta pembangunan infrastruktur gas bumi untuk transportasi (SPBG). Kendala proses penyelenggaraan dapat terjadi dikarenakan adanya perubahan kebijakan pimpinan berkenaan dengan pengadaan maupun akibat proses pengadaan yang memerlukan waktu tambahan yang cukup lama.

Namun demikian, perlu disampaikan pula bahwa sebagai instansi Pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang minyak dan gas bumi, upaya yang telah dilaksanakan oleh Ditjen Migas sepanjang tahun 2017 antara lain berupa penerbitan kebijakan yang flexible dan menyesuaikan dengan kebutuhan eksisting. Salah satu kebijakan migas yang telah diterbitkan selama tahun 2017 adalah kebijakan terkait *Gross Split*. Meskipun masa transisinya menjadi kendala dalam pencapaian indikator penandatanganan KKS migas, namun demikian, kebijakan ini cukup flexibel dan diharapkan mampu meningkatkan antusiasme KKKS migas untuk meningkatkan inverasi migas di Indonesia. Kebijakan gross split ini diharapkan dapat secara tidak langsung meningkatkan pencapaian kinerja Pemerintah di subsektor migas di masa yang akan datang.

References

Azzura, S. N., 2018. *Dampak kebijakan OPEC, harga minyak mentah RI cetak angka tertinggi di 2017*. [Online]

Available at: <https://www.merdeka.com/uang/dampak-kebijakan-opec-harga-minyak-mentah-ri-cetak-angka-tertinggi-di-2017.html>

[Accessed 13 Februari 2018].

Berita Moneter, 2014. *Investasi Proyek Banyu Urip Mencapai US\$ 2,5 Miliar*. [Online]

Available at: <http://www.beritamoneter.com/investasi-proyek-banyu-urip-mencapai-us-25-miliar/>

[Accessed 16 Januari 2018].

BMI Reserach, 2016. *Malaysia Oil & Gas Report*. Q1 2016 ed. London: BMI Research.

British Petroleum, 2016. *BP Statistical Review of World Energy June 2016*. 65th ed. London: British Petroleum.

British Petroleum, 2017. *BP Statistical Review*. June 2017 ed. London: British Petroleum.

CIA, 2016. *The World Factbook: Crude Oil Production*. [Online]

Available at: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2241.html#id>

[Accessed 24 January 2017].

Detik Finance, 2017. *Ini Tantangan RI Capai Target Produksi Migas 2 Juta Barel/Hari di 2018*. [Online]

Available at: <https://finance.detik.com/energi/d-3768273/ini-tantangan-ri-capai-target-produksi-migas-2-juta-barelhari-di-2018>

[Accessed 18 Januari 2018].

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, 2015. *Statistik Minyak dan Gas Bumi 2015*.

Jakarta: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Djarmiko, W., 2003. *Sertifikasi Cadangan Migas*. [Online]

Available at: <http://www.iatmi.or.id/assets/bulletin/pdf/2003/2003-68.pdf>

[Accessed 22 Januari 2018].

EIA, n.d. *Production of Crude Oil including Lease Condensate*. [Online]

Available at:

https://www.eia.gov/beta/international/data/browser/#/?pa=00000000000000000000000000000002&c=rurvvvvfvtnvv1vrvvvvfvvvvvfvvvou20evvvvvvvvvvvvvo&ct=0&tl_id=5-A&vs=INTL.57-1-AFG-TBPD.A&vo=0&v=H&start=2014&end=2016

[Accessed 31 Januari 2018].

- EIA, n.d. *Total Petroleum and Other Liquids Production 2016*. [Online]
Available at: <https://www.eia.gov/beta/international/rankings/#?product=53-1&cy=2016>
[Accessed 31 Januari 2018].
- Jones, D., 2017. *Oil: 2017 In Review, 2018 In Preview*. [Online]
Available at: <https://seekingalpha.com/article/4134393-oil-2017-review-2018-preview>
[Accessed 22 Januari 2018].
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online]
Available at: <https://kbbi.web.id/investasi>
[Accessed 22 Januari 2018].
- Reuters, 2017. *UPDATE 1-Azerbaijan's oil output rises in September*. [Online]
Available at: <https://www.reuters.com/article/azerbaijan-oil-output/update-1-azerbaijans-oil-output-rises-in-september-idUSL8N1ME1AE>
[Accessed 31 Januari 2018].
- Society of Petroleum Engineers, 2017. *Petroleum Reserves Definitions*. [Online]
Available at: <http://www.spe.org/industry/petroleum-reserves-definitions.php>
[Accessed 22 Januari 2018].
- Trading Economics, 2018. *Egypt Crude Oil Production*. [Online]
Available at: <https://tradingeconomics.com/egypt/crude-oil-production>
[Accessed 31 Januari 2018].
- Trading Economics, 2018. *India Crude Oil Production*. [Online]
Available at: <https://tradingeconomics.com/india/crude-oil-production>
[Accessed 31 Januari 2018].
- Trading Economics, 2018. *Malaysia Crude Oil Production*. [Online]
Available at: <https://tradingeconomics.com/malaysia/crude-oil-production>
[Accessed 31 Januari 2018].
- Tribun Bisnis, 2014. *Proyek Migas Banyu Urip Cepu Hasilkan 36 Juta Barel Minyak*. [Online]
Available at: <http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/04/25/proyek-migas-banyu-urip-cepu-hasilkan-36-juta-barel-minyak>
[Accessed 16 Januari 2018].